



Dr. H. Syarif Fasha, ME
WALI KOTA JAMBI

Dr. dr. H. Maulana, MKM
WAKIL WALI KOTA JAMBI

LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) LPPD KOTA JAMBI TAHUN 2019

IKK II.1

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KOTA JAMBI

.	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan ttg ketertiban penataan ruang	1	Keberadaan PERDA IMB	Ada/tidak ada PERDA	ADA: PERDA Nomor : 3 Tahun 2015 tentang Bangunan	Ada	Bagian Hukum
			2	Rasio Rumah ber IMB	Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah rumah seluruhnya	- Jumlah rumah ber IMB s/d. akhir tahun 2019, sebanyak 3672 unit - Jumlah seluruh rumah s/d akhir tahun 2019, sebanyak 145.872 unit	2,51%	Sumber Data dari DPMPSTP
			3	Keberadaan PERDA RTRW	Ada/tidak ada PERDA RTRW	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor : 9 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Jambi Tahun 2013-2033	Ada	Bappeda
		Peraturan ttg kependudukan	4	Pengurusan e-KTP	Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E- KTP dibagi Jumlah penduduk yang wajib ber- KTP	Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP = 437,196 dibagi Jumlah penduduk yang wajib ber- KTP = 446,304	97,96%	
			5	Pengurusan KIA	Presentase Anak yang sudah memiliki KIA	Jumlah KIA yang sudah tercetak = 48.404 dan Jumlah anak yg harus memiliki KIA = 57.037	84,86%	
		Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum)	6	Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk	Jumlah personil Satpol PP pada akhir tahun 2019 dibagi 10.000 penduduk x 100 %	55 Personil Pol pp/531.000 jiwa penduduk kota jambi	0,01%	Duk Sat Pol PP dan Data Penduduk Dukcapil
		Kebijakan bidang Penanganan Bencana	7	Keberadaan PERDA tentang Penanganan Bencana	Ada atau tidak ada PERDA Penanganan Bencana	ADA: Peraturan Walikota Jambi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Prosedur Tetap (PROTAP) Penanggulangan Kebakaran Dan Bencana Lainnya Serta Pemberian Bantuan Korban Kebakaran Dan Bencana Lainnya Di Kota Jambi	ADA	Bagian Hukum
		Peraturan tentang	8	Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kota	Ada atau tidak ada PERDA Kebersihan Kota	ADA: PERDA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	ADA	BAGIAN HUKUM

		Kebersihan Kota						
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Penyampaian laporan kepada pemerintah	9	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 13 tahun 2019	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Penyampaian Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019	Tepat Waktu	Tepat Waktu
		Penyampaian laporan keuangan dan kinerja	10	Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2008	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja BPKAD Kota Jambi	TEPAT WAKTU	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA JAMBI
		Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	11	Pemerintah Daerah yang memiliki peraturan tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal	Ada atau tidaknya penerapan Standar Pelayanan Minimal	Belum Ada peraturan tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal di Pemerintah Daerah	Tidak Ada	Sumber data berasal dari bagian hukum
		Hubungan antar daerah	12	Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU yang masih berlaku pertahun 2019	Tahun 2015 ada 1 MoU. 1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Jambi dengan Universitas jambi tentang Kerjasama Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nomor : 14/HKU2015 Tahun 2016 ada 5 MoU. 1. Kesepakatan Bersama antara Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi dengan Walikota Jambi tentang Pengawasan dan Pembinaan Pelayanan Publik, Nomor : 04/HKU/2016 2. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Jambi dengan PT Bank tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Jambi tentang Pemanfaatan Layanan Perbankan untuk penerimaan setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB-P2), Nomor : 09/HKU/2016 3. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Jambi dengan PT Bank OCBC NISP TBK tentang Pemanfaatan Layanan Perbankan untuk penerimaan setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB-P2), Nomor : 10/HKU/2016 4. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Jambi dengan PT Bank Bukopin Tbk tentang Pemanfaatan Layanan Perbankan untuk penerimaan setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB-P2), Nomor : 11/HKU/2016 5. Kesepakatan Bersama antara Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kota Jambi tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan	MoU yang masih berlaku s/d Tahun 2019 sebanyak 43 MoU	Sumber data dari Bagian Kerjasama

					Lingkungan, Nomor : Tahun 2017 ada 6 MoU. 1. Nota Kesepahaman anatar Pemerintah Kota Jambi dengan PT. Devis Jaya tentang Kerjasama Pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO), Nomor : 02/HKU/2017 2. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Jambi dengan Kejaksaan Negeri Jambi tentang Koordinasi dan Kerjasama dalam Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata usaha Negara, Nomor : 3.a/HKU/2017 3. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Jambi dengan universitas Jambi tentang Kerjasama Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan, Bimbingan Teknis, Perencanaan, Standarisasi, IPTEK, dan Informasi, Analis, Pengkajian dan Penelitian, Nomor : 5/Hku/2017 4. Kesepakatan Bersama antara Walikota Jambi dengan Rektor Institut Pemerintah Dalam Negeri tentang Kerjasama Dalam Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Penelitian dan Pengkajian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, Nomor : 11/HKU/2017 5. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Jambi dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten tentang Kerjasama Pembangunan Daerah, Nomor : 13/HKU/2017 6. Nota Kesepahaman antara Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Walikota Jambi Pemerintah Kota Jambi tentang Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Kota Jambi, Nomor : 14/HKU/2017 Tahun 2018 ada 11 MoU. 1. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Jambi dengan Politeknik Negeri Sriwijaya tentang Kerjasama Dalam Bidang Pengmbangan Sumber Daya Aparatur, Pendidikan, Penelitian, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Nomor : 01.a/MOU/HKU/2018 2. Nota Kesepahaman antara Pemerinta Kota Jambi dengan Batalyon Infanteri Ksatria Jaya Jambi tentang Pembinaan Mental, Fisik dan Disiplin Bagi Anak Pank, Pengemis dan Anak Jalanan, Nomor 01.b/MOU/HKU/2018 3. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Jambi dengan BPJS Kesehatan Cabang Jambi tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Masyarakat Kota Jambi, Nomor : 01/MOU/HKU/2018 4. MoU antara Pemerintah Kota Jambi dengan PT. BANK CIMB NIAGA TBK Jambi tentang Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Jambi, Nomor : 02/MOU/HKU/2018 5. MoU antara Pemerintah Kota Jambi dengan PT. BANK Pembangunan Daerah Jambi Cabang Sutomo tentang Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Jambi, Nomor : 03/MOU/HKU/2018 6. MoU antara Pemerintah Kota		
--	--	--	--	--	--	--	--

					Jambi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tentang Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Jambi, Nomor : 04/MOU/HKU/2018 7. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Jambi dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Untuk Layanan Keuangan di Pemerintah Kota Jambi, Nomor : 06/MOU/HKU/2018 8. Nota Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi tentang Pengintegrasian Aplikasi E-Planing dan SIPKD Kota Jambi, Nomor : 900/377/BPKAD/VII/2018 dan 050/195/I/BAPPEDA 9. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Jambi dengan Politeknik Jambi tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Nomor : 11/MOU/HKU/2018 10. Kesepakatan Bersama antara Kepolisian Resort Kota Jambi tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi City Operation Center Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Secara Elektronik, Nomor : 15/MOU/HKU/2018 11. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Jambi dengan Kantor Pertanahan Kota Jambi tentang Percepatan Pensertipikatan Tanah, Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah Aset Pemerintah Kota Jambi, Nomor : 16/MOU/HKU/2018 Tahun 2019 ada 20 MoU. 1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Jambi dengan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi tentang Kerja Sama antar Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jambi, Nomor : 01/MOU/HKU/2019 2. Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Minyak dan GAS Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Pemerintah Kota Jambi tentang Penyediaan dan Pendistribusian GAS Bumi Melalui Jaringan Distribusi GAS Bumi untuk Rumah Tangga di Wilayah Kota Jambi Provinsi Jambi, Nomor : 02/MOU/HKU/2019 3. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Jambi dengan Stikom Dinamika Bangsa Jambi tentang Kerjasama Dalam Bidang Peningkatan Sumber Daya Aparatur, Pendidikan dan Penelitian Serta Pengabdian Kepada Masyarakat, Nomor : 03/MOU/HKU/2019 4. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Jambi dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi tentang Sinergi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Jambi, Nomor : 05/MOU/HKU/2019 5. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Jambi dengan Kejaksaan Negeri Jambi tentang Koordinasi dan Kerjasama Dalam Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha		
--	--	--	--	--	---	--	--

Negara, Nomor : 06/MOU/HKU/2019 6. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Jambi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi tentang Kerjasama dibidang Pertanahan, Nomor : 07/MOU/HKU/2019 7. Nota Kesepahaman antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi dengan Pemerintah Kota Jambi, tentang Pembentukan, Pembinaan, Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor : 08/MOU/HKU/2019 8. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Jambi dengan Universitas Brawijaya tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Nomor : 12/MOU/HKU/2019 9. Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kota Jambi dengan Pertamina Marketing Operation Region II Sumbagsel tentang Pengawasan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi di Kota Jambi, Nomor : 13/MOU/HKU/2019 10. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Jambi dengan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi tentang Koordinasi Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah, Nomor : 14/MOU/HKU/2019 11. Dokumen Kesepakatan antara Pemerintah Kota Jambi dengan Badan Pusat Statistik Kota Jambi tentang Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Guna Penyediaan, Pemanfaatan, Serta Pengembangan Data dan Informasi Statistik, Nomor : 15/MOU/HKU/2019 12. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Jambi dengan PT. Rimba Palma Sejahtera Lestari tentang Pemanfaatan dan Peningkatan Kapasitas Jalan Gunung Semeru dan Jalan Berdikari Provinsi Jambi, Nomor : 16/MOU/HKU/2019 13. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Jambi dengan PT. POS Indonesia (Persero) tentang Pemanfaatan Layanan Jasa Keuangan POS Indonesia di Kota Jambi, Nomor : 17/MOU/HKU/2019 14. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Jambi dengan PT. Bank BTN Cabang Jambi tentang Pemanfaatan Layanan Bank BTN untuk Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah di Kota Jambi, Nomor : 19/MOU/HKU/2019 15. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Jambi dengan PT. Bank Bukopin Cabang Jambi tentang Pemanfaatan Layanan Bank Bukopin untuk Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah di Kota Jambi, Nomor : 20/MOU/HKU/2019 16. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Jambi dengan PT. Bank OCBC NISP Jambi tentang Pemanfaatan Layanan Bank OCBC NISP Untuk Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah di Kota Jambi, Nomor : 21/MOU/HKU/2019 17. Nota

					Kesepahaman antara Pemerintah Kota Jambi dengan PT. Multi Inti Digital Transportasi tentang Transportasi Capsule Bus di Kota Jambi, Nomor : 22/MOU/HKU/2019 18. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Jambi dengan Universitas Jambi tentang Pendidikan, Penelitian, pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Nomor : 25/MOU/HKU/2019 19. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Jambi dengan Universitas Batanghari Jambi tentang Pendidikan, Penelitian, pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Nomor : 26/MOU/HKU/2019 20. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Jambi dengan PT. PLN (Persero) UIW Sumatera Selatan Jambi Bengkulu UP3 Jambi tentang Pengawasan, Penertiban, Pelayanan Penerangan Jalan Umum, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan, Sosialisasi serta Pembayaran rekening Listrik Pemerintah Kota Jambi, Nomor : 27/MOU/HKU/2019			
3	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	13	Kesesuaian prioritas pembangunan	Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas pembangunan nasional	- Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak 6 program. - Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 5 program prioritas.	100 %	6/5*100% = 100%
		Kewenangan	14	Urusan wajib yang diselenggarakan daerah	Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 24 (Jumlah urusan wajib di UU23/2014) X 100%	Jumlah urusan Wajib 24	100%	24/24 * 100% = 100
		Keuangan	15	Waktu penetapan PERDA APBD 2019	Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2019	Perda Nomor 7 tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018	TEPAT WAKTU	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA JAMBI
			16	Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah	Perda Kota Jambi No. 8 tahun 2012 tentang pokok pokok pengelolaan keuangan	ADA	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA JAMBI

			17	Belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja Pelayanan Dasar APBD Tahun 2019 1) Urusan Pendidikan Rp. 121.233.219.826.80 2) Urusan Kesehatan Rp. 174.705.123.106.13 3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp. 270.014.205.898,00 4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp. 34.145.609.270,00 5) Urusan Ketentraman dan ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat Rp. 14.335.334.151,00 6) Urusan Sosial Rp. 4.924.246.178,00 Total Belanja Pelayanan Dasar Rp. 619.357.738.429.93 Total APBD Rp.1.661.380.787.461.83 (Rp. 619.357.738.429.93/ Rp.1.661.380.787.461.83)x 100% = 37,28% =	37,28 %	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA JAMBI
			18	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2019 1) Urusan Pendidikan Rp. 121.233.219.826.8 2) Urusan Kesehatan Rp. 174.705.123.106.13 Total Belanja Pendidikan dan Kesehatan Rp. 295.938.342.932.93 (Rp. 295.938.342.932.93 / Rp. 1.661.380.787.461.83) *100 = 17,81 %	17,81%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA JAMBI
		Pelayanan Publik	19	Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ada atau tidak adanya standar pelayanan publik	tidak ada PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Tidak Ada	Sumber data berasal dari Bagian Hukum Setda Kota Jambi
		Kepegawaian	20	Ratio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS Kota dibagi jumlah penduduk	- Jumlah PNS Kota Jambi 6.213 Tahun 2019 - Jumlah Penduduk Kota Jambi Tahun 2019 sebanyak 615.675 Orang	1,01%	-
			21	Rasio PNS Memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi minimal DIII (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Tesehatan)	Jumlah PNS Memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi Minimal D III dibagi Jumlah PNS dikali 100%	- - Jumlah PNS Kota tahun 2019 berdasarkan pendidikan minimal D3(tidak termasuk guru dan kesehatan) sebanyak 851 orang - Jumlah PNS Kota Jambi tahun 2019 sebanyak 6.213 orang	13,70%	-
		Kelembagaan	22	Penataan Perangkat Daerah	Jumlah pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan PP 18/2016	39 Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	
		4	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	Produk peraturan perundangan	23	PERDA yang ditetapkan	Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2019	Perda yang ditetapkan - Perda No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Smart City - Perda No 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Bagi Lanjut Usia dan Penyandang

					Disabilitas - Perda No 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan - Perda No 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan - Perda No 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - Perda No 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah - Perda No 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 - Perda No 8 Tahun 2019 Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2018 - Perda No 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2019 - Perda No 10 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2020			
		RAPERDA yang diajukan tahun berjalan	24	RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2019	Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2019 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2019	- Jumlah Ranperda yang disetujui DPRD tahun 2019 sebanyak 11 Ranperda - Jumlah Ranperda yang diusulkan tahun 2019 sebanyak 17 Ranperda	64.7%	-
5	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	25	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti.	Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2019x 100%	- Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2019 sebanyak 41 keputusan; - Keputusan DPRD dalam tahun 2019 sebanyak 41 keputusan	100%	41/41*100% = 100%
6	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Tindaklanjut keputusan Walikota	26	Keputusan Walikota yang ditindaklanjuti	Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Walikota dalam tahun 2019 x 100%	- Keputusan Walikota yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2019, sebanyak 446 keputusan. - Keputusan Walikota dalam tahun 2019 sebanyak 446 keputusan.	100%	BAGIAN HUKUM; (446/446)x100% =100%
		Tindaklanjut Peraturan	27	Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti	Jumlah Peraturan Walikota yang	- Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti dalam tahun 2019 sebanyak 66 perwal. - Keputusan Walikota dalam tahun 2019	100%	Bagian Hukum; (66/66)*100%=

		Walikota			ditindak-lanjuti dibagi jumlah Peraturan WaliKabupaten dalam tahun 2019 x 100%	sebanyak 66 perwal		100%
7	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PERDA yang dibatalkan	28	Jumlah PERDA yang dibatalkan	Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100%	TIDAK ADA	TIDAK ADA	
8	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	PERDA tentang konsultasi publik	29	Keberadaan PERDA/PerWalikota tentang konsultasi publik	Ada/tidak PERDA/PerWalikota	Ada: -PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI SECARA ONLINE DENGAN APLIKASI RANTAMASKOT JAMBI. -PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM INFORMASI KELUHAN MASYARAKAT ONLINE KOTA JAMBI	ADA	BAGIAN HUKUM
		Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik	30	Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kota	Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan Per Walikota	-	Tidak ada	Tidak ada
9	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL	Serapan dana perimbangan	31	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100%	- Dana perimbangan yang terserap Tahun 2019 sebesar Rp. 1.110.177.033.331 - Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD tahun 2019 sebesar Rp. 1.130.319.892.976 (Rp. 1.110.177.033.331 / Rp. 1.130.319.892.976) * 100 = 98,22%	98,22%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA JAMBI
		Alokasi Belanja pada APBD dari DAU	32	Belanja Publik terhadap DAU	Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%	- Realisasi Belanja Langsung APBD tahun 2019 sebesar Rp. 965.465.479.732.83 - DAU Tahun 2019 sebesar Rp. 757.404.051.000.00 (Rp. 965.465.479.732.83 / Rp. 757.404.051.000.00) * 100 % = 127,47%	127,47%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA JAMBI
		Alokasi	33	Belanja Langsung	Total realisasi	- Total Realisasi Belanja Lansung APBD Tahun 2019, sebesar Rp.	58,11%	BADAN

		Belanja pada APBD		terhadap total APBD	belanja Langsung dibagi APBD x 100%	965.465.479.732.83 - Total Realisasi Belanja APBD Tahun 2019, sebesar Rp.1.661.380.787.461.83 (Rp. 965.465.479.732.83 / Rp.1.661.380.787.461.83) * 100 = 58,11%		PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA JAMBI
10	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	34	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	Jumlah PAD dibagi jumla total pendapatan APBD (realisasi) X 100%	- PAD APBD (Realisasi) Tahun 2019 seebesar Rp. 393.429.595.383.99 - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2019, sebesar Rp. 1.699.542.509.763.06 (Rp. 393.429.595.383.99 Rp. 1.699.542.509.763.06) * 100% = 23,15 %	23,15%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA JAMBI
11	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)	35	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah untuk 2 tahun terakhir	Surat Kepala BPK	2017 dan 2018 tercapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian	Opini yang dicapai yaitu Wajar Tanpa Pengecualian
		Besaran SILPA	36	Rasio SILPA thdp total pendapatan	Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%	- SILPA Tahun 2019, sebesar Rp. 211.085.867.201.12 - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) tahun 2019 sebesar Rp.1.699.542.509.763.06 (Rp. 211.085.867.201.12 / Rp.1.699.542.509.763.06) x 100% = 12,42%	12,42%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA JAMBI
		Realisasi belanja	37	Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja APBD X 100%	- Realisasi Belanja Tahun 2019, sebesar Rp. 1.661.380.787.461.83 - Total Anggaran BELanja dalam APBD Tahun 2019 Rp. 1.848.826.216.875,00 (Rp. 1.661.380.787.461.83 / Rp. 1.848.826.216.875,00) x 100 % = 89,86%	89,86%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA JAMBI
		Pengawasan Inspektorat Kota	38	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2019	-	-	-
12	PENGELOLAAN POTENSI DAERAH	Peta potensi daerah	39	Rasio realisasi PAD 2019 terhadap potensi PAD	Jumlah realisasi PAD 2019 dibagi potensi PAD	- Realisasi PAD Tahun 2019, sebesar Rp. 393.429.595.383.99 - Potensi PAD pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp.	103,06%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN

					dengan potensi PAD X 100%	381.743.685.000.00 (Rp. 393.429.595.383.99 / Rp. 381.743.685.000.00) x 100% = 103,06%		DAN ASET DAERAH KOTA JAMBI
		Peningkatan PAD	40	Peningkatan PAD	Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100% (PAD 2019 - PAD 2018) : PAD 2018 X 100%	- Total PAD pada Tahun 2019 sebesar Rp. 393.429.595.383.99 - Total PAD pada Tahun 2018 sebesar Rp. 338.891.882.592.96 (Rp. 393.429.595.383.99 - Rp. 338.891.882.592.96) / Rp. 338.891.882.592.96 x 100% = 16.09 %	16.09 %	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA JAMBI
13	TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penghargaan	41	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2019.	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2019	1. TOP IT & TELCO Award 2019 2. Indonesia Innovation Award 2019 3. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Teraktif 4. Tokoh Nasional Peduli Lansia 5. Tanda Jasa Bakti Koperasi dan UKM 6. Kota Layak Anak Tahun 2019 Kategori Madya 7. Indonesia's Attractiveness Award (IAA) Kota Terbaik Sektor Pelayanan Publik Peringkat Platinum 8. TOP Eksekutif Muslim 2019 9. Tanda Kehormatan Bintang Jasa Pratama 10. Piagam Penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan 11. Penghargaan Nasional Pembina Olahraga Berprestasi 12. Wahana Tata Nugraha 13. Penghargaan Menteri Keuangan RI Atas Opini WTP Pemkot Jambi 14. APKLI Award 2019 15. Natamukti 16. Terbaik I Kategori Dana Sharing Terbaik Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi dalam Program Keluarga Harapan 17. Penghargaan Kehormatan Bintang Astha Hannas 18. TOP 25 Leaders Seven Media Asia Award 2019, Kategori TOP Leader and Best Performance 19. Penghargaan The Best Leader 2019 DataGovAI 2019 20. Penghargaan Best Data IT Center dan The Best Data Infrastructure DataGovAI 21. Penghargaan Sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2019 dengan Kategori Sangat Baik 22. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jambi Award 2019 23. Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional Tahun 2019 24. Penghargaan Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) 2019 untuk Kategori Kota Sedang 25. Penghargaan Swasti Saba Wiwerda 26. Penghargaan Top Digital Awards 2019 27. Penghargaan Wali Kota Entrepreneur Award 2019 28. Penghargaan Pemerintah Kota dengan Predikat Terbaik Capaian Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Secara Nasional Tahun 2019 29. Penghargaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia 30. Penghargaan Capaian Maturitas SPIP dan Kapabilitas SPIP	30 Penghargaan	Bagian Humas
		Pengadaan barang dan jasa	42	Keberadaan E-procurement	Ada/Tidak	ADA Penerapan E-procurement mulai operasi pada bulan Juni tahun 2012	Ada	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan

							Administrasi Pembangunan
		Daya saing daerah	43	Jumlah persetujuan investasi	Jumlah ijin investasi dalam tahun 2019	- Persetujuan izin investasi pada Tahun 2019, sebanyak 45 izin.	45 izin - Bulan Oktober s/d Desember belum bisa terdata dari BKPM Pusat karena belum dapat diakses.

IKK II.2 1 URUSAN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Kesehatan
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KESEHATAN

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	1 Program	-
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	-	-	-
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Keberadaan Peraturan(Perda/Perkada)yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Perda Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017	Ada	-
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) 23 Orang - jumlah jabatan yang ada 23 Orang	100%	-
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah		Ada	-
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	- PNS Dinas Kesehatan 93 Orang - Total PNS Kota Jambi 6213 Orang	1,49%	-
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan 11 Orang - jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada 23 Orang	47%	-
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan 23 Orang - Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada 23 Orang	100%	-

5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada	-
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMDx100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Dinas Kesehatan sebanyak 8 Program - Jumlah Program dalam RENJA Dinas Kesehatan yang ditetapkan pada RPJMD sebanyak 8 Program	100%	-
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Renja Dinas Kesehatan yang diakomodir dalam RKA Dinas Kesehatan sebanyak 8 Program - Jumlah program dalam RKA Dinas Kesehatan 8 Program	100%	-
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerahx100%	- Jumlah Program RKA Dinas Kesehatan yang diakomodir dalam DPA Dinas Kesehatan sebanyak 8 program - Jumlah program dalam DPA Dinas Kesehatan sebanyak 8 program	100%	-
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Alokasi anggaran Perangkat Daerah sebesar Rp. 184.391.747.360 Total APBD sebesar Rp. 1.846.258.216.875	0,0998%	-
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Dinkes sebesar Rp. 165.988.369.202 - total Realisasi Belanja APBD sebesar Rp. 1.661.380.787.461	9,99%	-
			15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	Total Belanja Langsung Dinkes sebesar Rp. 76.523.728.752,13 Total belanja Dinkes Rp. 165.988.369.202,13	46,1%	-
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Total Belanja Tidak Langsung Dinkes sebesar Rp. 89.464.640.450 Total belanja Dinkes sebesar Rp. 165.988.369.202,13	53%	-
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada	-
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	-	-	-
		Penggunaan Asset Perangkat	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh	Jumlah asset yang tidak	- Jumlah asset yang tidak	3%	-

		Daerah		Perangkat Daerah	digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	digunakan Perangkat Daerah Rp. 4.909.955.619 - total asset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp. 155.230.306.863		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	-	-	-
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	-	-	-

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Lingkungan Hidup
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : LINGKUNGAN HIDUP

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program penurunan beban pencemaran Anggaran Rp. 2.027.579.866,00 Realisasi Rp. 1.970.029.425,00 2. Program peningkatan pengelolaan lingkungan, RTH, ruang publik dan keanekaragaman hayati Anggaran Rp. 10.139.473.850,00 Realisasi Rp. 9.877.206.782,00 3. Program peningkatan pengendalian kerusakan lingkungan dan pengelolaan persampahan Anggaran Rp. 33.187.591.300,00 Realisasi Rp. 28.930.553.019,00	3 Program	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada 12 Dokumen SOP 1. SOP Penerimaan dan pemeriksaan permohonan izin lingkungan UKL- UPL secara administratif 2. SOP Penerimaan dan pemeriksaan permohonan izin lingkungan UKL- UPL secara substantif 3. SOP Pemeriksaan Formulir kerangka acuan 4. SOP Penerimaan dan penilaian permohonan izin lingkungan ANDAL Dan RKL-RPL secara administratif 5. SOP Penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan ANDAL dan RKL- RPL 6. SOP Pengisian dan verifikasi serta pendaftaran surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL) 7. SOP Pembayaran retribusi kebersihan / persampahan 8. SOP Pembayaran retribusi masuk Hutan Kota M. Sabki 9. SOP Mekanisme pelayanan pengujian 10. SOP Pelayanan kepada pelanggan 11. SOP Prosedur Pelaksanaan 12. SOP Penilaian ANDAL dan RKL-RPL secara Teknis	Dokumen SOP 12 Berkas	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Keberadaan Peraturan(Perda/Perkada)yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada 1. Perda Tentang Pengelolaan Dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 2. Perda Tentang Konservasi Sumber Daya Air di Kota Jambi 3. Perda Tentang Pengelolaan Sampah 4. Perda Tentang Pembatasan Kantong Belanja Plastik	4 Perda	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jabatan Yang ada sebanyak 27 Jabatan yang harus ada, sebanyak 27	100%	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada 1. Jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup = 1 orang	Ada	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	- PNS Perangkat Daerah Kota sebanyak 82 personil - Total PNS Kota sebanyak 6.213 personil	1,31 %	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim 16 orang - Pejabat yang ada sebanyak 27 orang	59,25%	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 27 orang Pejabat yang ada sebanyak 27 orang	100%	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada , Dokumen yang dimaksud, sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMDx100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah sebanyak 9 program. - Jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD sebanyak 9 Program.	100%	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah 9 Program - Jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah 9 Program	100%	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerahx100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah sebanyak 9 program - Jumlah program	100%	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

						dalam DPA Perangkat Daerah sebanyak 9 program		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total anggaran DLH = 58.468.881.540,00 Total belanja APBD, sebesar = 1.846.258.216.875	3,16%	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja DLH = Rp. 52.655.517.517,00 Total Realisasi Belanja Langsung APBD = Rp. 1.661.380.787.461	3,16%	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
			15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi belanja langsung DLH sebesar Rp. 44.784.296.852,00 - Total realisasi belanja DLH Rp. 52.655.517.517,00	85,05%	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah, sebesar Belanja Langsung Rp. 7.871.220.665,00 Total realisasi belanja perangkatat daerah, sebesar Rp. 52.655.517.517,00	14,94%	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	ADA Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb : 1. LRA 2. Neraca 3. Calk	Ada sebanyak 3 jenis	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	ADA KIB A, Tanah KIB B, Peralatan dan Mesin KIB C, Gedung dan Bangunan KIB D, Jalan, Irigasi dan Jaringan KIB E, Aset tetap lainnya KIB F, Konstruksi dalam pengerjaan	Ada sebanyak 6 jenis	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Jumlah asset yang tidak digunakan DLH sebesar Rp. 3.749.144.040 - Total asset yang dikuasai DLH Kota Jambi sebesar Rp. 55.721.351.676	7%	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	6 buah leaflet, 1 pos pengaduan, 4 buah papan pengumuman, 3 pengumuman di mass media	14 item fasilitas	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	ADA	Tidak ada	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Pendidikan
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PENDIDIKAN

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	- Jumlah program yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 1 program - Program Peningkatan Akses, Mutu dan Tata Kelola Pendidikan	1 Program	sumber data dari dinas pendidikan
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	- SOP Dinas Pendidikan Kota Jambi : 1. SOP tentang Sub. Bag. Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi 2. SOP tentang Sub. Bag. Umum, Kepegawaian dan PTP 3. SOP tentang Sub. Bag. Keuangan dan Barang Milik Daerah 4. SOP tentang Pembinaan PAUD dan PNF 5. SOP tentang Pembinaan SD 6. SOP tentang Pembinaan SMP 7. SOP tentang Pembinaan dan Ketenagaan	7	Sumber Data Dinas Pendidikan Kota Jambi
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Keberadaan Peraturan(Perda/Perkada)yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	-	Tidak Ada	-
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah Jabatan yang ada (diisi) = 21 Jumlah Jabatan yang harus ada = 21	100 %	Sumber Data Dinas Pendidikan Kota Jambi
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	- Ada 2 jabatan Fungsional : 1. Pengawas = 34 orang 2. Guru Pamong dan Penilik = 24 orang 3. Arsipan = Tidak ada 4. Pranata Komputer = tidak ada 5. Laboran = tidak ada	Ada	Sumber Data Dinas Pendidikan Kota Jambi
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS Dinas Pendidikan Kota Jambi = 2678 orang Jumlah PNS Kota Jambi = 6213 orang	0,43	Sumber Data Dinas Pendidikan Kota Jambi

			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Diklatpim = 8 orang Jumlah Pejabat yang ada = 21 org	38 %	Sumber Data Dinas Pendidikan Kota Jambi
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepengkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepengkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi syarat kepengkatan = 21 orang Pejabat yang ada = 21 orang	100 %	Sumber Data Dinas Pendidikan Kota Jambi
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	- Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah : 1. Renstra 2018-2023 2. Renja 2019 3. RKA 2019	3 Dokumen	Sumber Data Dinas Pendidikan Kota Jambi
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMDx100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah sebanyak 8 program - Jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD sebanyak 8 program	100%	Sumber Data Dinas Pendidikan Kota Jambi
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah = 8 program Jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah = 8 Program	100%	Sumber Data Dinas Pendidikan Kota Jambi
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerahx100%	- Jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah = 8 Program - jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah = 8 Program	100 %	Sumber Data Dinas Pendidikan Kota Jambi
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah = Rp. 509.878.705.168,00,- - Total Belanja APBD = Rp. 1.846.258.216.875,-	27,61 %	Sumber Data Dinas Pendidikan Kota Jambi
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah = Rp. 440.000.547.997.80,- - Total Realisasi Belanja APBD = Rp. 1.661.380.787.461,-	26,48%	Sumber Data Dinas Pendidikan Kota Jambi
			15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung = Rp. 121.233.219.826,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah = Rp. 440.000.547.997.80,-	27,55 %	Sumber Data Dinas Pendidikan Kota Jambi
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung = Rp. 318.767.328.171,- - Realisasi Belanja Perangkat Daerah = Rp. 440.000.547.997.80,-	72,44 %	Sumber Data Dinas Pendidikan Kota Jambi

		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	-	-	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	-	-	-
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah Rp. 0 - total asset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp. 713.811.872.427,82	0%	-
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi : - Papan Pengumuman - Anjungan Informasi - Billboard	3 Jenis	Sumber Data Dinas Pendidikan Kota Jambi
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Survey Kepuasan tentang Pelayanan	Ada	Sumber Data Dinas Pendidikan Kota Jambi

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Perhubungan
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PERHUBUNGAN

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Anggaran Rp. 4.462.030.000,- Realisasi Rp. 4.331.649.537,- 2. Program Peningkatan Pengelolaan dan Keselamatan Perhubungan Anggaran Rp. 5.343.890.000,- Realisasi Rp. 5.241.277.022,90 3. Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran Anggaran Rp. 2.390.714.000,- Realisasi Rp. 2.239.420.231,-	3 (Tiga) Program	Dinas Perhubungan
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, yang terdiri dari : 1. SOP Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 2. SOP Layanan Lalulintas & Angkutan 3. SOP Pelayanan Perparkiran	3 (Tiga) SOP	Dinas Perhubungan
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Keberadaan Peraturan(Perda/Perkada)yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada, yang terdiri dari : 1. Perda No.4 Th.2017 tentang Penyelenggaraan Lalin & Angkutan Jalan di Kota Jambi 2. Perda No.11 Th.2017 tentang Retribusi Jasa Usaha 3. Perda No.12 Th.2017 tentang Retribusi Jasa Umum 4. Perda No.13 Th.2017 tentang Retribusi Perincian Tertentu 5. Perwal No.20 Th.2017 tentang Penyelenggaraan Penderekan 6. Perwal No.32 Th.2018 tentang Retribusi Parkir 7. Perwal No.78 Th.2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Rincian Tugas dan Tata Kerja UPT. Sapras 8. Perwal No.79 Th.2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Rincian Tugas dan Tata Kerja UPT. PKB 9. Perwal No.46	Ada	Dinas Perhubungan

						Th.2016 tentang Tupoksi Tata Kerja Dishub		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jumlah Jabatan yang ada sebanyak 20 Orang - Jumlah Jabatan yang harus ada sebanyak 20 Orang	100%	Dinas Perhubungan
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada, yaitu : 1. Fungsional Arsiparis 2. Fungsional Pengujian Kendaraan Bermotor	Ada	Dinas Perhubungan
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	- ASN Perangkat Daerah sebanyak 102 personel - Total ASN Kota Jambi 6213 personel	1,64%	Dinas Perhubungan
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah Mengikuti Diklatpim sebanyak 11 orang - Total pejabat yang ada sebanyak 20 orang	55%	Dinas Perhubungan
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 20 orang - Pejabat yang ada sebanyak 20 orang	100%	Dinas Perhubungan
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada, yaitu : Renstra, Renja, RKA (DPA)	Ada	Dinas Perhubungan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMDx100%	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah sebanyak 9 Program jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD 9 Program	100%	Dinas Perhubungan
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah sebanyak 9 Program - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah sebanyak 9 Program	100%	Dinas Perhubungan
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerahx100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah sebanyak 9 Program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah sebanyak 9 Program	100%	Dinas Perhubungan
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah sebesar Rp.	1,47%	Dinas Perhubungan

					27.264.001.685,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.846.258.216.875,-			
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 25.504.272.474,90 - Total Realisasi Belanja APBD sebesar Rp. 1.661.380.787.461	1,5%	Dinas Perhubungan
			15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 16.289.757.886,90,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp. 25.504.272.474,90	63,87%	Dinas Perhubungan
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 9.214.514.588,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 25.504.272.474,90	36,12%	Dinas Perhubungan
			Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan Keuangan ada yaitu : NERACA, LRA, LO, CaLK	Ada sebanyak 4 Jenis Laporan
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, yaitu Berita Acara Rekonsiliasi Asset	Ada	Dinas Perhubungan
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan sebesar Rp. 41.729.066.200,01,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah sebesar Rp. 79.798.123.963,97	52%	Dinas Perhubungan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Fasilitas prasarana informasi terdiri dari : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan (WA Pengaduan) 3. Leaflet 4. Mobil Keliling 5. Pengumuman di Media Massa 6. Website 7. Instagram 8. Facebook 9. Bilboard 10. Banner	Jumlah sebanyak 10 jenis	Dinas Perhubungan
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada yaitu Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Ada	Dinas Perhubungan

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Sosial
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : SOSIAL

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program Bantuan Pangan Non Tunai Program Keluarga Harapan	2 Program	Sharing Dana DPA
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	SOP Rekomendasi BPJS SOP Pelayanan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam SOP Rekomendasi Surat Terhadap Orang Terlantar SOP Pengkangkatan Anak SOP Pendaftaran LKS SOP Prosedur Penerbitan Izin Pengumpulan Uang/Sumbangan	Ada	Sumber Data dari Bidang Linjamsos, Rehsos, Dayasos dan Penanganan Fakir Miskin
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Keberadaan Peraturan(Perda/Perkada)yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Perda No 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Perda No 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila Perda No 44 Tahun 2002 Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan Sosial	Ada	Sumber Data dari Bidang Rehsos dan Dayasos
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) 20 - Jumlah jabatan yang ada 21	95,24 % (20/21 x 100 %)	Sumber Data dari Bagian Kepegawaian
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada Jabatan Fungsional Umum	Ada	Sumber Data Dari DUK Bagian Kepegawaian
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS Dinsos 34 Orang Total PNS Kota Jambi 6.213 orang	0,54 % (34/6.213x 100 %)	Sumber Data Dari DUK Bagian Kepegawaian
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total	-Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan 17 Orang Pejabat yang ada sebanyak 21 Orang	80% (17/21 x 100 %)	Sumber Data Dari DUK Bagian Kepegawaian

					pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%			
				8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	-Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan 20 orang - Pejabat Perangkat Daerah yang ada 21 orang	Sumber Data Dari DUK Bagian Kepegawaian
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada sebanyak 3 Jenis Dokumen yang terdiri dari RENSTRA Dinsos, RENJA Dinsos dan RKA Dinsos	Ada, 3 Dokumen	Sumber Data dari bagian Umum dan Perencanaan Dinas Sosial Kota Jambi
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMDx100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah sebanyak 8 Program - Jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD sebanyak 8 Program	100%	Sumber Data mengacu pada Data Perencanaan Dinas Sosial Kota Jambi Terakhir atau data yang berasal dari Bappeda
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah sebanyak 8 Program - Jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah sebanyak 8 Program	100%	Sumber Data mengacu pada Dokumen RKA Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2019 dan Renja Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2019
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerahx100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah sebanyak 8 Program - Jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah sebanyak 8 Program	100 %	Sumber Data mengacu pada Dokumen RKA Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2019 dan DPA Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2019
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	-Alokasi Anggaran Dinsos Rp. 9.586.957.344,- dibagi total APBD Rp. 1.846.258.216.875 x 100%	0,51 %	Sumber Data dari Bagian Keuangan
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	-Realisasi Belanja Dinas Sosial Rp. 8.372.818.362 ,- terhadap total Realisasi Belanja APBD Rp. 1.661.380.787.461x 100%	0,50%	-
			15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Total Belanja Langsung Rp. 5.256.900.000 - Total belanja Perangkat Daerah Rp. 8.372.818.362	62,7 %	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	-Total Belanja Tidak Langsung Rp. 3.448.572.184 -Total Belanja PD Rp. 8.372.818.362	41,18 %	Total Belanja Tidak Langsung dari total Belanja Perangkat Daerah
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	-Ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	100%	Laporan keuangan Perangkat Daerah

7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	-Laporan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	ada	-Manajemen Aset Perangkat Daerah
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah Rp. 957.113.850,90 - Total Aset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp. 8.323.245.040,90	11%	-Penggunaan Asset Perangkat Daerah
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Fasilitas / prasarana informasi yang digunakan : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Mass Media 5. Pengumuman di Medsos (IG,FB), 6. Media Elektronik 7. WEB Dinsos	100%	-Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada	Ada	Ada

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)		-jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 1 program, Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD sebanyak 1 program	-Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada 11 SOP : 1. SOP pelayanan KTP el, 2. SOP Pelayanan KK, 3. SOP Pelayanan Pindah Datang, 4. SOP Penerbitan NIK, 5. SOP Pelayanan KIA, 6. SOP Pengaduan, 7. Sop Pelayanan Akta Kelahiran, 8. SOP Pelayanan Akta Kematian, 9. SOP pengakuan dan pengesahan anak, 10. SOP Perekaman data penduduk, 11. SOP perubahan akta pencatatan sipil bagi WNI	11 SOP Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SOP PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Keberadaan Peraturan(Perda/Perkada)yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan	Ada	-Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada (yang diisi) 34 Orang - Jumlah jabatan yang ada 37 Orang	91%	Jumlah Jabatan Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	tidak ada	Dinas DUKcapil Kota Jambi
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS Dukcpil 52 Orang Total PNS Kota Jambi 6.213 orang	0.83%	Ratio PNS Dukcapil terhadap Jumlah PNS Kota Jambi
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total	- Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan 19 Orang - Total	51.35%	-Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait

					pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	pejabat Perangkat Daerah yang ada 37 Orang		
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	-Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan 34 orang - total pejabat Perangkat Daerah yang ada 37 orang	91%	-Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	-Renstra 2018-2023 - Renja PD 2019 RKA PD 2019	100%	- Dokumen Perencanaan Dinas Dukcapil Kota Jambi
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMDx100%	-8 Program pada RKPD - 8 Program pada Renja	100 %	Program PD Tahun2019 sebanyak 7 Program Rutin dan 1 Program Urusan
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	8 Program Renja - 8 Program Pada RKA	100 %	Program PD daam Renja PD dan RKA PD
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerahx100%	- 8 Program Renja - 8 Program Pada DPA	100%	-Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah 8 Program
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	-Alokasi anggaran Perangkat Daerah Rp. 11.971.870.548,- dibagi total APBD Rp. 1.846.258.216.875 x 100%	0.64 %	-Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp. 11.233.973.677,- - Total Realisasi Belanja APBD Rp. 1.661.380.787.461,-	0,67%	-Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD
			15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- belanja langsung Rp. 5.934.873.124 - total belanja Perangkat Daerah Rp.11.233.973.677	52%	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Total Belanja Tldak Langsung Rp. 5.299.100.553 - Total belanja PD Rp.11.233.973.677	47,17%	total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	-Ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	100%	Laporan keuangan Perangkat Daerah

7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	-Laporan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	ada	-Manajemen asset Perangkat Daerah
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah Rp. 299.581.668 - Total asset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp. 10.534.450.033	2,84%	-Penggunaan Asset Perangkat Daerah
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	fasilitas / prasarana informasi yang digunakan : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Mass Media 5. Pengumuman di Medsos (IG,FB), 6. Media Elektronik 7. WEB Disdukcapil	100%	-Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	-Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik Administrasi Kependudukan	85.63 (BAIK)	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	-	0 Program	Tidak ada
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Sebanyak 10 SOP Terdiri dari : 1. SOP Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 2. SOP Tentang Pelayanan Pendaftaran Nama domain dan Sub domain 3. SOP Tentang Akses masuk ruangan server data center 4. SOP Tentang CO Location/Penitipan server dan hosting web Aplikasi 5. SOP Tentang Pemasangan jaringan baru fiber optik 6. SOP Tentang Pemeliharaan jaringan intranet dan internet 7. SOP Tentang Integrasi data 8. SOP Tentang Pengembangan Aplikasi 9. SOP Tentang aplikasi Sisumaker (Surat Masuk) 10. SOP Tentang Aplikasi Sisumaker (Surat Keluar)	10 SOP	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Keberadaan Peraturan(Perda/Perkada)yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	-	Tidak ada	Sumber data dibagian hukum
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada (di isi) sebanyak 20 - Jabatan yang harus ada sebanyak 21	95%	- DUK 2019
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	-	Tidak ada	Sumber data BKD/Perangkat Daerah. Mengacu kondisi perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	- PNS Perangkat Daerah, sebanyak 26 Personel - Total PNS Kota Sebanyak 6213 personel	0,41%	Sumber data mengacu pada data DUK Perangkat Daerah terakhir atau data yang berasal dari BKD

		yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim sebanyak 8 orang - Pejabat yang ada sebanyak 21 Orang	38%	Sumber data mengacu pada data DUK Perangkat Daerah terakhir atau data yang berasal dari BKD
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan sebanyak 20 Orang - Pejabat yang ada sebanyak 21 Orang	95%	-
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Kebudayaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	- Renstra - Renja - RKA	Jenis Dokumen	-
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMDx100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah sebanyak 7 Program - Jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD sebanyak 7 Program	100%	Sumber data mengacu pada data perencanaan perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari Bappeda
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah sebanyak 7 Program - Jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah sebanyak 7 Program	100%	Sumber data perangkat daerah mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2019 dan Renja - Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerahx100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah sebanyak 7 Program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 Program	100%	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA-perangkat daerah yang bersangkutan Tahun 2019
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp. 9.588.229.195,- - Total Belanja APBD Sebesar Rp. 1.846.258.216.875,-	0,51%	Sumber data dari APBD Tahun 2019 terakhir. (Anggaran)
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 8.579.531.603,- - Total Realisasi Belanja APBD, Sebesar Rp. 1.661.380.787.461,-	0,51%	Sumber data dari realisasi APBD Tahun 2019
			15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah sebesar Rp. 5.504.061.683,- - Total Belanja Perangkat Daerah Rp. 8.579.531.603,-	64,15%	Sumber data dari realisasi APBD Tahun 2019

			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah sebesar Rp. 3.075.469.920,- - total belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 8.579.531.603,-	35,84%	Sumber data dari realisasi APBD Tahun 2019
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	- Neraca - LRA - CALK - LO - LPE	1 Jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah.
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	- Kartu Inventaris Barang (KIB) - Kertas Kerja Penyusutan Barang (KKP KIB) - Laporan Rekonsiliasi Belanja Modal - Kartu Inventaris Ruang (KIR) - Penggolongan dan Kodefikasi Barang	5	-
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan sebesar Rp. 2.597.710.499,00 - Asset yang dikuasai Perangkat daerah sebesar Rp. 9.113.195.270,13	29%	-
8	PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	- Website - Sikesal - Leaflet - ILM - You Tube Channel - Pameran	6 jenis	-
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	-	Tidak ada	-

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Pemuda dan Olahraga
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program Pembinaan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga Dan Kepemudaan	1 program	Sumber Data Dari Dispora Kota Jambi
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	- jumlah SOP yang ada Di Dinas Pemuda dan Olahraga Sebanyak 16 SOP : - SOP administrasi Pengelolaan barang milik daerah - SOP pemrosesan surat keluar - SOP Pemberian surat cuti - SOP rekap daftar hadir - SOP penyusunan Rencana Kerja (Renja)OPD - SOP penyusunan rencana strategis (Renstra) OPD - SOP prioritas pagu anggaran sementara (PPAS dan PPAS-P) OPD - SOP penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) - SOP penyusunan laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) - SOP kegiatan bidang Olahraga - SOP Pelaksanaan Kegiatan JPI - SOP Seleksi Dan Pembinaan Paskibraka - SOP Pelaksanaan Kegiatnan Pembinaan Organisasi dan Kegiatan Sumpah Pemuda - SOP Pelaksanaan Kegiatan Jasa Kontruksi Perencanaan Rehab Bangunan - SOP Pelaksanaan Kegiatan Jasa Konsultasi Perencanaan Bangunan Baru - SOP Penyusunan Database Kepemudaan dan Keolahragaan	16 SOP	Sumber Data Dari Dispora Kota Jambi
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Keberadaan Peraturan(Perda/Perkada)yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Peraturan Daerah no 1 tahun 2017 tentang Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Di kota Jambi	Ada 1 PERDA	Sumber Data Dari Dispora Kota Jambi
3	PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan	Jumlah jabatan yang ada (yang	- jumlah jabatan ada (yang di isi)	100 %	Sumber Data DUK Dispora Kota Jambi

	DAERAH			eselonering yang terisi	diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	sebanyak 16 orang - jumlah jabatan yang ada sebanyak 16 orang		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	- Jabatan Fungsional Arsiparis	Ada	Sumber Data Dari DUK Dispora Kota Jambi
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	- Jumlah PNS SKPD Sebanyak 32 Orang - Julah Total PNS Kota Sebanyak 6213 Orang	0,52%	Sumber Data DUK Dispora Kota Jambi
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Jumlah Pejabat Yang Memenuhi Syarat Diklatpim Sebanyak 7 Orang - Jumlah Pejabat yang Ada Sebanyak 16 Orang	43,75%	Sumber Data DUK Dispora Kota Jambi
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Jumlah Pejabat Yang memenuhi Syarat Kepangkatan Sebanyak 16 Orang - Jumlah Pejabat Yang ada Sebanyak 16 Orang	100 %	Sumber Data Dari Dispora Kota Jambi
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	- RENSTRA - RENJA - RKA - DPA	4	Sumber Data Dari Dispora Kota Jambi
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMDx100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah Sebanyak 7 Program - jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD Sebanyak 7 Program	100 %	Sumber Data Dari Dispora Kota Jambi
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah Sebanyak 7 Program - program dalam RKA Perangkat Daerah Sebanyak 7 Program	100 %	Sumber Data Dari Dispora Kota Jambi
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerahx100%	- Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah Sebanyak 7 Program - Jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah Sebanyak 7 Program	100 %	RKA dan DPA 2.2 Dispora Kota Jambi
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran OPD Sebesar Rp. 10.950.194.718 - Total Belanja APBD Sebesar Rp. 1.846.258.216.875	0,59 %	Sumber Data Dari Dispora Kota Jambi
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Anggaran Dispora Sebesar Rp. 10.525.640.776 - Total Realisasi Belanja APBD Sebesar Rp. 1.661.380.787.461	0,63%	Sumber Data Dari Dispora Kota Jambi

			15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Total Belanja langsung DISPORA Sebesar Rp 7.490.257.032 - Total Belanja Dispora Rp 10.525.640.776	71%	Sumber Data Dari Dispora Kota Jambi
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Total Belanja Tidak Langsung Dispora Sebesar Rp. 3.035.383.744 - Total Belanja Dispora Rp 10.525.640.776	28%	Sumber Data Dari Dispora Kota Jambi
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	- Neraca - LRA - CALK	Ada 3 Jenis Dokumen	Laporan Keuangan Dispora Kota Jambi
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada - Rekap Belanja Modal ASET - KIB A - KIB B - KIB C -KIB D - KIB E - KIB F dan - Daftar Mutasi Barang	Ada	Sumber Data Dari Dispora Kota Jambi
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Jumlah Aset yang tidak digunakan Rp. 466.032.250,00 - Jumlah Total Aset yang dikuasai Rp. 8.668.172.902,72	5%	Sumber Data Dari Dispora Kota Jambi
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	- Papan Pengumuman 4 buah - Pengumuman dimedia Masa (IG: disporakotajambi)	5 Jenis	Sumber Data Dari Dispora Kota Jambi
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	- Belum Pernah Melaksanakan Surpei Kepuasan Masyarakat	Tidak Ada	Sumber Data Dari Dispora Kota Jambi

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PENANAMAN MODAL

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	- Program Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Pelayanan Publik Nilai anggaran Rp. 785.760.000,- Realisasi Rp. 718.142.200,- - Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Nilai Anggaran Rp. 269.955.500,- Realisasi Rp. 247.970.000,-	2 Program	-
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, yaitu : - SOP tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan pada BPMPTSP Kota Jambi Perwal Nomor 39 Tahun 2015	1	-
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Keberadaan Peraturan(Perda/Perkada)yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	- Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan	- Ada	- sumber data bagian hukum
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 21 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 21	100%	- sumber data DUK DPMPTSP
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada	Tidak Ada	-
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	- Jumlah PNS DPMPTSP sebanyak 36 personel - Total PNS Kota Jambi sebanyak 6213 personel	0,5%	- sumber data DUK dan BKD
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim 8 orang - Pejabat yang ada sebanyak 21 orang	38%	- sumber data dari DUK

			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 21 orang - Pejabat yang ada sebanyak 21 orang	100%	- sumber data DUK DPMPSTSP
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	- RENSTRA - RENJA - RKA	Ada, 3 Dokumen	-
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMDx100%	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 9 Program - Jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD 9 Program	100%	- sumber data mengacu pada data perencanaan
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA yang diakomodir dalam RKA sebanyak 9 Program - Program dalam RKA sebanyak 9 Program	100%	- sumber data RKA dan RENJA
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerahx100%	- Jumlah program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 9 program - Jumlah program dalam DPA sebanyak 9 program	100%	- sumber data dari dokumen RKA 2019 dan DPA 2019
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran sebesar Rp. 8.342.250.972 - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.846.258.216.875,-	0,45%	- sumber data dari APBD tahun 2019
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja sebesar Rp. 7.577.162.954,- - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. 1.661.380.787.461	0,45%	- sumber data APBD
			15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung, sebesar Rp. 3.619.977.353,- - Total Realisasi Belanja sebesar Rp. 7.577.162.954,-	47,77%	- sumber data APBD
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung, sebesar Rp. 3.957.185.601,- - Total Realisasi Belanja, sebesar Rp. 7.577.162.954,-	52,22%	- sumber data dari APBD 2019
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan Keuangan Ada, sebanyak 3 jenis sebagai berikut : - Neraca - LRA - Calk	- Ada, sebanyak 3 jenis	- Sumber data dari Laporan Keuangan DPMPSTSP
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	Manajemen asset Perangkat	18	Keberadaan inventarisasi barang	Ada atau tidak ada inventarisasi	Ada - KIB Inventarisasi - Rekap	- Ada	- sumber data dari BPKAD

	DAERAH	Daerah		atau asset Perangkat Daerah	barang atau asset Perangkat Daerah	Inventarisasi - Berita Acara Inventaris		
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah Rp. 228.321.001 - total asset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp. 16.642.989.837	1%	-
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	- Pos Pengaduan - Leaflet - Pengumuman di Media Massa	- 3 jenis	-
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	- Ada, survey kepuasan tentang Pelayanan Perizinan	- Ada	- sumber data responden/masyarakat yang berurusan di DPMPSTSP

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1 Program PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	1 Program	Sumber Data dari DPPKB
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	SOP Bidang Penyuluhan Penggerakan SOP Bidang Keluarga Berencana SOP Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga SOP Bidang Pengendalian Penduduk	Ada	-SOP DPPKB
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Keberadaan Peraturan(Perda/Perkada)yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Tidak adaPerda	Tidak ada Perda	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	(a) Jumlah Jabatan yang ada (yang di isi) 21 (b) Jumlah Jabatan yang ada 21	100%	Sumber data dari DPPKB
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	1 Pejabat Fungsional	Ada	-
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	(a) Jumlah PNS di DPPKB ada 34 Orang (b) jumlah total PNS di kota Jambi 6213 orang	0,54%	Sumber data dari DPPKB
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	(a) Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan 13 Orang (b) jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada 21 orang	61%	Sumber data dari DPPKB
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	(a) Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan 21 Orang (b) jumlah	100 %	Sumber data dari DPPKB

						total pejabat Perangkat Daerah yang ada 21 orang		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	RENTRA, RENJA, dan RKA	ada	Sumber data dari DPPKB
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMDx100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah Sebanyak 8 Program - Jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD Sebanyak 8 Program	100%	Sumber data dari DPPKB
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	(a) Jumlah program renja 8 Program (b) jumlah RKA ada 8 Program	100%	Sumber data dari DPPKB
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerahx100%	(a) Jumlah program RKA 8 Program (b) jumlah DPA ada 8 Program	100%	Sumber data dari DPPKB
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Alokasi Anggaran Perangkat Daerah Rp. 11.517.135.007 - Total APBD Rp 1.846.258.216.875	0,62%	-
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp. 10.403.694.755 - Total Realisasi Belanja APBD Rp. 1.661.380.787.461	0,62%	-
			15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	(a) Jumlah Belanja Langsung Rp. 7.184.930.702 (b) Jumlah Total Belanja perangkat Daerah Rp. 10.403.694.755	69%	-
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	(a) Jumlah Belanja tidak langsung Rp 3.218.764.053 (b) Jumlah Total Belanja Perangkat Daerah Rp. 10.403.694.755	30,93%	Sumber data dari DPPKB
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	LRA Neraca CALK	Ada	-
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Rekap Aset KIB A Rekap Aset KIB B Rekap Penyusutan KIB B Rekap Aset KIB C Rekap Penyusutan Aset KIB C Rekap	Ada	Ada

						Aset KIB D Amortisasi Aset Lainnya Rekap Aset Lainnya		
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	(a) Jumlah aset yang tidak digunakan Rp. 343.477.900 (b) jumlah asset yang dikuasai Rp. 10.393.872.958	3%	Sumber data dari DPPKB
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Papan Pengumuman Kotak Saran Leaflet MobilKeliling Sosial Media	5	Ada
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada Survey Kepuasan Masyarakat	-

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2. Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Fasilitasi bagi Orkemas dan Parpol	2 Program : 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2. Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Fasilitasi bagi Orkemas dan Parpol	1. RKA. Badan Kesbangpol. 2. Renja Badan Kesbangpol. 3. DPA Badan Kesbangpol
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	1. SOP tentang Izin Pendirian Rumah Ibadah 2. SOP tentang Keberatan/Konflik Rumah Ibadah	2 jumlah : 1. SOP tentang Izin Pendirian Rumah Ibadah 2. SOP tentang Keberatan/Konflik Rumah Ibadah	Sumber data dari Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Ketahanan Kemasyarakatan dan Ekonomi Badan Kesbangpol
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Keberadaan Peraturan(Perda/Perkada)yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	1. Perda Kota Jambi No. 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Jambi No 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi 2. Perda Kota Jambi No 2 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalagunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.	Ada, 2 Perda : 1. Perda Kota Jambi No. 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Jambi No 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi 2. Perda Kota Jambi No 2 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalagunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.	Sumber Data dari Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Ketahanan Kemasyarakatan dan Ekonomi Badan Kesbangpol
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) di Badan Kesbangpol sebanyak 13 - Jabatan yang harus ada sebanyak 14	92%	Data DUK Bagian Kepegawaian Badan Kesbangpol Kota Jambi
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	- Jabatan fungsional tertentu Arsiparis Ahli Muda, - Jabatan fungsional umum	Ada ; - Jabatan fungsional tertentu Arsiparis Ahli Muda, - Jabatan fungsional umum	DUK. dan Peta Jabatan
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	- PNS Kesbangpol sebanyak 29 personel - Total PNS Kota sebanyak 6.213 personel	0,74%	Sumber Data Kasubag Kepegawaian Kesbangpol Kota Jambi : DUK, Simpeg online
			7	Pejabat yang telah memenuhi	Jumlah pejabat yang memenuhi	- Pejabat Badan Kesbangpol yang	64,28%	Sumber data dari Kasubag

					persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	telah mengikuti Diklatpim 9 orang - Pejabat yang ada sebanyak 14 orang		Kepegawaian Badan Kesbangpol Kota Jambi : DUK, Simpeg Online
				8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 13 orang - Pejabat yang ada sebanyak 14 orang	92%	DUK, Simpeg,
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	-Ada, sebanyak 3 jenis yang terdiri dari : 1. Renstra PD 2. Renja PD 3. RKA PD	-Ada, sebanyak 3 jenis yang terdiri dari : 1. Renstra PD 2. Renja PD 3. RKA PD		Sumber data dari Bagian Umum dan Bagian Keuangan Badan Kesbangpol Kota Jambi
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMDx100%	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah sebanyak 8 program - jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD 8 program	100%		Sumber data dari RKA.RKPD.
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Renja Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah sebanyak 8 Program - Program dalam RKA Perangkat Daerah sebanyak 8 Program	100%		Sumber data mengacu pada Dokumen RKA Badan Kesbangpol Tahun 2019 dan Renja Badan Kesbangpol tahun 2019
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerahx100%	- Jumlah Prgram RKA Badan Kesbangpol yang diakomodir di dalam DPA Badan Kesbanpol sebanyak 8 Program - Jumlah Program dalam DPA Badan Kesbangpol sebanyak 8 Program	100%		Sumber data mengacu pada dokumen RKA Badan Kesbangpol Tahun 2019 dan dokumen DPA Badan Kesbangpol Tahun 2019
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Jumlah Total Anggaran Badan Kesbangpol sebesar Rp. 5.316.755.457,- - Total Belanja APBD sebesar Rp. 1.846.258.216.875,-	0,29%		-Sumber data mengacu pada Laporan Keuangan Badan Kesbangpol Kota Jambi dan BPKAD Kota Jambi
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi belanja Badan Kesbangpol Kota Jambi sebesar Rp. 4.940.181.635,- - Total realisasi belanja APBD sebesar Rp. 1.661.380.787.461,-	0,29%		Data dari Kasubag Keuangan Badan Kesbangpol Kota Jambi dan BPKAD Kota Jambi
			15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi belanja langsung Badan Kesbangpol Kota Jambi sebesar Rp. 2.180.200.640,- - Total realisasi belanja Badan Kesbangpol Kota Jambi sebesar Rp. 4.940.181.635,-	44,13%		Sumber data dari Kasubag Keuangan Badan Kesbangpol Kota Jambi
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi belanja tidak langsung Badan Kesbangpol Kota Jambi sebesar Rp. 2.759.980.995,- -	55,87%		Data dari Kasubag Keuangan Badan Kesbangpol Kota Jambi

						Total realisasi belanja Badan Kesbangpol Kota Jambi sebesar Rp. 4.940.181.635,-		
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan Keuangan sebanyak 3 jenis : 1. LRA 2. Neraca 3. CaLk	Ada ; sebanyak 3 jenis : 1. LRA 2. Neraca 3. CaLk	Data dari Bagian Keuangan Badan Kesbangpol Kota Jambi
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	- Jenis dokumen asset Badan Kesbangpol Kota Jambi 1. Laporan Rekon Belanja Modal Semester II dan BA Rekon Belanja Modal Semester II 2. Laporan Aset B.I dan B.II 3. Laporan Mutasi Barang All, Intra Extra 4. Laporan KIB (A,B,C,D,E) All, Intra, Extra	Ada ; - Jenis dokumen asset Badan Kesbangpol Kota Jambi 1. Laporan Rekon Belanja Modal Semester II dan BA Rekon Belanja Modal Semester II 2. Laporan Aset B.I dan B.II 3. Laporan Mutasi Barang All, Intra Extra 4. Laporan KIB (A,B,C,D,E) All, Intra, Extra	Data dari Pengurus Barang Pengguna Badan Kesbangpol Kota Jambi
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Jumlah asset yang tidak digunakan sebesar Rp. 110.273.400,- - Asset yang dikuasai Badan Kesbangpol Kota Jambi sebesar Rp. 7.314.176.413,-	2%	Data dari Pengurus Barang Pengguna Badan Kesbangpol Kota Jambi
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana partisipasi ada 3 jenis : 1. Papan Pengumuman 2. Leaflet	2 jenis ; 1. Papan Pengumuman 2. Leaflet	Data dari Bagian Umum Badan Kesbangpol Kota Jambi
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Survey kepuasan tentang pelayanan Badan Kesbangpol Kota Jambi terhadap pelayanan Perizinan dalam Pengurusan Izin mendirikan Rumah Ibadah, dan Pengurusan Izin untuk mendapatkan Surat Tanda Terdaftar Ormas	Ada, Kotak saran	Data dari Bagian Umum Badan Kesbangpol Kota Jambi

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : RSUD H.Abdul Manap
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KESEHATAN

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	program Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	1 program	DPA 2019 RSUD H.ABDUL MANAP
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	1. SOP Keperawatan 2. SOP Pelayanan 3. SOP Penunjang 4. SOP Administrasi	Ada	SOP RSUD H. Abdul Manap
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Keberadaan Peraturan(Perda/Perkada)yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Perwal dan SK BLUD RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi	ada	sk dan perwal blud
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	1. jabatan yang ada sebanyak 14 2. jabatan yang harus ada sebanyak 14	100 %	DUK RSUD H. Abdul Manap
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada, Nama Bidang Jabatan / Jabatan Fungsional yaitu : 1. Dokter Spesialis 2. Dokter Umum 3. Dokter Gigi 4. Bidan 5. Perawat Gigi 6. Perawat 7. Penata Anaeshtesi 8. Pranata Lab. Kes 9. Sanitarian 10. Apoteker 11. Analis Labor 12. Penata Anastesi 13. Penata Rontgen 14. Analis Apoteker	Ada	DUK RSUD H. Abdul Manap
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	- PNS SKPD sebanyak 229 orang - Total PNS Kota sebanyak 6213 orang	3,68%	DUK RSUD H. Abdul Manap
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 9 orang - Pejabat yang ada sebanyak 14 orang	64,28%	Pejabat Mengikuti DIKLATPIM

			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah memenuhi syarat kepangkatan, sebanyak 14 orang - Pejabat yang ada, sebanyak 14 orang	100 %	DUK RSUD H. Abdul Manap
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	ada renja dan DPA	1 program	DPA dan RENJA 2019 RSUD H.ABDUL MANAP
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMDx100%	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah 7 program ; - Jumlah program RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD 7 program	100 %	DPPA RSUD H.Abdul Manap
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat daerah, sebanyak 7 program - program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program	100 %	RKA RSUD H. Abdul Manap
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerahx100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat daerah, sebanyak 7 program - Jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program	100 %	RKA RSUD H. Abdul Manap
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- total anggaran RSUD H. Abdul Manap : Rp. 128.323.611.179 - total APBD : Rp. 1.846.258.216.875	6,95%	Laporan Keuangan RSUD H.Abdul Manap
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah sebesar Rp.119.147.147.421 - Total Realisasi Belanja APBD Kota Rp 1.661.380.787.461,83	7,17 %	Laporan Keuangan RSUD H.Abdul Manap
			15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	Total Belanja Langsung Rp. 98.181.394.354 Total belanja Perangkat Daerah Rp.119.147.147.421	82%	Laporan Keuangan RSUD H. Abdul Manap
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah sebesar Rp.20.965.753.067 - Total Reasisasi Belanja Perangkat Daerah Rp.119.147.147.421	18 %	Laporan Keuangan RSUD H. Abdul Manap
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	- ADA, Laporan Keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb : 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 3. Neraca 4. Laporan Operasional	ada 5 Jenis	Laporan Keuangan RSUD H. Abdul Manap

						5. Catatan Atas Laporan Keuangan		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	ada Jenisnya KIB dan KIR	ada	Laporan Aset RSUD H.Abdul Manap
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 7.195.650.897 Asset yang dikuasai Perangkat Daerah Sebesar Rp. 356.711.822.516	2%	Laporan Aset RSUD H.Abdul Manap
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Fasilitas/ Prasarana Informasi etrdiri dari : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media 6. Instagram 7. Webside 8. Facebook	jumlah ada 8 jenis	Foto Fasilitas Sarana an Prasarana
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Survey tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit	Nilai IKM 79,53 %	Survey Kepuasan Masyarakat

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : RSUD ABDURRAHMAN SAYUTI
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KESEHATAN

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	-	-	-
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	SOP Rawat Inap SOP : Resusitas cairan SOP GIZI SOP : Penyelenggaraan Makanan Rumah SOP : Penetapan Peraturan Pemberian Makanan Rumah sakit SOP : Penyusunan Standar Bahan Makanan Rumah sakit SOP : Perencanaan Menu SOP : Perencanaan Kebutuhan Bahan Makanan SOP : Perencanaan Anggaran Bahan Makanan SOP : Pengadaan Bahan Makanan SOP : Distribusi (pengangkutan) Penyajian Makanan SOP : Distribusi (pengangkutan) Penyajian Makanan SOP : Pencucian Alat Makan Pasien SOP : Pengolahan Bahan Makanan SOP : Pengolahan Bahan Makanan SOP : Persiapan Bahan Makanan SOP : Hygiene Dan Sanitasi Makanan SOP : Penyimpanan Bahan Makanan Masak SOP : Pemesanan Dan Pembelian Bahan Makanan SOP : Penerimaan Bahan Makanan SOP : Penyimpanan Dan Penyaluran Bahan Makanan SOP : Penyimpanan Bahan Makanan Basah SOP : Penyimpanan Bahan Makanan Basah SOP : Pelayanan Gizi Rawat Inap SOP : Penyimpanan Bahan Makan Kering SOP : Pencatatan Dan Pelaporan SOP : Penyimpanan Bahan Makanan Masak SOP : Skrining Gizi SOP : Proses Ausahan Gizi Terstandar (PAGT) SOP : Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT) SOP :	Ada	SOP setiap unit di RSUD HAS

						Persiapan Bahan Makanan Pokok SOP : Persiapan Buah SOP : Persiapan Bumbu SOP : Persiapan Lauk SOP : Persiapan Sayuran SOP : Persiapan Sayuran SOP : Penyelenggaraan Makanan Rumah Sakit SOP : Rujukan Pasien Ke UPK Lain SOP : Resusitas Jantung Paru SOP : Serah Terima Pasien Pre Operasi SOP : SUCTION SOP : Terima Pasien Rujukan Dari RS Lain SOP : Prosedur Penerimaan Instruksi Dokter Secara Lisan SOP IGD SOP : MELAKUKAN DC SHOCK SOP Laundry SOP : Pencucian Linen SOP Pendaftaran SOP : Penerimaan Pengunjung Pasien SOP Rekam Medis SOP : Pengamanan Rekam Medis SOP SATPAM SOP : Pengaman / Penjaga Malam Kantor		
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Keberadaan Peraturan(Perda/Perkada)yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	1 Perwal No. 48 Tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pada unit Pelayanan Teknis Daerah RSUD H.Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi tgl 8 september 2018 2. Perwal No. 17 Tentang perubahan Kedua Atas Peraturan walikota jambi no.19 petunjuk teknis penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional daerah kota jambi melalui surat keterangan tidak mampu pada rumah sakit,puskesmas dan jaringannya tanggal 17 mei 2018 3.Perwal No.329 Tentang penetapan standar harga barang dan jasa pemerintah kota jambi tahun anggaran 2020 tanggal 5 September 2019 4.Perwal no.3 Tentang pedoman internal (Hospital BY Laws) Unit pelaksana teknis daerah RSUD H.abdurrahman Sayoeti Kota jambi tanggal 9 januari 2019	Ada	Perwal Kota Jambi
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi)4 Orang ; Jumlah jabatan yang ada 4 Orang	100%	DUK RSUD H.Abdurrahman Sayoeti
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Jabatan yang ada 1.Direktur rumah sakit 1 orang 2.Kasubag TU 1 orang 3.Kasi Pelayanan Medis 1 orang 4.Kasi Penunjang Medis 1 Orang 5.Fungsional dokter spesialis 2 orang 6.Fungsional dokter gigi 1 orang 7.Fungsional Bidan 9 orang 8.Fungsional Perawat 7 Orang 9.Fungsional perawat gigi 3 orang 10.Fungsional Sanitarian 2 orang	Ada	DUK RSUD H.Abdurrahman Sayoeti

						11.Fungsional Analis kesehatan 1orang 12.Fungsional Apoteker 1 Orang 13.Fungsional Asisten Apoteker 2 Orang 14.Fungsional Umum 3 orang		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS RSUD H.Abdurrahman sayoeti 40 orang, Jumlah PNS Kota Jambi 6213 orang	0,64%	DUK RSUD H.Abdurrahman Sayoeti
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Penjabat yang telah mengikuti Diklat PIM 0 orang, penjabat yang ada 4 orang	0%	DUK RSUD H.ABDURRAHMAN SAYOETI
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	-Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 4 orang, - Pejabat yang ada sebanyak 4 orang	100%	DUK RSUD H.Abdurrahman Sayoeti
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	1. Renstra RSUD H.abdurahman sayoeti 2.Renja Dinas Kesehatan Kota Jambi	2/2 X 100%=100 %	Renstra RSUD,Renja Dinas Kesehatan Kota Jambi
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMDx100%	-	-	-
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	RKA, DPA, RENJA DAN Renstra	1/1x100% = 100%	RKA, DPA, RENJA DAN Renstra dikelola oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerahx100%	-	-	-
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	-	-	-
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	-	-	-
			15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	-	-	-

			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	-	-	-
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Pengolahan Keuangan	1/1x100% = 100%	Pengolahan Keuangan dikelola oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Pengelolaan Inventarisasi Aset dan Barang RSUD H. ABDURRAHMAN SAYOETI	1/1x100% = 100%	Untuk saat ini dikelola oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	-	-	-
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Fasilitas informasi yang dimiliki RSUD H.Abdurrahman Sayoeti 1.Brosur 2.Banner 3.website 4.Sosmed	5/5 X 100%=100%	Media promosi RSUD
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Indek Kepuasan masyarakat Nilai Rata-Rata unsur pelayanan Tangibies Atau nyata = 73,59 Empati = 85,21 Reliability Atau Keandalan = 86,62 Responsive Atau Ketanggapan = 83,10 Apotek = 83,10 Rata-rata Tertimbang = 83,10	Nilai IKM setelah di konversi = 83%, Sangat Baik	Rekapan Hasil indek kepuasan masyarakat (IKM) RSUD H.Abdurrahman sayoeti 2019

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Telanaipura
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pengembangan, Inspektorat & Fungsi Penunjang Lainnya)

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program Pemberdayaan Masyarakat dengan Nilai Anggaran Rp. 5.691.785.500 dan Realisasi sebesar Rp. 5.517.335.850 (96,94%)	1 Program	Sumber Data Laporan Fungsional Kecamatan Telanaipura
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada sebanyak 14 SOP yang terdiri dari : 1. SOP tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) skala kecil 2. SOP tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil 3. SOP tentang Rekomendasi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 4. SOP tentang Rekomendasi Izin Menidirikan Bangunan (IMB) 5. SOP tentang Surat Keterangan Domisili Diri 6. SOP tentang Surat Keterangan Domisili Usaha 7. SOP tentang Surat Keterangan Pindah 8. SOP tentang Surat Keterangan Ahli Waris 9. SOP tentang Surat Dispensasi Nikah 10. SOP tentang Surat Rekomendasi Kegiatan (Keramaian) 11. SOP tentang Legalisasi Surat Keterangan Bersih Diri 12. SOP tentang Surat Keterangan Penelitian Mahasiswa 13. SOP tentang Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan 14. SOP tentang Legalisasi Daftar Susunan Keluarga Bagi ASN Yang Mau Pensiun.	14 SOP	Sumber Data dari Kecamatan Telanaipura
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Keberadaan Peraturan(Perda/Perkada)yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	1. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 2. Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada	Ada	Sumber Data dari Bagian Hukum Setda Kota Jambi

						Kecamatan Tipe A Kota Jambi. 3. Peraturan Walikota Jambi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Walikota Kepada Camat 4. Peraturan Walikota Jambi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 39 jabatan - Jabatan yang harusnya ada, sebanyak 39 jabatan	100%	Sumber Data DUK Kecamatan Telanaipura
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak ada Jabatan Fungsional	Tidak Ada	Sumber Data dari Kecamatan Telanaipura
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	- PNS Perangkat Daerah Sebanyak 52 Personel - Total PNS Kota Sebanyak 6213 Personel	0, 84%	Sumber Data DUK Kecamatan Telanaipura
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim sebanyak 14 Orang - Pejabat yang ada sebanyak 39 Orang	36%	Sumber Data DUK Kecamatan Telanaipura
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan sebanyak 39 Orang - Pejabat perangkat daerah yang ada sebanyak 39 orang	100 %	Sumber Data DUK Kecamatan Telanaipura
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 3 Jenis dokumen yang terdiri dari : 1. Renstra PD 2. Renja PD dan 3. RKA PD	3 jenis dokumen	Sumber Data dari Kecamatan Telanaipura
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMDx100%	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah sebanyak 8 program	100%	Sumber Data Renja Kecamatan Telanaipura
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program Renja Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah sebanyak 8 program - Program dalam RKA Perangkat Daerah sebanyak 8 program	100%	Sumber Data RKA Kecamatan Telanaipura
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam	- Jumlah program Renja Perangkat Daerah yang	100%	Sumber Data RKA DPA Kecamatan Telanaipura

				DPA Perangkat Daerah	DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerahx100%	diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah sebanyak 8 program - Jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah sebanyak 8 program		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah sebesar Rp. 12.562.562.490,- - Total Belanja APBD sebesar Rp. 1.846.258.216.875,-	0,68%	Sumber Data DPA Kecamatan Telanaipura
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 12.095.420.950,- - Total Realisasi belanja APBD sebesar Rp. 1.846.258.216.875,-	0,66%	Sumber Data LRA Kecamatan Telanaipura
			15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Total Belanja Langsung perangkat daerah sebesar Rp. 7.263.182.500,- - Total Belanja Langsung perangkat daerah sebesar Rp. 12.562.562.490,-	57,82	Sumber Data LRA Kecamatan Telanaipura
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Total Belanja Tidak Langsung Rp. 5.299.379.990,- - Total Belanja perangkat daerah Rp. 12.562.562.490,-	42,18	Sumber Data DPA Kecamatan Telanaipura
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan Perangkat Daerah ada, sebanyak 3 jenis sebagai berikut : 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada sebanyak 3 jenis	Sumber Data dari Kecamatan Telanaipura
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Berita Acara Rekonsiliasi Aset	Ada	Sumber Data dari Kecamatan Telanaipura
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Aset yang tidak digunakan sebesar Rp. 483.161.500,- - Aset yang dikuasai perangkat daerah sebesar Rp. 8.201.651.694.85	5,89%	Sumber Data BA Rekon Aset Kecamatan Telanaipura
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi yaitu 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan/Kotak Saran 3. Leaflet 4. Mobil Keliling 5. Pengumuman di Media Massa (Website, IG dan Facebook)	Sebanyak 5 Jenis	Sumber Data dari Kecamatan Telanaipura
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada	Sumber Data dari Kecamatan Telanaipura

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Bagian Hukum dan Perundang-Undangan
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pengembangan, Inspektorat & Fungsi Penunjang Lainnya)

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1 Program	1 Program	-
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	peraturan walikota jambi nomor 56 tahun 2018 tentang pembentukan produk hukum daerah dilingkungan pemerintah kota jambi	ADA	SOP pembentukan produk hukum daerah
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Keberadaan Peraturan(Perda/Perkada)yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Peraturan Walikota Jambi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Walikota Ke Camat	ADA	Bagian Hukum
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	-Jabatan yang ada sebanyak 4 orang - Jabatan yang harus ada, sebanyak 4 orang	100%	4/4*100% = 100 %
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada Jabatan Fungsional di Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kota Jambi	Tidak Ada	-
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	- PNS Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kota Jambi 8 Orang - PNS Kota Jambi 6213 Orang	0,12%	8/6213*100% = 0,12%
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan 3 Orang - Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada 4 orang	75%	3/4*100% = 75%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan 4 Orang - Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada 4 Orang	100%	4/4 *100% = 100%

5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Dokumen perencanaan perangkat daerah = 3 dokumen : 1. Dokumen RENSTRA 2. Dokumen RENJA 3. RKA Bagian Hukum	Ada 3 Dokumen	-
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada $RPJMD \times 100\%$	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Bagian Hukum 1 Program - Jumlah Program dalam RENJA Bagian Hukum yang ditetapkan pada $RPJMD$ 1 Program	100%	$(1/1) \times 100\% = 100\%$
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Bagian Hukum 1 Program - Jumlah Program yang diakomodir dalam RKA Bagian Hukum 1 Program	100%	$(1/1) \times 100\% = 100\%$
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Bagian Hukum yang diakomodir dalam DPA Bagian Hukum 1 Program - jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah 1 Program	100%	$(1/1) \times 100\% = 100\%$
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total anggaran Bagian Hukum 1.296.600.000 - Total Belanja APBD 1.846.258.216.875	0,07%	$1.296.600.000 : 1.846.258.216.875 * 100\% = 0,07\%$
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Total Realisasi Belanja Bagian Hukum Rp. 1.212.945.800 - Total Realisasi Belanja Kota Jambi Rp. 1.661.380.787.461,83	0,073%	Bagian Hukum, $1.212.945.800 : 1.661.380.787.461,83 * 100\% = 0,073\%$
			15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Total Belanja Langsung Bagian Hukum Rp. - Jumlah Realisasi Belanja Bagian Hukum Rp. 1.212.945.800		Bagian Hukum, $1.212.945.800 : 1.846.258.216.875 * 100\% = 0,065\%$
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Total Belanja Tidak Langsung Bagian Hukum Rp. - Jumlah Realisasi Belanja Bagian Hukum Rp. 1.212.945.800	-	-
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, yaitu dokumen LRA, Neraca dan CALK	3 Dokumen	-
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, yaitu Berita Acara rekon aset	Ada	-
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah	- Jumlah aset yang tidak digunakan = 49.500.000 - Total	0.37 %	$49.500.000/13.366.008.949 \times 100\% = 0.37\%$

					dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	asset yang dikuasai = 13.366.008.949		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Tidak Ada	Tidak Ada	-
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak ada	Tidak Ada	tidak ada

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Bagian Hubungan Masyarakat
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pengembangan, Inspektorat & Fungsi Penunjang Lainnya)

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program Optimalisasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Anggaran Rp. 8.604.234.000,- dan Terealisasi Rp. 8.489.977.785,-	Meningkatkan Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat	sumber data dari bagian Humas
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	- SOP Publikasi Kegiatan Walikota - SOP Penyusunan Kliping - SOP Peliputan	Ada	sumber data dari bagian Humas
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Keberadaan Peraturan(Perda/Perkada)yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Perwal SOTK No. 34 Tahun 2016	-Tidak ada	-Bagian HumasKota Jambio
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada 4 (empat) dibagi jumlah jabatan yang ada 4 (empat)	100%	DUK (Bagian Organisasi)
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak ada jabatan fungsional pada Bagian Humas Setda Kota Jambi	Tidak Ada	-Bagian Humas
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	- Jumlah PNS Bagian Humas 12 Orang ; - PNS Kota Jambi 6213 Orang	0,19%	-Bagian Humas
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan 3 Orang ; - Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada 4 Orang	75%	-Bagian Humas
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi	- Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan 4	100%	-DUK (Bagian Organisasi)

					Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	(empat); - Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada 4 (empat)		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD Sekretariat Daerah Kota Jambi	100%	-
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMDx100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah 1 Program ; - Jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD 1 Program	100%	-Bagian Humas Setda Kota Jambi
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah Bagian Humas setda Kota Jambi 1 (satu) ; - Jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah Bagian Humas setda Kota Jambi 1 (satu)	100%	-Bagian Humas Setda Kota Jambi
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerahx100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah 1 (satu) program ; - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah dengan 1 (satu) program	100%	Bagian Humas Setda Kota Jambi
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran perangkat Daerah Rp. 8.604.234.000 ; - Total APBD Rp.1.846.258.216.875,-	0,46%	-Bagian Humas
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp. 8.596.027.785 ; - Total Realisasi Belanja APBD Rp. 1.661.380.787.461,-	0,51%	-
			15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah Rp. 8.582.634.000,-	100%	Bagian Humas Setda Kota Jambi
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Sekretariat Daerah Kota Jambi Rp. 19.861.824.526,-	100%	Sekretariat Daerah Kota Jambi
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Neraca, LRA, Calk Bagian Keuangan Setda Kota Jambi	Bagian Humas Setda Kota Jambi	-
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	Manajemen asset Perangkat	18	Keberadaan inventarisasi barang	Ada atau tidak ada inventarisasi	Rekon Aset Bagian Humas Setda	-	-

	DAERAH	Daerah		atau asset Perangkat Daerah	barang atau asset Perangkat Daerah	Kota Jambi		
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah Rp.- ; - Jumlah aset yang dikuasai Rp. 331.894.872.869	0%	Sekretariat Daerah
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Papan Pengumuman, Pamflet, Brosur, Spanduk, Kotak Pengaduan, Mobil Keliling dan Postingan melalui Sosmed	100%	-
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	-	-	-

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Bagian Kerjasama
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pengembangan, Inspektorat & Fungsi Penunjang Lainnya)

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) Program Peningkatan Kerjasama Daerah dan Nilai Anggaran Rp. 725.000.000,- serta Realisasinya Rp. 641.361.700,-	1	Sumber Data dari Bagian Kerjasama
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	4 SOP 1. SOP tentang penyusunan Naska MoU 2. SOP tentang penyusunan Naska PKS 3. SOP tentang Pengurusan Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri 4. SOP tentang Penyusunan Laporan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)	ada	Sumber Data dari Bagian Kerjasama
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Keberadaan Peraturan(Perda/Perkada)yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Peraturan Walikota Jambi tentang Kerjasama Satu Pintu	ada	Sumber Data dari Bagian Kerjasama
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 4 Jabatan - Jabatan yang harus ada, sebanyak 4 Jabatan	100%	Sumber data dari Bagian Kerjasama
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional	Tidak ada	Sumber data dari Bagian Kerjasama
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	-PNS Bagian Kerjasama sebanyak 10 personil -Total PNS Kota sebanyak 6.213 personil	0,16	Sumber data mengacu pada data DUK perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari BKD
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	-Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, 3 orang. -Pejabat yang ada, sebanyak 4 orang.	75%	Sumber data dari Bagian Kerjasama

			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 4 orang. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 jabatan	100%	Sumber data dari Bagian Kerjasama
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Renja 2. RKA 3. DPA	3 jenis dokumen	Sumber data dari Bagian Kerjasama
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMDx100%	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah sebanyak 1 program	100%	Sumber data dari Bappeda Kota Jambi.
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 Program. -Program dalam RKA Perangkat Daerah sebanyak 1 program	100%	Sumber data Perangkat Daerah mengacu dokuem RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerahx100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah sebanyak 1 program	100%	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs Tahun 2018
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total anggaran Perangkat Daerah sebesar Rp. 725.000.000,- - Total Belanja APBD sebesar Rp. 1.846.250.216.875	0,039%	Sumber data dari Bagian Kerjasama
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 641.361.700,- - Total Realisasi Belanja APBD sebesar Rp. 1.661.380.787.461,83	0,038%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019
			15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 641.361.700,- - Total Realisasi Belanja sebesar Rp. 1.846.250.216.875	0,035%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 641.361.700,-	0,38%	Sumber data dari realisasi
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA,	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah	Ada, Laporan Keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb : 1. Neraca	ada sebanyak 3 jenis	Sumber data dari Bagian Keuangan

				Calk)	berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	2. LRA 3. CALK		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila ada, sebutkan jenis dokumennya. Berita Acara Asset Barang	ada	Sumber data dari Setda Kota Jambi
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. - - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah sebanyak Rp. -	0 %	-
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Pengumuman di Mass Media	Sebanyak 1 jenis	Instagram dan Facebook
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak ada	Tidak ada	-

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Bagian Kesejahteraan Rakyat
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pengembangan, Inspektorat & Fungsi Penunjang Lainnya)

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program Pembinaan dan Fasilitasi bagi Organisasi dan Kegiatan Keagamaan dengan Anggaran Bagian Kesra Rp. 9.041.613.750,00 dan Terealisasi Rp. 8.702.956.950,00	Meningkatnya Pembinaan dan Fasilitasi Keagamaan, Kesejahteraan Aparatur, Kepemudaan dan Kemasyarakatan	-
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	1. SOP Laporan Tahunan 2. SOP Penyusunan Rencana Kerja 3. SOP Penyusunan Laporan Kinerja 4. SOP Penyusunan LPPD 5. SOP Pengolahan Administrasi Aset 6. SOP Rakor	100%	-
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Keberadaan Peraturan(Perda/Perkada)yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Perwal SOTK No. 34 Tahun 2016	Ada	-
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada 4 (empat) dibagi jumlah jabatan yang ada 4 (empat)	100%	-
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada	-	-
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS Bagian Kesra = 10 PNS di bagi Total PNS Kota = 6.213 PNS	0,16%	-
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan = 3 Pejabat ; - Jumlah total pejabat perangkat daerah = 4 Pejabat	75%	-
			8	Pejabat yang telah memenuhi	Jumlah pejabat yang memenuhi	- Jumlah pejabat yang memenuhi	100%	-

				persyaratan kepengkatan	persyaratan kepengkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	persyaratan kepengkatan 4 (empat) ; - Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada 4 (empat)		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bagian Kesra : RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD Sekretariat Daerah Kota Jambi	100%	-
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMDx100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah 1 Program ; - Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD 1 Program	100%	-
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah Bagian Kesra Setda Kota Jambi 1 (satu) ; - Jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah Bagian Kesra Setda Kota Jambi 1 (satu)	100%	-
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerahx100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah 1 (satu) program ; - Jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah dengan 1 (satu) program	100%	-
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp. 9.041.613.750,00 ; - Total Anggaran APBD Rp. 1.846.258.216.875,00	4,89 %	-
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Bagian Kesra Rp. 8.702.331.950 ; - Total Realisasi Belanja APBD Rp. 1.661.380.787.461	0,52%	-
			15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah Rp. 8.582.634.000,-	100%	-
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Sekretariat Daerah Kota Jambi Rp. 19.861.824.526,-	100%	-
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Neraca, LRA, Calk Bagian Keuangan Setda Kota Jambi	Bagian Kesra Setda Kota Jambi	-

7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Rekon Aset Bagian Kesra Setda Kota Jambi	100%	-
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah Rp.- ; - total asset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp. 331.894.872.869	0%	Sekretariat Daerah
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Papan Pengumuman, Pamflet, Brosur, Spanduk, Kotak Pengaduan, Postingan melalui Sosmed	100%	-
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	-	tidak ada	-

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Bagian Keuangan
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pengembangan, Inspektorat & Fungsi Penunjang Lainnya)

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2 Program	Bagian keuangan
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	ada sebanyak 5 SOP	5 SOP	Bagian keuangan
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Keberadaan Peraturan(Perda/Perkada)yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada	100 %	Keu
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 4 jabatan - Jabatan yang harus ada, sebanyak 4 jabatan	100 %	Keu
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	0 Jabatan Fungsional	Tidak Ada	Keu
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	PNS SKPD Keuangan sebanyak 13 personil; Total PNS Kota Jambi sebanyak 6213 personil	0,20%	Keu; $13/6213 \times 100\% = 0,20\%$
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 3 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.	100 %	Keu
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 Jabatan.	100%	Keu

5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	3 jenis dokumen	keu
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMDx100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah sebanyak : 2 program - jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD sebanyak : 2 Program	100%	Keu
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat daerah sebanyak 2 program. - Program dalam RKA Perangkat daerah sebanyak 2 program	100 %	Keu
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerahx100%	- Program Renja Perangkat daerah yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak : 2 program - Program dalam DPA Perangkat daerah sebanyak : 2 program	100 %	Keu
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total anggaran Perangkat daerah Rp. 5.950.000.000,- - Total Belanja APBD Rp. 1.846.258.216.875,-	0,32%	Keu;
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp. 5.572.448.272,- - Total Realisasi Belanja APBD Rp. 1.661.380.787.461,-	0,33%	Keu
			15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Total Belanja Langsung dari DPPA 2019	-	Keu
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Belanja Tidak Langsung	-	Keu
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	1. LRA 2. Neraca 3. Calk	Ada sebanyak 3 jenis	Keu
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	- Buku Inventaris Barang; - Kartu Inventaris Ruangan	Ada sebanyak 2 jenis dokumen	Keu
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Jumlah Aset Yang Tidak Digunakan Rp.- ; - Jumlah Total Aset yang dikuasai Rp. 331.894.872.869,26,-	0%	Sekretariat Daerah

8	PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	- Papan pengumuman	Ada 1 jenis	Keu
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	- Tidak Ada	- Tidak Ada	Keu

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Bagian Organisasi
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pengembangan, Inspektorat & Fungsi Penunjang Lainnya)

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan: 1. Program Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Pelayanan Publik - Anggaran Rp. 524.380.000,- - Realisasi Rp. 509.445.897,- 2. Program tata Kelola Organisasi Pemerintahan dan Administrasi Pembangunan - Anggaran Rp. 352.620.000,- - Realisasi Rp. 253.633.350,-	2 Program	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Jumlah keberadaan SOP = 2 SOP yang terdiri dari: 1. SOP tentang Analisa Jabatan 2. SOP tentang Laporan Kinerja Kota Jambi	2 SOP	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Keberadaan Peraturan(Perda/Perkada)yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan, yaitu: 1. Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2019 tentang Road map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Jambi Tahun 2019-2023 2. Peraturan Walikota Jambi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Kota Jambi 3. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Kota Jambi 4. Peraturan Walikota Jambi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di	Ada 6	

						Lingkungan Pemerintah Kota Jambi 5. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi 6. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jumlah jabatan yang diisi = 4 jabatan - Jumlah jabatan yang ada = 4 jabatan	100%	$(4/4) \times 100\% = 100\%$
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak ada Jabatan Fungsional	Tidak ada	-
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	- Jumlah PNS Bagian Organisasi = 8 PNS - Jumlah Total PNS Kota Jambi = 6.213 PNS	0,13%	$(8/6213) \times 100\% = 100\%$
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan = 3 Pejabat - Jumlah total pejabat perangkat daerah = 4 Pejabat	75%	$(3/4) \times 100\% = 75\%$
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan = 4 orang - Pejabat dibagi total pejabat perangkat daerah yang ada = 4 orang	100%	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Dokumen perencanaan perangkat daerah = 3 dokumen : 1. Dokumen RENSTRA 2. Dokumen RENJA 3. RKA Bagian Organisasi	Ada	
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMDx100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah sebanyak 5 Program - Jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah sebanyak 5 Program	100%	$(5/5) \times 100\% = 100\%$
		Sinkronisasi program RKA SKPD daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA perangkat daerah = 5 program - Jumlah program dalam RKA perangkat daerah = 5 Program	100%	$(5/5) \times 100\% = 100\%$

		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerahx100%	- Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA = 5 Program - Jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah = 5 Program	100%	(5/5)*100% = 100%
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Rp. 1.300.000.000,- - Total Belanja APBD Rp. 1.846.258.216.875,-	0,07%	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi belanja Rp. 1.143.701.340,- - Total realisasi belanja APBD Rp. 1.661.380.787.461,83	0,06%	1.143.701.340/1.661.380.787.461,83*100 = 0,06%
			15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	Total belanja langsung Rp. 1.300.000.000,- dibagi total belanja Perangkat Daerah Rp. 82.767.252.915,-	1,57%	
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Total belanja tidak langsung Rp. 19.952.516.265,- dibagi total belanja Perangkat Daerah Rp. . 82.767.252.915,-	24,10%	
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada, yaitu dokumen: 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada 3 Dokumen	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, yaitu Berita Acara rekon aset	Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Jumlah aset yang tidak digunakan = 49.500.000 - Total asset yang dikuasai = 13.366.008.949	0.37 %	49.500.000/13.366.008.949*100% = 0.37%
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana partisipasi, terdiri dari: 1. Papan pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Pengumuman media massa	3 fasilitas	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, dokumen indeks survey kepuasan masyarakat	1 dokumen	-

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Bagian Pembangunan Daerah
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pengembangan, Inspektorat & Fungsi Penunjang Lainnya)

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program Yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Urusan 1. Program Tata Kelola Organisasi Pemerintah Dan Administrasi Pembangunan Jumlah Anggaran Rp. 2.297.450.000,- Realisasi Anggaran Rp 2.194.513.100	1 Program	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada 23 Sop yang terdiri dari: 1. SOP Persiapan Pengadaan 2. SOP Tender (Pemilihan) 3. SOP Pelaksanaan Seleksi Prakualifikasi Jasa Konsultansi Badan Usaha 4. SOP Pelaksanaan Tender Pascakualifikasi Metode 1 File 5. SOP Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa 6. SOP Pelaksanaan ontrak 7. SOP Pelaksanaan Seleksi Jasa Konsultansi Badan 8. SOP Pelaksanaan Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan 9. SOP Pelaksanaan Tender Cepat 10. SOP Pengelolaan Kinerja UKPBJ 11. SOP Pengelolaan Resiko Proses 12. SOP Pengelolaan Aset 13. SOP Pengelolaan Gangguan/Permasalahan dan Permintaan Layanan LPSE 14. SOP Pengelolaan Kapasitas LPSE 15. SOP Pencabutan dan Pembuatan Akun LPSE 16. SOP Serah Terima Pekerjaan dan Aset 17. SOP Penanganan Kondisi Darurat dan Rencana Kelangsungan LPSE 18. SOP Pengelolaan Anggaran LPSE 19. SOP Pengelolaan Pendukung Layanan 20. SOP Pengelolaan Hubungan Bisnis 21. SOP Registrasi dan Verifikasi LPSE 22. SOP Tata Cara Pengelolaan	23 SOP	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

						Resiko 23. SOP Hubungan Dengan Penguna Layanan		
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Keberadaan Peraturan(Perda/Perkada)yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada Terdiri dari: 1. Peraturan Walikota JambiNo 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola dan Pemilihan Penyedia Melalui Pengadaan Langsung Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi 2. Peraturan Walikota Jambi Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah Kota Jambi	2 Peraturan	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan dan Bagian Organisasi
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) 4 Orang - jumlah jabatan yang ada 4 Orang	100 %	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada	Tidak Ada	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	- Jumlah PNS yang ada 19 Orang ; - Total PNS KOTA Jambi 6213 Orang	0,30 %	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan = 3 pejabat - Total pejabat perangkat daerah yang ada = 4 pejabat	75%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan = 4 pejabat ; - Total pejabat perangkat daerah yang ada = 4 pejabat	100%	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Dokumen Perencanaan Perangkat Daera 1. Renja 2. Renstra 3. RKA Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan 4. DPA Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan	ada 4 Dokumen	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMDx100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah 1 Program ; - Jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD 1 Program	100%	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA perangkat daerah = 1 Program ; - Jumlah Program dalam RKA perangkat daerah = 1 Program	100%	-
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerahx100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA perangkat daerah = 1 program ; - Jumlah Program dalam DPA perangkat daerah = 1 Program	100%	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp 2.297.450.000 ; - Total Belanja APBD Rp 1.846.258.216.875	0,12 %	Sumber Data Dari Bagian Keuangan Dan BPKAD
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp 2.194.513.100 ; - Total Realisasi Belanja APBD Rp 1.661.380.787.461	0,13%	Sumber Data Dari Bagian Keuangan Dan BPKAD
			15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah Rp. 2.194.513.100 Total Belanja Perangkat Daerah Rp. 82.767.252.915	0,26 %	Sumber Data Dari Bagian Keuangan
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah (Setda)Rp. 19.952.516.265 Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp. 82.767.252.915	0,24 %	Sumber Data Dari Bagian Keuangan
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan Keuangan Perangkat Daerah Berikut Komponennya 1. Neraca 2. LRA 3. CaLK	Ada 3 Jenis	Sumber Data Dari Bagian Keuangan
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada Yaitu Berita Acara Rekon Aset	1 Berkas	Sumber Data Dari BPKAD
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Jumlah Asset Yang Tidak Digunakan : Rp.,- - Jumlah Total Asset Yang Dikuasai : Rp. 331.894.872.869	0%	Sekretariat Daerah
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah Fasilitas/Prasarana Partisipasi 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Pengumuman Media Massa	3 Fasilitas	Sumber Data Bagian Humas

		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
--	--	---	----	---------------------------------------	--	-----------	-----------	---

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Bagian Perekonomian
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pengembangan, Inspektorat & Fungsi Penunjang Lainnya)

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1(satu) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Anggaran : Rp. 799.850.000,00 , Realisasi : Rp. 678.048.130,00 Perkegiatan	3 kegiatan	pada bagian Perekonomian terdapat 1 program yaitu program peningkatan pelayanan publik dan 3 kegiatan antara lain 1. kegiatan pengendalian produksi dan distribusi dengan nilai Rp. 299.850.000 2. kegiatan pembinaan, pemantauan, penyelenggaraan kredit usaha, pemberdayaan ekonomi masyarakat(KUPEM) deng
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Tidak Ada	Tidak ada	Terlampir Surat keterangan tidak ada Standar Operasional Prosedur(SOP) terkait Pelayanan
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Keberadaan Peraturan(Perda/Perkada)yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	1. Perda No 1 Tahun 2016 tentang : TJSP (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) 2. Peraturan Walikota Jambi nomor 34 tahun 2016 tentang : Kedudukan, susunan organisasi, tugas tata kerja pada sekretariat daerah kota jambi.	Ada	-
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jumlah Jabatan yang ada sebanyak 4 jabatan. - Jumlah yang di isi 4 Jabatan	100%	-
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada	Tidak Ada	Telampir Surat keterangan tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi perangkat daerah
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	- Jumlah PNS Bagian Perekonomian = 10 PNS (berdasarkan DUK) - Jumlah total PNS kota 6213 personnel.	0,18%	-
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan	- Jumlah Pejabat memiliki syarat Diklatpim 3 orang pegawai ; -	75%	-

				kepemimpinan	kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat Perangkat Daerah yang ada 4 orang pegawai		
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan 4 orang ; - total Pejabat perangkat daerah 4 orang	100%	jumlah total perangkat pejabat daerah ada pada BKPDSDM
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	3 dokumen	Ada	-
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMDx100%	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA perangkat daerah 1 Program - Jumlah program dalam RENJA perangkat daerah yang ditetapkan pada RPJMD 1 Program	100%	-
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah program Renja perangkat daerah yang diakomodir dalam RKA perangkat daerah 1 Program - jumlah program dalam RKA perangkat daerah 1 Program	100%	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerahx100%	- Jumlah RKA perangkat daerah yang diakomodir dalam DPA perangkat daerah 1 Program - Jumlah program dalam DPA perangkat daerah 1 Program	100%	-
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah sebesar Rp, 799.850.000,00 - Total Belanja APBD sebesar Rp. 1.846.258.216.875,00	83,030 %	-
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp, 678.048.130,00 ; - Realisasi Belanja APBD Rp. 1.661.380.787.461	0,04%	-
			15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	Realisasi 59.217.620.049,00. Anggaran 62.814.736.650,00	94,27%	-
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Total Belanja tidak langsung Rp. 806.303.727.641,00	90,62%	-
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	1. LRA 2. NERA 3. CALK Setda Kota Jambi	Ada	-

7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	-	Ada	-
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah Rp.- ; total asset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp. 331.894.872.869	0%	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	1. CSR 2. Instragram Bagian Perekonomian	Ada	-
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	tidak ada	-	-

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Bagian Protokol
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pengembangan, Inspektorat & Fungsi Penunjang Lainnya)

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Sekda, Aparatur dan Keprotokolan Jumlah Anggaran 5.409.250.000 Realisasi Anggaran 5.286.233.885	Ada	-
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	SOP Bagian Protokol Tahun 2019	Ada	Sumber data dari Bagian Protokol
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Keberadaan Peraturan(Perda/Perkada)yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Peraturan Walikota Jambi Nomor 34 tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kota Jambi	Ada	Sumber data di bagian Hukum
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	-Jabatan yang ada sebanyak 4 jabatan -jabatan yang harus ada sebanyak 4 jabatan	100%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak ada Jabatan Fungsional	-tidak ada	-
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS Bagian Protokol 7 Orang Jumlah Total PNS Kota Jambi 6.213 Orang	0,11%	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat Diklatpim sebanyak 3 orang - Pejabat yang ada sebanyak 4 orang	75%	-

			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	-Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan sebanyak 4 orang - Jabatan yang ada sebanyak 4 orang	100%	-
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	-Renstra SKPD -Renja SKPD - RKA SKPD	3 jenis dokumen	-
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMDx100%	-Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah sebanyak 1 Program -Program Renja Perangkat Paerah yang ditetapkan sebanyak 1 Program	100%	-
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	-Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program	100%	-
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerahx100%	-Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA Perangkat daerah, sebanyak 1 program - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 Program	100%	-
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	-Total anggaran SKPD sebesar Rp.5.385.000.000 -Total Belanja APBD, sebesar Rp.1.846.258.216.875	0,29%	-
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar 5.139.752.619 ; - Total Realisasi Belanja APBD sebesar 1.661.380.787.461	0,30%	-
			15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	-Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah , sebesar 5.286.233.885 -Total Belanja Langsung Perangkat daerah, sebesar 5.409.250.000	97,72%	
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	-	-Tidak ada	-
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan Realisasi Keuangan,Neraca dan CALK	Ada	-
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Berita Acara Rekonsiliasi Aset dan Barang Milik Daerah Setda Kota Jambi Tahun 2019	100%	-

		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Jumlah Aset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah Rp.- - Total asset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp. 331.894.872.869	0%	Sekretariat Daerah
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	1.Papan Pengumuman 1 buah 2.Pos Pengaduan 1 buah 3.Leaflet/Banner 4.Pengumuman di Mass Media/Social media	Ada	-
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	-	Tidak ada	-

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Bagian Umum
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pengembangan, Inspektorat & Fungsi Penunjang Lainnya)

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan 1. Program Peningkatan Disiplin aparatur anggaran Rp.212.040.000 Reallisasi Rp.... 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran anggaran Rp. 7.533.226.500 Realisasi Rp... 3. Program Peningkatan pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah, Sekda,Aparatur Dan Keprotokolan anggaran Rp.48.200.000 Realisasi Rp... 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur anggaran Rp.7.239.327.900 Realisasi Rp... 5. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Keuangan Setda dan Kerumah tanggaan anggaran Rp.1.531.185.000 Realisasi Rp...	5 program	BAGIAN UMUM
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	ada, sebutkan seberapa banyak 1 SOP,yang terdiri dari 1.Sop tentang peminjaman gedung putra retno	- 1 buah	- Bagian Umum
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Keberadaan Peraturan(Perda/Perkada)yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada Terdiri dari 1.Peraturan daerah kota jambi nomor 11 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kota jambi nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha 2. keputusan sekretaris daerah kota jambi nomor 59 tahun 2019 tentang penggunaan barang milik daerah kota jambi	ada 2 buah	-BAGIAN UMUM
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang	-jabatan yang ada sebanyak 4 - jabatan yang harus ada, sebanyak	100 %	-DUK bagian umum

					ada x 100%	4		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	-TIDAK ADA JABATAN FUNGSIONAL	-TIDAK ADA JABATAN FUNGSIONAL	-BAGIAN UMUM
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	- Jumlah PNS 22 orang di Bagian Umum ; - PNS Di Pemerintah Kota Jambi 6213 Orang	0,35%	BAGIAN UMUM
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	-Pejabat yang telah mengikuti diklatpim 3 Orang -Pejabat yang ada sebanyak 4 orang	75%	Bagian Umum
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	-Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 4 Orang -Pejabat yang ada sebanyak 4 Orang	100%	BAGIAN UMUM
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang terdiri dari : 1. Renstra PD 2. Renja PD 3. RKA PD	3 dokumen	- Bagian Umum
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMDx100%	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam renja perangkat daerah sebanyak 5 program ; - Jumlah Jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah 5 program	100 %	-BAGIAN UMUM
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah sebanyak 5 Program ; - Program dalam RKA perangkat daerah,sebanyak 5 Program	100 %	-RKA
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerahx100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah sebanyak 5 program ; - Jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program	100 %	DPA bagian umum
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	-total anggaran perangkat daerah sebesar Rp. 16.568.148.900 -total belanja APBD, sebesar Rp.1.846.258.216.875	0,89%	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	-Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 14.683.721.136 - Total Realisasi Belanja APBD Rp. 1.661.380.787.461	0,88%	

			15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	Total belanja langsung Rp.14.683.721.136 dibagi total belanja Perangkat Daerah Rp. 74.714.080.145,-	0,196%	-fungsional
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Total belanja tidak langsung Rp. 15.496.260.096,- dibagi total belanja Perangkat Daerah Rp. 74.714.080.145,-	0,207%	Bagian Umum
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	- apabila ada, laporan keuangan ada sebanyak 3 jenis, sbb 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	-Ada 3 jenis	bagian keuangan setda kota jambi
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	ada inventarisasi barang atau asset perangkat daerah 1.rekon aset 2.KIR/KIB	-Ada	-Bagian umum
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- aset yang tidak digunakan sebesar Rp.- - aset yang dikuasai perangkat daerah sebanyak Rp.331.894.872.869-	0%	Sekretariat Daerah
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	jenisnya : 1. papan pengumuman 2.pos pengaduan/kotak pengaduan 3.pengumuman di media masa	- jumlah sebanyak 3 jenis	papan pengumuman, kotak pengaduan, instagram : bagian umum
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	- tidak ada	- 0%	-

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pengembangan, Inspektorat & Fungsi Penunjang Lainnya)

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	PROGRAM : PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ANGGARAN : Rp. 3.664.663.245 REALISASI : 3.346.607.800	1 PROGRAM	BAPPEDA
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	1. SOP PENGKOORDINASIAN RKA SKPD TERKAIT 2. SOP PENYUSUNAN RKA 3. SOP E-PLANNING 4. SOP TIM PENYUSUNAN LKPJ AKHIR TA	4 SOP	BAPPEDA
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Keberadaan Peraturan(Perda/Perkada)yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	- PERDA KOTA JAMBI NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2018-2023 - PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG RKPD KOTA JAMBI TAHUN 2019	ADA	BAPPEDA
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	JUMLAH JABATAN YANG TERISI : 20 JUMLAH JABATAN YANG ADA : 21	95%	BAPPEDA
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS (AHLI MUDA)	ADA	BAPPEDA
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	PNS BAPPEDDA : 34 ORANG , TOTAL PNS KOTA JAMBI : 6213 Orang	0,54%	BAPPEDA
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	PEJABAT YANG TELAH MENGIKUTI DIKLATPIM : 14 ORANG PEJABAT YANG ADA SEBANYAK : 21 ORANG	66%	BAPPEDA

			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- PEJABAT YANG MEMENUHI SYARAT KEPANGKATAN : 20 ORANG - PEJABAT YANG ADA SEBANYAK : 21 ORANG	95%	BAPPEDA
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	RENSTRA, RENJA DAN RKA	ADA	-
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMDx100%	-Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah : 8 PROGRAM , - Jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD : 8 PROGRAM	100%	BAPPEDA
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah : 8 PROGRAM , - Jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah : 8 PROGRAM	100%	-
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerahx100%	- JUMLAH PROGRAM RKA BAPPEDA : 8 PROGRAM - JUMLAH PROGRAM DPA BAPPEDA : 8 PROGRAM	100%	BAPPEDA
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- TOTAL ANGGARAN BAPPEDA SEBESAR Rp. 13.376.458.423,- - TOTAL BELANJA APBD SEBESAR Rp. 1.846.258.216.875,-	0,72%	BAPPEDA
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- REALISASI BELANJA BAPPEDA SEBESAR Rp. 11.796.082.682,- - TOTAL REALISASI BELANJA APBD SEBESAR Rp. 1.661.380.787.461,83,-	0,71%	BAPPEDA
			15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- REALISASI BELANJA LANGSUNG BAPPEDA SEBESAR Rp. 7.849.125.210,- - TOTAL REALISASI BELANJA BAPPEDA SEBESAR Rp. 11.796.082.682,-	66,54%	BAPPEDA
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG BAPPEDA SEBESAR Rp. 3.946.957.472,- - TOTAL REALISASI BELANJA BAPPEDA SEBESAR Rp. 11.796.082.682,-	33,46%	BAPPEDA
		Laporan keuangan Perangkat	17	Keberadaan laporan keuangan	Ada atau tidak ada laporan	1. NERACA 2. LRA 3. Calk	100%	BAPPEDA

		Daerah		Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)			
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	BERITA ACARA REKON ASET	ADA	BAPPEDA
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- ASET YANG TIDAK DIGUNAKAN, SEBESAR Rp. 140.365.000,- - ASET YANG DIKUASAI BAPPEDA SEBESAR Rp. 12.409.086.833,31,-	1,13%	BAPPEDA
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	1. PAPAN PENGUMUMAN 2. LEAFLET	2 JENIS	BAPPEDA
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	TIDAK ADA	-	BAPPEDA

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pengembangan, Inspektorat & Fungsi Penunjang Lainnya)

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	-	-	-
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	-SOP Pelayanan Kepegawaian Terpadu Satu Pintu -SOP Konsultasi Kepegawaian -SOP Barang Persediaan -SOP Inventarisasi Barang -SOP Penerimaan Tamu Kaban -SOP Surat Masuk -SOP ttg Surat Keluar SOP Kenaikan Gaji berkala SOP Kenaikan Pangkat SOP Laporan Tahunan SOP Laporan Kinerja (LK) SOP Rencana Strategis (RENSTRA) SOP Pencairan Anggaran SOP Jabatan Fungsional SOP Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional SOP Kenaikan Gaji berkala PNS SOP Kenaikan Pangkat PNS SOP Penetapan NIP CPNS SOP Pengangkatan CPNS menjadi PNS SOP Pensiun SOP Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah SOP SOP Diklat Teknis Struktural SOP Diklat Teknis Fungsional SOP Izin Belajar SOP Tugas Belajar Ujian Dinas SOP SMS Centre SOP Pengelolaan Sistem Informasi Manajemn Kepegawaian (SIMPEG) SOP Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegwaian (SAPK) SOP Pengelolaan Dokumen Arsip Kepegawaian (E-ARSIP) SOP Pengelolaan Informasi Website BKPSDMD SOP Pengurusan Nomor Induk Pegawa (NIP) SOP Perbaikan Nip SOP Pengurusan Perbaikan Kartu Pegawai Elektronik SOP Sistem Aplikasi	- ada	- SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kri

						Dan Koneksi Absensi Online (E-Absen) SOP Izin Percerian SOP Cuti SOP Pemberhentian Sementara SOP Pemberian Izin untuk Beristeri Lebih dari satu SOP Izin Cuti Haji/Umroh SOP Pengambilan Sumpah/Janji SOP Pengusulan/Penetapan Satya Lancana Karya Satya (10,20 dan 30) SOP Izin Perjalanan Dinas Keluar Negri SOP Pengambilan Sumpah/Janji SOP Usulan Pembuatan Kartu Pegawai dan Karis/Karsu		
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Keberadaan Peraturan(Perda/Perkada)yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 Perda PERDA yang seharusnya, sebanyak 0 Perda	- 0 %	-
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- jumlah jabatan yang ada di skpd sebanyak 21 orang - jumlah jabatan yang ada di skpd sebanyak 21 orang	100%	-
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	- - 1 Pengelola Gaji 2 Analisis keuangan 3 Bendahara Pengeluaran 4 Verifikator Keuangan 5 Analisis Layanan Umum 6 Pengadministrasi Umum 7 Pengelola Kepegawaian 8 Pengelola Pemanfaatan BMD 9 Ajudan 10 Pramu Kebersihan 11 Petugas Keamanan 12 pengembudi 13 Pengadministrasi Perencanaan dan Program 14 Pengelola Data Perencanaan Penganggaran 15 Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran 16 Pengelola Kepegawaian 17 Penyusun Rencana Promosi 18 Analis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur 19 Penyusun Rencana Mutasi 20 Analis Diklat 21 Pranata Diklat 22 Analis Kerjasama Diklat 23 Pengadministrasi Ijin Belajar 24 Analis Pengembangan Pegawai 25 Analis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur 26 Pengadministrasi Kepegawaian 27 Penyusun Bahan Pembinaan 28 Analis Kinerja 29 Analis Pelanggaran Disiplin 30 Pranata Arsip 31 Analis Data dan Informasi 32 Pengelola SIMPEG 33 Analis Informasi 34 Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian 35 Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	- Ada	-
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	- - PNS SKPD, sebanyak 58 personil - Total PNS Kota,	0,93%	-

		tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait				sebanyak 6.213 personil		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- - Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 12 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 21 org.	57%	-
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 21 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 21 org.	100%	-
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	- Ada sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Renstra SKPD 2. Renja SKPD 3. RKA	- 3 jenis dokumen	-
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMDx100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 8 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RKPJMD, sebanyak 8 program	100%	-
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program.	100%	-
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerahx100%	- Program Renja SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program.	100%	-
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- - Total anggaran SKPD, sebesar Rp. 29.229.669.474,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.846.258.216.875,-	1,58 %	-
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- - Realisasi Belanja SKPD, sebesar Rp.18.011.909.775,- - Total Realisasi APBD, sebesar Rp. 1.661.380.787.461,-	1,08%	-
			15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- - Realisasi Total belanja langsung SKPD, sebesar Rp. 6.093.897.824,- - Realisasi Total belanja SKPD, sebesar Rp. 18.011,909.775,-	33,83%	-
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- - Realisasi Total belanja tidak langsung SKPD, sebesar Rp. 11.918.011.951,- - Realisasi Total	66,17%	-

					belanja SKPD, sebesar Rp.18.011.909.775,-			
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	- Apabila ada, Laporan Keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	- ada sebanyak 3 jenis	-
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	- Ada - Buku Inventaris Barang - Kartu Inventaris Ruang - Kartu Inventaris Barang	- ada, 3 jenis	-
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 141.205.704, - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 15.158.748.224,23	1%	-
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	- Ada sebanyak 2 jenis 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan	- ada sebanyak 2 jenis	-
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	- Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang Pelayanan Kepegawaian	- ada	-

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pengembangan, Inspektorat & Fungsi Penunjang Lainnya)

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah	1 Program	DPPA BPKAD KOTA JAMBI
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	25. SOP Penyusunan Standar Satuan Harga 26. SOP Penyusunan Analisa Standar Belanja 27. SOP Monitoring Dan Evaluasi Pendapatan Daerah 28. SOP Penyusunan Perda Dan Perkada TTG Perubahan APBD 29. SOP Penyusunan Perda Dan Perkada 110 APf3D 30. SOP Penyusunan DPAIDPPA Anggaran Kas 31. SOP Penerbitan SPD 32. SOP Penyusunan Laporan Keuangan 33. SOP Pengauan Uang Persediaan 34. SOP Penerbitan (GU-LS) Dan SPM GU-LS 35. SOP Pembayaran Dana Gaji Pegawai 36. SOP Pembayaran TBK (Tunjangan Beban Kerja) 37. SOP Pengajuan SPD (Surat Penyediaan Dana) 38. SOP Rekonsiliasi DAK 39. SOP Penyusunan LKPD 40. SOP Penyusunan Laporan Penerirnaan Pemkot 41. SOP Verifikasi Neraca SKPD 42. SOP Verifikasi Laporan Realisasi Anggaran SKPD 42. SOP Verifikasi Laporan Operasional SKPD 43. SOP Verifikasi Laporan Penerimaan SKPD 44. SOP Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Penearian Dana Ganti Uang (SP2D-GU) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi 45. SOP Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencarian Dana Tambah	Ada 58 SOP	SOP BPKAD Kota Jambi

						Uang (SP2D-GU) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi 46. SOP Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)-LS Gaji Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi 47. SOP Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)-LS Tunjangan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi 48. SOP Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)-LS PPKD Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi 49. SOP Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi 50. SOP Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D-UP) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi 51. SOP Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Belanja Langsung (SP2D-LS) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi 52. SOP Pembuatan SK. Walikota Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang 53. SOP Peminjaman BPKB/SertifikatiDokumen Kepemilikan Aset 54. SOP Pengembalian Peminjaman BPKB/SertifikatiDokumen Kepemilikan Aset 55. SOP Pemunsnahan Barang Milik Daerah 56. SOP Rekonsiliasi Laporan Hasil Pengadaan Barang 57. SOP Pembuatan Draft Usulan Penghapusan Barang/Aset yang dapat Di Proses Penghapusannya Lewat Tim Penghapusan Aset Daerah Kota Jambi 58, SOP Proses Persetujuan Pinjam Pakai		
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Keberadaan Peraturan(Perda/Perkada)yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Perda Kota Jambi No. 8 tahun 2012 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan	Ada	Bagian Hukum
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah Pejabat Dilingkungan BPKAD 21 Orang ; Jumlah Pejabat yang harus ada di BPKAD 21 Orang	100%	21 orang / 21 orang : 100%; DUK BPKAD Kota Jambi
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada Jabatan fungsional BPKAD	Tidak Ada	BPKAD tidak ada jabatan fungsional

4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS BPKAD 45 Orang ; Jumlah PNS Kota = 6.213 orang	0.72%	DUK BPKAD Kota Jambi dan BKPSDMD Kota Jambi
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan 7 orang; - Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada 21 orang	33%	DUK BPKAD Kota Jambi dan BKPSDMD Kota Jambi
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan 21 Orang ; Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada 21 Orang	100%	DUK BPKAD Kota Jambi dan BKPSDMD Kota Jambi
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Renstra, Renja , RKA BPKAD Tahun 2019	ada	Renstra, Renja , RKA BPKAD Tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMDx100%	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah 7 Program; Jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD 7 Program	100%	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah 7 Program; Jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah7 Program	100%	Dokumen RKA BPKAD Tahun 2019 DAN RENJA DPA BPKAD Tahun 2019
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerahx100%	Jumlah Program RKA BPKAD yang diakomodir dalam DPA BPKAD sebanyak 7 Program; Jumlah program dalam DPA BPKAD 7 Program;	100%	Dokumen RKA BPKAD Tahun 2019 DAN DOKUMEN DPA BPKAD Tahun 2019
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Rp. 19.329.664.188 / Rp.1.846.258.216.875 * 100% = 1,04%	1,04%	APBD BPKAD Tahun 2019
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja Perangkat Dearah / Realisasi Belanja APBD = Rp. 14.892.960.939/Rp. 1.661.380.787.461.83 *100%= 0.90%	0,90%	Sumber Data Dari APBD tahun 2019 (terakhir)
			15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	Total Belanja Langsung 10.244.845.230; Total Belanja Perangkat Daerah 14.892.960.939	68,78%	Rp.10.244.845.230/Rp.14.892.960.939
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat	Total Belanja Tidak Langsung 4.648.115.709; Total Belanja	31,21%	Rp.4.648.115.709/14.892.960.939

					Daerah x 100%	Perangkat Daerah 14.892.960.939		
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	ada 3 jenis	laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk) Tahun 2019
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada Inventarisasi barang/aset di BPKAD	ada	Daftar mutasi BMD BPKAD tahun 2019
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Jumlah asset yang tidak digunakan BPKAD sebesar Rp. 4.801.703.396,90 total asset yang dikuasai BPKAD Rp. 14.889.456.861,17	32%	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Papan Pengumumam, website BPKAD	2	Papan Pengumumam, website BPKAD
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Survey Kepuasan masyarakat tidak ada	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pengembangan, Inspektorat & Fungsi Penunjang Lainnya)

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran (APBD-P) sebesar Rp. 4.195.268.000,- Realisasi sebesar Rp. 3.205.386.800,-	1 Program	-
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	-	-	-
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Keberadaan Peraturan(Perda/Perkada)yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	- Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang PBB Perkotaan - Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang BPHTB - Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah	Ada	Sumber Data di Bagian Hukum
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 21 jabatan - Jabatan yang harus ada sebanyak 21 jabatan	100%	- Sumber Data DUK BPPRD
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak ada Jabatan Fungsioanal Dalam Struktur Organisasi	Tidak ada	Sumber Data : Bagan Struktur Organisasi BPPRD Kota Jambi
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	- Jumlah PNS BPPRD sebanyak 62 personel - Jumlah PNS Kota Jambi sebanyak 6.213 personel	0,1%	- Sumber data mengacu pada data DUK BPPRD Kota Jambi per 31 Desember 2019 dan data yang berasal dari BKDSDMD Kota Jambi
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim sebanyak 10 orang - Pejabat yang ada sebanyak 21 orang	47,61%	- Sumber data mengacu pada data DUK BPPRD Kota Jambi per 31 Desember 2019
			8	Pejabat yang telah memenuhi	Jumlah pejabat yang memenuhi	- Pejabat yang memenuhi syarat	100%	- Sumber Data daftar hadir pejabat dan

				persyaratan kepengkatan	persyaratan kepengkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	kepengkatan 21 orang - Pejabat yang ada sebanyak 21 orang		struktur organisasi BPPRD Kota Jambi
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Dokumen perencanaan OPD BPPRD Kota Jambi ada 3 dokumen : Renstra BPPRD Tahun 2008 - 2023 Renja BPPRD Tahun 2019 RKA BPPRD Tahun 2019	3 Dokumen	- Sumber Data mengacu Dokumen Renstra BPPRD tahun 2018-2023, Renja dan RKA Tahun 2019 BPPRD Kota Jambi
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMDx100%	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja BPPRD Kota Jambi sebanyak 7 program - jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD 7 program	100%	- Sumber data mengacu pada dokumen Renja BPPRD Tahun 2019
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program Renja BPPRD yang diakomodir dalam RKA BPPRD sebanyak 7 program - Program dalam RKA BPPRD Kota Jambi sebanyak 7 program	100%	Sumber data mengacu pada dokumen RKA dan Renja BPPRD Tahun 2019
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerahx100%	- Jumlah Program RKA BPPRD yang di akomodir dalam DPA BPPRD sebanyak 7 program - Jumlah program dalam DPA BPPRD sebanyak 7 program	100%	- Sumber data dari dokumen RKA BPPRD dan dokumen DPA BPPRD tahun 2019
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran BPPRD Kota Jambi sebesar Rp. 26.657.134.385,- - Total Anggaran Belanja APBD Kota Jambi sebesar Rp. 1.846.258.216.875,-	1,44%	- Sumber Data APBD Kota Jambi Tahun 2019
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja BPPRD Kota Jambi sebesar Rp. 23.767.170.477,- - Realisasi Belanja APBD Kota Jambi sebesar Rp. 1.661.380.878.461,83	1,43%	- Sumber Data dari Realisasi APBD Kota Jambi Tahun 2019
			15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung BPPRD Kota Jambi sebesar Rp. 6.817.302.960,- - Realisasi Belanja BPPRD Kota Jambi sebesar Rp. 23.767.170.477,-	28,68%	- Sumber Data dari Laporan Realisasi Anggaran BPPRD Kota Jambi Tahun 2019
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung BPPRD Kota Jambi sebesar Rp. 16.949.867.517,- - Realisasi Belanja BPPRD Kota Jambi sebesar Rp. 23.767.170.477,-	71,32%	- Sumber Data dari Laporan Realisasi Anggaran BPPRD Kota Jambi Tahun 2019
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA,	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan ada sebanyak 3 Jenis 1. Neraca 2. LRA 3. CaLK	Ada sebanyak 3 jenis	Sumber Data Bagian Keuangan BPPRD Kota Jambi

				Calk)	berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)			
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Inventarisasi barang/aset BPPRD Kota Jambi	Ada, Daftar Aset Tetap dan Penyusutannya	Sumber data dari BPKAD Kota Jambi
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Aset yang tidak digunakan sebesar Rp. 935.725.995,- - Aset yang dikuasai oleh BPPRD Kota Jambi sebesar Rp. 12.203.676.744,-	8%	Sumber data : Berita Acara Inventarisasi Barang/Aset
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	1. Papan Pengumuman 2. Kotak Saran/Pengaduan 3. Website BPPRD Kota Jambi : http://bpprd.kotajambi.web.id/ 4. SMS gateway 5. Anjungan Informasi Tagihan PBB online 6. Spanduk 7. Banner 8. Brosur 9. Pengumuman di Media Massa 10. Mobil Keliling	jumlah sebanyak 10 jenis	-
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	-	-	-

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Sekretariat DPRD
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pengembangan, Inspektorat & Fungsi Penunjang Lainnya)

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 2. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan DPRD	2 Program	DPA Sekretariat DPRD Kota Jambi T.A. 2019
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	- SOP Fasilitasi Penyusunan Undangan Rapat Paripurna DPRD - SOP Risalah Rapat Paripurna - SOP Fasilitasi Penyelenggaraan Paripurna PAW - SOP Fasilitasi Rapat Pansus Dewan - SOP Fasilitasi Rapat BAPEMPERDA - SOP Penyusunan Pelaksanaan Hasil Reses	1 Dokumen	-
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Keberadaan Peraturan(Perda/Perkada)yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Nihil
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 16 Jabatan - Jabatan yang harus ada sebanyak 17 Jabatan	94%	DUK Sekretariat DPRD Kota Jambi per Desember 2019
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Arsiparis Ahli Muda	Ada	-
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	- PNS Sekretariat DPRD Kota Jambi Sebanyak 41 Orang - Total PNS Kota Jambi Sebanyak 6.213 Orang	0,65%	DUK Sekretariat DPRD Kota Jambi per Desember 2019
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan 11 Orang - Pejabat yang ada sebanyak 17 Orang	64,70%	DUK Sekretariat DPRD Kota Jambi per Desember 2019

			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 16 Orang - Pejabat yang ada sebanyak 17 Orang	94%	DUK Sekretariat DPRD Kota Jambi per Desember 2019
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	- Renja Sekretariat DPRD - Renstra Sekretariat DPRD - RKA Sekretariat DPRD	3 Dokumen	-
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMDx100%	-Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah 9 Program - Jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD 9 Program	100%	Renja Sekretariat DPRD Kota Jambi T.A. 2019
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Sekretariat DPRD Kota Jambi yang diakomodir dalam RKA Sekretariat DPRD Kota Jambi 9 Program - Program dalam RKA Sekretariat DPRD sebanyak 9 Program	100%	RKA Sekretariat DPRD Kota Jambi T.A. 2019
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerahx100%	- Jumlah Program RKA Sekretariat DPRD Kota Jambi yang diakomodir dalam DPA Sekretariat DPRD sebanyak 9 Program - Program dalam DPA Sekretariat DPRD Kota Jambi sebanyak 9 Program	100%	DPA Sekretariat DPRD Kota Jambi T.A. 2019
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total anggaran SKPD, sebesar Rp.81.088.864.522,- - Total Belanja APBD sebesar Rp. 1.846.258.216.875,-	4,3%	DPA Sekretariat DPRD Kota Jambi T.A. 2019
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp. 67.855.391.920,- - Total Realisasi Belanja APBD Rp. 1.661.380.787.461,-	4,08%	-
			15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung SKPD, sebesar Rp. 39.523.726.477,- - Realisasi Belanja SKPD, sebesar Rp. 67.855.391.920,-	58.25%	LRA Sekretariat DPRD Kota Jambi Tahun 2019
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Total Belanja Tidak Langsung SKPD, sebesar Rp. 28.331.665.443,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 67.855.391.920,-	41.75 %	LRA Sekretariat DPRD Kota Jambi Tahun 2019
		Laporan keuangan Perangkat	17	Keberadaan laporan keuangan	Ada atau tidak ada laporan	LRA Sekretariat DPRD Kota	1 Dokumen	-

		Daerah		Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Jambi Tahun 2019		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	-	-	-
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan sebesar Rp. 4.115.855.533,34,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp. 41.938.199.330,70,-	10%	KIB Sekretariat DPRD Kota Jambi Tahun 2019
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Pengumuman di Media Massa	3 Jenis Prasarana Informasi	-
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	-	-	-

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Inspektorat
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pengembangan, Inspektorat & Fungsi Penunjang Lainnya)

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal, Pembinaan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1 Program	Sumber Data Inspektorat
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada 27 SOP, yaitu : 1. Penyusunan Peta Kompetensi 2. Pengelolaan Surat Masuk. 3. Pengelolaan Surat Keluar. 4. Pelaksanaan Rapat Pegawai Inspektorat 5. Penyusunan Rencana Kerja 6. Penyusunan Laporan Kinerja 7. Penyimpanan Barang 8. Pengeluaran Barang. 9. Pembuatan Rekomendasi Hukuman Disiplin 10. Penyusunan Rencana Diklat 11. Keg. Pend. Kantor Sendiri (PKS) 12. Pengelolaan Surat Pengaduan. 13. Telaahan atas Surat Pengaduan. 14. Pembuatan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat. 15. Pengawasan Tahunan Inspektorat Berbasis Resiko 16. Pembuatan Surat Tugas Pengawasan 17. Pelaksanaan Surat Tugas Pengawasan Reguler 18. Pelaksanaan Surat Tugas Pemeriksaan Khusus. 19. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler 20. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus. 21. Ikhtisar Hasil Pengawasan 22. Mekanisme Koordinasi dengan Instansi Eksternal 23. Mengikuti Diklat dengan Biaya Sendiri 24. Layanan Konsultasi (Di Dalam) 25. Layanan Konsultasi (Di Luar) 26. Penerimaan Tamu 27. Kenaikan Gaji Berkala	Ada SOP	Sumber Data Inspektorat

2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Keberadaan Peraturan(Perda/Perkada)yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Peraturan Walikota Jambi Nomor 396 Tahun 2018 merupakan turunan dari Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019	Ada	yaitu berupa perwal mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) 9 Jabatan ; Jumlah jabatan yang ada 9 Jabatan.	100%	9/9 x 100% = 100% ; sumber data inspektorat Kota Jambi
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Jabatan Fungsional di Inspektorat 30 Orang	Ada	Sumber Data Inspektorat
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	JUmlah PNS Inspektorat 56 orang; Jumlah PNS Kota Jambi 6.213 orang	0,90%	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan 7 orang Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada 9 Orang	77%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan 9 Orang Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada 9 Orang	100%	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Dokumen Perencanaan : Renstra, Renja, RKA	Ada	Sumber Data Inspektorat
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMDx100%	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah 8 Program ; Jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD : 8 Program	100%	Sumber Data Inspektorat
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah 8 Program ; Jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah 8 Program	100%	Sumber Data Inspektorat
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerahx100%	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah 8 Program ; Jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah 8 Program	100%	Sumber Data Inspektorat

6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Anggaran Inspektorat Rp.11.962.639.323 ; Total Belanja APBD Rp.1.846.258.216.875	0,64%	Sumber Data Inspektorat dan BPKAD
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja Inspektorat Rp.11.334.043.854 ; Realisasi Belanja APBD Rp.1.661.380.787.461,83	0,68%	Sumber Data Inspektorat dan BPKAD
			15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	Total Belanja Langsung Rp.5.048.161.140 ; Total Realisasi Belanja Rp.11.334.043.854	44%	
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Total Belanja Tidak Langsung Rp.6.285.882.714 ; Total Realisasi Belanja Rp.11.334.043.854	55%	
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan(Neraca, LRA, Calk)	Ada	Sumber Data Inspektorat
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Inventarisasi aset telah dilaksanakan	Ada	Sumber Data Inspektorat
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Jumlah aset yang tidak digunakan : Rp.324.729.000 ; Jumlah aset Inspektorat : Rp. 8.061.369.209,99	4%	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Papan Pengumuman	1	Sumber Data Inspektorat
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Survey Kepuasan Masyarakat	Tidak Ada	Terkahir dilaksanakan tahun 2017

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Alam Barajo
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pengembangan, Inspektorat & Fungsi Penunjang Lainnya)

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Anggaran: Rp.6.926.102.000,- Realisasi: Rp. 6.722.315.630,-	1 Program	Alam Barajo
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	1.SOP Laporan Kependudukan 2.SOP Pengelolaan Penerimaan PBB 3.SOP Surat Keterangan	3 SOP	Alam Barajo
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Keberadaan Peraturan(Perda/Perkada)yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada Terdiri dari: 1. Perwal Nomor 5 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN Tanggal 27 Maret 2015, 2. PERDA Nomor 14 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH	Ada	Alam Barajo
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah Jabatan Yang ada : Jumlah Jabatan Yang terisi:	100%	Alam Barajo
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Struktur Organisasi	Tidak ada	Alam Barajo
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS Kecamatan Alam Barajo :65 Jumlah PNS Kota Jambi :6.213	0.10%	Alam Barajo
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi Diklatpim: 16 orang Jumlah Pejabat di Kecamatan Alam Barajo: 35 orang	45,71%	Alam Barajo

			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan: 46 orang Jumlah Total Pejabat Kecamatan Alam Barajo: 35 orang	131,4% (46/35 x 100%)	Alam Barajo
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	- Adanya Dokumen Perencanaan Perngkat Daerah Berjumlah 3 Dokumen Yaitu: 1.RENSTRA, 2.RENJA, 3.RKA	3 Dokumen	Kecamatan Alam Barajo
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMDx100%	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah 8 Prorgam, Jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah 8 Program	100% (8 Program RKPD/8 Prorgam RENJA x 100%)	Alam Barajo
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program dalam RENJA 8 Program Jumlah Program dalam RKA 8 Program	100%	Alam Barajo
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerahx100%	Jumlah Program dalam RKA 8 Program Jumlah Program dalam DPA 8 Program	100%	Alam Barajo
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD sebesar Rp.14.964.000.222,00 Total Belanja APBD Rp. 1.846.258.216.875	0,81%	Alam Barajo
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja Perangkat Daerah : Rp. 14.103.514.576,00 Realisasi Belanja APBD : Rp. 1.661.386.787.461	0,84%	Alama Barajo
			15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	Total Belanja Langsung : Rp. 8.232.682.357,- Total Belanja Perangkat Daerah : Rp. 14.964.000.222,-	0.55%	Alam Barajo
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Total Belanja Tidak Langsung : Rp. 5.870.832.219 Total Belanja Perangkat Daerah : Rp. 14.964.000.222	0.39%	Alam Barajo
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan Keuangan : 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	3 Dokumen	Alam Barajo
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Berita Acara Rekonsiliasi Aset	Ada	Alam Barajo

		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Jumlah asset yang tidak digunakan Kecamatan Alam Barajo :(Aset Lain) Asset yang dikuasai Kecamatan Alam Barajo :	-	Alam Barajo
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	- Papan Pengumuman - Leaflet - Pos Pengaduan - Media Sosial	4 Jenis	Alam Barajo
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Kuesioner Terhadap Pelayanan Umum ke 494 responden	Ada	Alam Barajo

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Danau Sipin
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pengembangan, Inspektorat & Fungsi Penunjang Lainnya)

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	-Program Pemberdayaan Masyarakat - Nilai Anggaran Rp. 5.255.032.000 -Realisasi Rp. 4.943.888.930	-1 Program	-
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	- SOP tentang PATEN Danau Sipin	1	-
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Keberadaan Peraturan(Perda/Perkada)yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	-perda kota jambi no.09 thn. 2016 ttg perubahan perda kota jambi no. 46 thn, 2002 ttg pedoman pembentukan rukun tetangga (RT) dan lemabaga pemberdayaan masyaeakat (kota jambi tgn. 2016 no. 09) -perda kota jambi no. 14 thm 2016 pembentukan dan susunan perangkat daerah (lembaran daerah kota jambi thn 2016 no.14) -perwal jambi n0. 13 thn 2017 ttg pedoman dan tata cara pemilihan rukun tetangga (RT) dan lembaga pembedayaan masyarakat (berita daerah kota jambi thn. 2017 no. 13	-A	-
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	-Jabatan yang ada 34 orang - jabatan yang harus ada sebanyak 34 orang	-100%	-
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	-Arsiparis Ahli Pertama	-Ada	-
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	-PNS Perangkat daerah sebanyak 47 orang -Total PNS Kota sebanyak 6162 orang	-0,76%	-

		yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	-Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim 14 orang -Pejabat yang ada sebanyak 34 orang	-41,18%	-
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	-Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 4 orang -Pejabat yang ada 34 orang	-12%	-
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Kebudayaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	-Renja thn 2019 -Renstra thn 2019-2023 -RKA 2019 -	-Ada	-
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMDx100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam renja perangkat daerah sebanyak 8 program	100%	-
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	-Program RENJA perangkat daerah yang diakomodir dalam RKA perangkat Daerah, sebanyak 8 program -Program dalam RKA perangkat Daerah, sebanyak 8 program	100%	-
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerahx100%	-jumlah program RKA perangkat daerah yang diakomodir dalam DPA perangkat Daerah, sebanyak 8 program -jumlah program dalam DPA perangkat Daerah, sebanyak 8 program	-100%	-
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Alokasi Daerah Rp. 11.966.903.366 dibagi APBD 1.846.258.216.875 X 100%	0,06%	-
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	-Realisasi belanja perangkat daerah sebesar Rp. 11.263.705.265 -Total realisasi belanja APBD sebesar Rp. 1.661.386.787.461	-0,67%	-
			15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	-Realisasi belanja langsung perangkat Daerah sebesar Rp.6.625.433.623 -Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp. 11.263.705.265	-58,82%	-
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	-Realisasi Belanja Tidak langsung perangkat Daerah sebesar Rp. 4.638.271.642 -Total Realisasi belanja perangkat Daerah sebesar Rp. 11.263.705.265	-41,18%	-

		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	-LRA 13 per Desember 2019 - LRA 64 per Desember 2019 - NERACA per Desember 2019 - CALK	-4 Jenis	-
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	-Berita acara rekonsiliasi aset / barang milik daerah (BMD) intra komtabel Kecamatan Danau Sipin thn 2019	-Ada	-
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	-Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.0 -Asset yang dikuasi peragkat daerah, sebesar Rp. 547.382.354	-100%	-
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	-Struktur Pelayanan -Sosial Media -Tempat Pengaduan -Kotak Saran -Ruang Menyusui -Pojok Baca - Tempat Antri	-9 Jenis	-
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	- IUMK -IMB -Rekom SITU	-Ada	-

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Danau Teluk
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pengembangan, Inspektorat & Fungsi Penunjang Lainnya)

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	-Program Pemberdayaan masyarakat 1. Anggaran Rp. 4.348.715.000;- 2. Realisasi Rp. 3.550.298.963;-	-100%	-Kecamatan Danau Teluk
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	-SOP Pelayanan - Sebanyak 16 SOP	-100%	-Kecamatan Danau Teluk
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Keberadaan Peraturan(Perda/Perkada)yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	1. Perda Kota Jambi No. 09 Tahun 2016 Tentang Perubahan Perda Kota Jambi No. 46 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Jambi, No 09 Tahun 2016 2. Perwal Kota Jambi No. 13 Tahun 2017	-100%	-Kecamatan Danau Teluk
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	-Jabatan Struktural Kecamatan ada 34 - Yang terisi 34 Jabatan - Struktur Organisasi Kec. Danau Teluk	-100%	-Kecamatan Danau Teluk
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	-Tidak ada Jabatan Fungsional	-0%	-Kecamatan Danau Teluk
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	-Jumlah PNS Kota Jambi Sebanyak 6213 Jumlah PNS di kecamatan Danau Teluk Sebanyak 41 Orang Jumlah PNS mengikuti Diklat	-100%	-Kecamatan Danau Teluk
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total	-Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim IV Sebanyak 7 Orang - Pejabat yang Belum Mengikuti	-100%	-Kecamatan Danau Teluk

					pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Diklat Sebanyak 34 Orang = 0.2 %		
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	-Pejabat yang Memenuhi Syarat Kepangkatan Sebanyak 34 Orang	-100%	-Kecamatan Danau Teluk
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	-adanya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Berjumlah 3 Dokumen Yaitu : 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	-100%	-Kecamatan Danau Teluk
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMDx100%	-Adanya Program RKPD Yang di Akomodir dalam Renja sebanyak 7 Program	-100%	-Kecamatan Danau Teluk
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	-Jumlah Program renja yang diakomodir dalam RKA	-100%	-Kecamatan Danau Teluk
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerahx100%	-Jumlah Program RKA Penrangkat daerah yang di akomodir dalam DPA Perangkat ada 7 Program -Jumlah Program dalam DPA ada 7 Program	-100%	-Kecamatan Danau Teluk
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	-Total Anggaran APBDSebesar Rp. 1.846.258.216.875;- -Total Anggaran Kecamatan Danau Teluk Sebesar Rp. 10.219.074.198;-X 100%=0.05%, LRA 13	0.55%	-Kecamatan Danau Teluk
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	-Realisasi Belanja APBD sebesar Rp. 1.661.386.787.461;- Realisasi Belanja Kec. Danau Teluk sebesar Rp.9.092.463.574 x 100% =4.92 % LRA.13	0.54%	-Kecamatan Danau Teluk
			15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	-Total Belanja Lansung sebesar Rp.4.749.935.567 Total Realiasi Belanja perangkat Rp. 10.219.074.198 X 100% =0.46 % LRA. 13	0.46%	-Kecamatan Danau Teluk
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar RP.4.342.528.007 Total Realiasi Perangkat Daerah Sebesar Rp. 10.219.074.198 x 100 % = 0.42 % LRA.13	0.42%	-Kecamatan Danau Teluk

		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	- Ada Data NERACA, LRA dan Calk	-100%	-Kecamatan Danau Teluk
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	-adanya Kartu Inventaris Barang/ aset - BA Rekon aset dengan BPKAD	-100%	-Kecamatan Danau Teluk
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	-Jumlah aset yang tidak digunakan sebesar Rp.291.539.000 - Jumlah Aset yang di Kuasai sebesar Rp.8.046.858.010.59	3.62%	-Kecamatan Danau Teluk
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	-1. Papan Pengumuman 2. Pengumuman Media Online, Facebook, Instagram, Wa 3. Brosur 4. Mobil Keliling 5. Pos Pengaduan	-100%	-Kecamatan Danau Teluk
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	- Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap pelyanan publik berupa (Quisioner) yang diberikan Kepada Masyarakat	-100%	-Kecamatan Danau Teluk

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Jambi Selatan
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pengembangan, Inspektorat & Fungsi Penunjang Lainnya)

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program Pemberdayaan Masyarakat	1 Program	Sumber Data dari Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan (RKA Kecamatan Jambi Selatan Tahun 2019)
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	- SOP Pelayanan Umum - SOP Perencanaan dan Keuangan	ADA	Sumber data dari sekretariat kecamatan dan seksi pelayanan umum kecamatan
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Keberadaan Peraturan(Perda/Perkada)yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	- Perwal 06/2015, tentang perubahan atas perwal 42/2014 tentang pelimpahan sebagian urusan dari walikota ke camat - Perwal 05/2015, tentang penyelenggaraan PATEN - Perwal 21/2017, tentang petnjuk teknis bangun kelrahan secara intensif dan terpadu yang berazaskan swadaya	TIDAK ADA	Sumber data dari Bagian Hukum Setda Kota Jambi
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	34 Jabatan Eselon	100%, 34/34*100%=100%	Sumber data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (DUK Kecamatan)
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah - Bendahara Pengeluaran	Ada	Sumber data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (DUK Kecamatan)
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	- Jumlah PNS Kecamatan Jambi Selatan 56 Pegawai - Jumlah PNS Kota Jambi 6.132 Pegawai	0,55%, 56/6.132*100%=0,55%	Sumber data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (DUK Kecamatan) dan SIMPEG BKPSDMD
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan 6 pejabat - Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada 34 pejabat	17,65%, 6/34*100%=17,65%	Sumber data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (DUK Kecamatan)

			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan 34 pejabat - Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada 34 pejabat	100%, $34/34 \times 100\% = 100\%$	Sumber data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (DUK Kecamatan)
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - RKA - RENJA - RENSTRA	ADA	Sumber data dari Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMDx100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah : 1 (Pemberdayaan Masyarakat ; Pelayanan umum kecamatan, Peningkatan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan masyarakat, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat kelurahan) - Jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD : 4 (Pelayanan umum kecamatan, Peningkatan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan masyarakat, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat kelurahan)	100%, $4/4 \times 100\% = 100\%$	Sumber data Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, (Renja)
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah ada 7 Program - Jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah ada 8 Program	87,50%, $7/8 \times 100\% = 87,50$	Sumber data dari Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan (RKA dan Renja)
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerahx100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah ada 8 Program - Jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah 8 Program	100%, $8/8 \times 100\% = 100\%$	Sumber data dari Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan (RKA dan DPPA)
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Alokasi anggaran Perangkat Daerah Rp. 12.563.180.537,- - Total APBD Rp. 1.846.258.216.875,-	0.06%	Sumber data dari Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan (DPPA)
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Dearah Rp. 11.707.025.800,- - Realisasi Belanja APBD Rp.1.661.386.787.461	0.70%	Sumber data dari Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan
			15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Total Belanja Langsung Rp. 6.385.629.416,- - Total Belanja Perangkat Daerah Rp. 11.707.025.800,-	54,55%, $6.385.629.416/11.707.025.800 \times 100\%$	Sumber data dari Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan (LRA)

			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Total Belanja Tidak Langsung Rp. 5.321.396.384,- - Total belanja Perangkat Daerah Rp. 11.707.025.800,-	45,45%, 5.321.396.384/11.707.025.800*100%	Sumber data dari Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan (LRA)
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan Keuangan Perangkat Daerah dengan komponen (Neraca, LRA, Calk)	Ada	Sumber data dari Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada	Sumber data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Berita acara Validasi BMD tahun 2018)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah Rp. 353.599.000,- - Total asset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp. 8.733.948.364.73,-	4.48%	Sumber data dari Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan (Neraca)
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	sarana informasi, terdiri dari papan informasi dan akun medsos dan web	6 fasilitas/prasarana	sarana informasi, terdiri dari papan informasi dan akun medsos dan web
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada	Sumber data dari Seksi Pelayanan Umum (sarana survey pelayanan umum)

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Jambi Timur
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pengembangan, Inspektorat & Fungsi Penunjang Lainnya)

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1 Program , Pemberdayaan Masyarakat, Anggaran tahun 2019 sebesar Rp.7.389.017.000,00 dan realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 6.932.001.622,00	1 Program	-
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada Standard Operating Procedure (SOP) yaitu : (1.) Pelayanan Perizinan (2.) Pelayanan Non Perizinan (3.) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kec. Jambi Timur (4.) Standar Penyelenggaraan E-Pelayanan dan E-Yankel pada PATEN Kec. Jambi Timur	4 Standard Operating Procedure (SOP)	-
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Keberadaan Peraturan(Perda/Perkada)yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	(1)Perda Kota Jambi nomor 09 tahun 2016 tentang perubahan perda kota jambi nomor 46 tahun 2002 ttg pedoman pembentukan rukun tetangga (RT) dan lembaga pemberdayaan masyarakat (kota jambi tahun 2016 no.09) (2) Perda Kota Jambi nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (lembaran daerah kota jambi tahun 2016 nomor 14) (3) Perwal Jambi nomor 13 tahun 2017 ttg pedoman dan tata cara pemilihan rukun tetangga (RT) dan lembaga pemberdayaan masyarakat (berita daerah kota jambi tahun 2017 no 13) (4) Perwal jambi nomor 61 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja pada Kecamatan Tipe A dan Tipe B Kota Jambi	2 perda dan 2 perwal	-

3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jabatan yang ada sebanyak 54 , Jabatan yang harus ada, sebanyak 55	98,18%	-
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada	Tidak Ada	-
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	PNS Kecamatan Jambi Timur sebanyak 70 Personil dan Total PNS Kota sebanyak 6.213 personil	1,13%	-
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim sebanyak 20 orang dan Pejabat yang ada, sebanyak 54 org.	37 %	-
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan sebanyak 54 org dan Pejabat yang ada sebanyak 54 jabatan.	100%	-
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada, Dokumen dimaksud sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : (1.) Renstra Perangkat Daerah (2.) Renja Perangkat Daerah (3.) RKA Perangkat Daerah	3 Jenis Dokumen	-
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMDx100%	Jumlah program dalam RKPD sebanyak 8 program, dan Jumlah Program dalam renja sebanyak 8 Program	100 %	-
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Program Renja Perangkat Daerah 2019 sebanyak 8 Program dan Program RKA Perangkat Daerah 2019 sebanyak 7 Program	114 %	-
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerahx100%	Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah sebanyak 7 Program dan Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah 2019 sebanyak 7 Program	100 %	-
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Perangkat Daerah sebesar Rp. 16.469.638.019,00 dan Total Belanja APBD sebesar Rp. 1.846.258.216.875,00	0,89 %	16.469.638.019,00/1.846.258.216.875,00 *100% = 0,89%
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi	Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp.	0,92%	-

				Belanja APBD	Belanja APBD x 100%	15.375.518.370,00 dan Total Realisasi Belanja APBD sebesar Rp. 1.661.386.787.461		
			15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah sebesar Rp. 8.966.658.574,00 dan Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 15.375.518.370,00	58,32%	-
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah sebesar Rp. 6.408.859.796,00 dan Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 15.375.518.370,00	41,68%	-
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan Keuangan sebanyak 6 jenis sebagai berikut : (1.) Neraca (2.) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (3.) CALK	ada, sebanyak 3 jenis	-
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Berita Acara Rekonsiliasi Aset	Ada, sebanyak 1 jenis	-
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 312.223.989,- dan Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 7.328.038.911,01	4,26 %	-
8	PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenis Fasilitas Prasarana Partisipasi Masyarakat sebagai berikut : (1.) Papan Pengumuman (2.) Pos Pengaduan (3.) Mobil keliling (4.) Website : www.kecjambitmur.go.id	sebanyak 4 jenis	-
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, survey kepuasan tentang Pelayanan Kecamatan (PATEN)	ada	-

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Jelutung
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pengembangan, Inspektorat & Fungsi Penunjang Lainnya)

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	- Program Pemberdayaan Masyarakat dengan Anggaran sebesar Rp. 6.987.659.000,- dan Realisasi Belanja Sebesar Rp. 6.445.114.199,-	1 Program	Sumber Data Dari LRA 13, DPA DAN DPPA
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Pelayanan Perizinan : 1. SOP IMB Kurang dari 70 M2 2. SOP izin Usaha Mikro dan Kecil Pelayanan Non Perizinan : 1. Surat Rekomendasi Izin Usaha 2. Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 3. Surat Keterangan Domisili Usaha 4. Surat Keterangan Pembuatan Pasport 5. Surat dispensasi Nikah 6. Surat izin Keramaian 7. Surat keterangan Bersih Diri (SKBD) 8. Surat Keterangan Tidak Mampu 9. Surat Keterangan Ahli Waris 10.Surat Izin Penelitian Mahasiswa	12 SOP	Sumber data Peraturan Menteri No.4 Tahun 2010, Peraturan Walikota Jambi No. 05 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam negeri No. 08 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kot Jambi No. 06 Tahun 2002
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Keberadaan Peraturan(Perda/Perkada)yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	- Perda Kota Jambi No. 09 Tahun 2016 tentang Perubahan Perda Kota Jambi No. 46 Tahun 2002 tentang pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat(kota jambi tahun 2016 No. 09) - Perda Kota Jambi No. 14 Tahun 2016 Pembentukan dan susunan Perangkat daerah (lembaga daerah kota jambi tahun 2016 No. 14)- Perwal Kota Jambi No. 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan tata cara Pemilihan Rukun Tetangga (RT) dan lelabaga Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kota Jambi tahun 2017 No. 13	- ada Perda/Perwal yang Meliputi : Perda Kota Jambi No. 09 Tahun 2016, Perda Kota Jambi No. 14 Tahun 2016, Perwal Kota Jambi No. 13 Tahun 2017	- sumber data di bagian hukum

3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 38 Jabatan - Jabatan yang harus ada sebanyak 44 Jabatan	86,36%	Sumber data dari DUK Kecamatan Jelutung
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	- tidak ada	- tidak ada	- tidak ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	-PNS SKPD Sebanyak 60 Personil - Total PNS Kota Jambi sebanyak 6213	0,96%	-Sumber data mengacu pada Data BKD /DUK Kecamatan Jelutung
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah Mengikuti Diklatpim Sebanyak 13 Orang - Pejabat yang ada Sebanyak 38 Orang	34,21 %	- Sumber data mengacu pada data DUK Kecamatan Jelutung
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang Memenuhi Syarat Kepangkatan Sebanyak 44 Orang - Jabatan yang ada Sebanyak 38 Orang	86,36 %	Sumber Data Mengacu Pada data DUK Kecamatan
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	- Dokumen Perencanaan yang ada tahun 2019 sebanyak 3 Dokumen yang terdiri dari - RKA - Renstra - Renja	3 Jenis Dokumen (Renja, Renstra dan RKA)	Sumber data berasal dari dokumen perencanaan Renja, Renstra dan RKA
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMDx100%	- Program RKPD yang diakomodir Dalam Renja SKPD sebanyak 8 Program - Program Renja SKPD yang ditetapkan Sebanyak 8 Program	100%	- Sumber data mengacu pada Renja Kecamatan Jelutung
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 8 Program - Program dalam RKA SKPD Sebanyak 8 Program	100%	Sumber data Perangkat daerah Mengacu Dokumen RKA Kecamatan Jelutung Tahun 2019 dan Renja Kecamatan Jelutung
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerahx100%	- Program Renja Kecamatan Jelutung yang di Akomodir dalam DPA Kecamatan Jelutung sebanyak 8 Program - Program dalam DPA Kecamatan Jelutung sebanyak 8 Program	100%	- Sumber data mengacu pada Renja Kecamatan Jelutung dan DPA Kecamatan Jelutung Kota Jambi
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Kecamatan Jelutung sebesar Rp. 14.924.404.203 - Total Belanja APBD sebesar Rp. 1.846.258.216.875	0,80%	Sumber data Mengacu pada LRA Permendagri 13
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Kecamatan Jelutung Rp. 13.627.041.587,- -	0.82%	Kecamatan Jelutung

						Realisasi Belanja APBD Rp. 1.661.386.787.461		
			15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Kecamatan Jelutung Sebesar Rp. 7.727.243.453,- - Total Realisasi Belanja sebesar Rp. 13.627.041.587,-	56,70%	- sumber data mengacu pada realisasi kecamatan jelutung (LRA permendagri 13)
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Kecamatan Jelutung Sebesar Rp. 5.899.798.134,- - Total Realisasi Belanja Kecamatan Jelutung Sebesar Rp. 13.627.014.587	43,29%	- sumber data mengacu pada realisasi kecamatan jelutung (LRA permendagri 13)
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	- Laporan Keuangan Ada sebanyak 3 jenis , sebagai berikut: 1. LRA 2. Neraca 3. CaLK	ada sebanyak 3 Jenis	Sumber data dari laporan Keuangan Kecamatan Jelutung (LRA, Neraca, CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	-ada inventarisasi barang atau aset perangkat daerah yang meliputi KIB A (Tanah),KIB B (Peralatan dan Mesin), KIB C (Gedung dan Bangunan),KIB D (Jalan, Irigasi dan Jaringan), KIB E (Aset tetap Lainnya), Aset Lainnya	- ada 5 Jenis KIB A(Tanah), KIB B (Peralatan dan Mesin), KIB C (Gedung dan Bangunan),KIB D (Jalan, Irigasi dan Jaringan), KIB E (Aset tetap Lainnya), Aset Lainnya	- sumber data dari KIB A(Tanah), KIB B (Peralatan dan Mesin), KIB C (Gedung dan Bangunan),KIB D (Jalan, Irigasi dan Jaringan), KIB E (Aset tetap Lainnya), Aset Lainnya
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Jumlah Aset yang digunakan Rp. 9.693.055.062.64,- - Jumlah Aset yang tidak Gunakan Rp. 58.131.000,00,-	16.6%	- sumber data dari KIB A(Tanah), KIB B (Peralatan dan Mesin), KIB C (Gedung dan Bangunan),KIB D (Jalan, Irigasi dan Jaringan), KIB E (Aset tetap Lainnya), Aset Lainnya
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Fasilitas Prasarana Informasi yang ada di Kecamatan jelutung Antara lain : 1. Papan Pengumuman 2. Leafet 3. Pengumuman Media massa 4. Pos Pengaduan	Jumlah 4 jenis Fasilitas Prasarana Informasi Kecamatan jelutung papan informasi ada 3 buah, Leaflet/Brosur tentang Prosedur Pengurusan Non Perizinan dan syarat rekomendasi izin, Pos pengaduan (Kotak saran di pelayanan terpadu ada 1 Buah), Pengumuman di media massa (website http://kecejelutung.jambikota.go.id)	- Fasilitas Prasarana Informasi yang ada di Kecamatan jelutung Antara lain : 1. Papan Pengumuman 2. Leafet 3. Pengumuman Media massa 4. Pos Pengaduan
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	- Alat Survei Kepuasan Masyarakat tentang Pelayanan yang ada di Kecamatan jelutung	Ada 1 buah alat survey kepuasan masyarakat tentang pelayanan di Kecamatan	Survey Kepuasan masyarakat dengan alat survey kepuasan masyarakat tentang pelayanan yang ada di Kecamatan

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Kotabaru
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pengembangan, Inspektorat & Fungsi Penunjang Lainnya)

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis), ada sebanyak 1 program yaitu : - Program Pemberdayaan Masyarakat Nomor Program : 5.00.01.5.00.01.01.43. Jumlah Anggaran : Rp. 5.680.445.000,00 Realisasi : Rp. 5.320.292.215,00	1 Program	Kecamatan Kotabaru
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	- SOP Perizinan, dan - SOP Non Perizinan	2 SOP	Kecamatan Kotabaru
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Keberadaan Peraturan(Perda/Perkada)yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	- Perda kota jambi No. 09 Tahun 2016 ttg perubahan perda kota jambi no. 46 thn 2002 ttg pedoman pembentukan rukun tetangga (RT) dan lembaga pemberdayaan masyarakat (kota jambi thn 2016 no.09) - perda kota jambi no.14 thn 2016 pembentukan dan susunan daerah (lembaran daerah kota jambi thn 2016 m0.14) -perwal jambi no.13 thn 2017 ttg pedoman dan tata cara pemilihan rukun tetangga (RT) dan lembaga pemberdayaan masyarakat (berita daerah kota jambi thn 2017 no.13)	Ada	Kecamatan Kotabaru
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada, sebanyak 34 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 34	100 %	Kecamatan Kotabaru
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Jabatan Fungsional dalam Struktur organisasi Kecamatan Kotabaru, tidak ada	Tidak Ada	Kecamatan Kotabaru

4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	- PNS di Lingkup Kecamatan Kotabaru, sebanyak 55 personel - Total PNS Kota sebanyak 6.213 personel	0,88%	Kecamatan Kotabaru
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim 20 orang - Pejabat yang ada sebanyak 34 orang	58.8%	Kecamatan Kotabaru
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 34 Orang - Pejabat yang ada sebanyak 34 orang	100 %	Kecamatan Kotabaru
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	1. Renstra 2018-2023 2. Renja 2019 3. RKA 2019	Ada, sebanyak 3 Jenis	Kecamatan Kotabaru
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMDx100%	RENJA Tahun 2019	100%	Kecamatan Kotabaru
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	RKA dan RENJA Tahun 2019	100 %	Kecamatan Kotabaru
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerahx100%	RKA dan DPA Tahun 2019	100 %	Kecamatan Kotabaru
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Kecamatan Kotabaru, sebesar Rp. 12.723.690.797 - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.846.258.216.875	0.68%	Kecamatan Kotabaru
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Kecamatan Kotabaru sebesar Rp. 11.967.708.247,00 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. 1.661.386.787.461	0.72%	Kecamatan Kotabaru
			15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Kecamatan Kotabaru, sebesar Rp. 6.691.833.352 - Total Realisasi Belanja Kecamatan Kotabaru, sebesar Rp. 11.967.708.247.	0.55%	-

			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Kecamatan Kotabaru, sebesar Rp. 5.275.874.895 - Total Realisasi Belanja Kecamatan Kotabaru, sebesar Rp. 11.967.708.247	0.44%	Kecamatan Kotabaru
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan Keuangan ada, sebanyak 3 Jenis, sbb : 1. Neraca 2. LRA 3. CaLK	Ada, sebanyak 3 Jenis	Kecamatan Kotabaru
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Berita Acara Validasi Aset/Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2019	Ada	Kecamatan Kotabaru
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang tidak di gunakan, Rp. 109.888.000 Asset yang di gunakan Rp. 6.039.871.075	0.18%	Kecamatan Kotabaru
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	1. Papan Pengumuman 2. Visual Elektronik 3. Pos Pengaduan 4. Website 5. Pojok Baca 6. Area Khusus Merokok 7. Prasarana Free Wifi 8. Leaflet 9. Mobil Operasional 10. Media Sosial Instagram 11. Media Sosial Facebook	11 Jenis	Kecamatan Kotabaru
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Kuesioner Instrumen Kepuasan Pelanggan	Ada	Kecamatan Kotabaru

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Paal Merah
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pengembangan, Inspektorat & Fungsi Penunjang Lainnya)

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program pemberdayaan masyarakat Anggaranya = Rp 5.898.907.945,00 realisasi = Rp 5.595.197.853,00	1. Program (program pemberdayaan masyarakat)	unit Keuangan
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	1. Kegiatan Bangkit Berdaya 2. SOP RT. 3.SOP Dispensasi Nikah , 4. SOP SKBD, 5. SOP Pengurusan KTP, 6. SOP Surat Ahli Waris, 7. SOP Pengurusan Pindah, 8. SOP Pengurusan Surat Keterangan, 9. SOP Surat Izin Tempat Usaha, 10. SOP Izin Mendirikan Bangunan	10 SOP	-
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Keberadaan Peraturan(Perda/Perkada)yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	1. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Ketua Rukun Tetangga dan LPM 2. Perda Nomor 14 Tahun 2016b tentang pembentukan dan penyusunan perangkat Daerah 3. Perwal Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Ketua Rukun Tetangga dan LPM 4. Perwal Nomor Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	ada 2 Perda dan 2 Perwal	sumber data bagian umum
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	jabatan yang ada sebanyak 34 jabatan, jabatan yang harus ada sebanyak 34 jabatan	34/34*100% =100%	-
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada	Tidak Ada	sumber data BKD/ Perangkat Daerah mengacu kondisi perangkat Daerah Terakhir Updated 2019
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	PNS Perangkat Daerah Sebanyak 50 Personel, Total PNS Kota jambi sebanyak 6213	=50/6213x100% = 0,80%	sumber data mengacu pada data duk perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari BKD

		yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	1. Pejabat yang telah mengikuti diklat Pim = 6 orang, 2. Pejabat yang ada = 50 orang	=6orang/50Orang x100%= 12.00%	sumber data mengacu pada data duk perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari BKD
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 34 orang, pejabat yang ada sebanyak 34 orang	= 34/34x100% = 100%	sumber data mengacu pada data duk perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari BKD
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Kebudayaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	jumlah program yang diakomodir dalam sebanyak 8 program	ada	sumber data mengacu pada data perencanaan perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari Bappeda
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMDx100%	Program Renja perangkat daerah yang diakomodir dalam RKA perangkat daerah sebanyak = 8 program, program dalam RKA perangkat daerah sebanyak = 8 program	=8 program /8 Programx100% = 100%	sumber data perangkat daerah mengacu pada dokumen RKA perangkat Daerah tahun 2019 dan Renja perangkat daerah YBS
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	jumlah program RKA perangkat daerah yang diakomodir dalam dpa perangkat daerah sebanyak 8 program, jumlah program dalam DPA perangkat daerah sebanyak 8 program	=8/8 x100% =100%	sumber data dari dokumen RKA perangkat daerah tahun 2019 dan dokumen DPA tahun 2019
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerahx100%	jumlah program RKA perangkat daerah yang diakomodir dalam DPA perangkat daerah sebanyak 8 program jumlah program dalam DPA perangkat daerah sebanyak 8 program	=8/8 x 100% = 100%	sumber data dari dokumen RKA perangkat daerah tahun 2019 dan dokumen DPA tahun 2019
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran perangkat daerah sebesar Rp 12.653.245.455,00 total belanja APBD sebesar Rp 1.846.258.216.875	12.653.245.455/1.846.258.216.875 X 100 % = 0,68 %	sumber data dari APBD tahun 2019 terakhir
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	realisasi belanja perangkat daerah sebesar Rp 11.838.261.431,00 total realisasi belanja APBD sebesar Rp 1.661.386.787.461	=11.838.261.431 / 1.846.258.216.875 x 100 % = 0,71 %	sumber data dari realisasi APBD tahun 2019
			15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	realisasi belanja langsung perangkat daerah sebesar Rp 7.221.428.600,00 total realisasi belanja perangkat daerah sebesar Rp 11.838.261.431,00	=7.221.428.600/11.838.261.431 x 100 % = 61%	sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah sebesar = Rp 4.616.832.831,00 total realisasi belanja perangkat daerah sebesar Rp 11.838.261.431,00	= 4.616.832.831 /11.838.261.431 x 100 % = 39%	sumber data dari APBD tahun 2019 terakhir

		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	apabila ada laporan keuangan sebanyak 3 buah jenis nya 1. neraca, 2. LRA, 3. CALK	ada sebanyak 3 laporan jenis 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	sumber dari laporan keuangan perangkat daerah teliti apakah laporan keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CALK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	apabila ada sebutkan jenis dokumennya Berita Acara Rekonsiliasi Aset	Ada	sumber data BPKAD dokumennya (Inventarisasi dilakukan 1 kali dalam 5 tahun)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	asset yang tidak digunakan sebesar Rp 96.652,00 asset yang dikuasai perangkat daerah sebesar Rp 8,209,757,449.69	= 96.652. /8.209.757.449 x 100 % = 0,0012	pembilang : sumber data berasal dari DPKAD (berita acara inventarisasi rekonsiliasi penyerahan barang aset) 2. aset layak pakai tetapi tidak digunakan/Dimanfaatkan, penyebut : asat layak pakai tetapi yang digunakan / dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	sebutkan jenis nya : 1. papan pengumuman 2. jalur disabilitas, kotak saran, pos pengaduan 3. sarana bermain anak 4. pojok baca 5. pojok menyusui 6. brosur pelayanan 7. IKM(Tablet survey kepuasan Masyarakat 8. pengumuman lewat media elektronik (website instagram facebook) 9. tempat parkir 10. kawasan merokok 11. taman terbuka hijau, 12. Mobil Operasional	jumlah sebanyak 11 jenis	sebutkan jenis fasilitas prasarana informasi yang ada (data foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	apabila ada sebutkan survey kepuasan tentang (indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik berdasarkan permenpan RB no 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggaraan pelayanan publik)	ada	survey kepuasan masyarakat pelanggan yang dilakukan oleh pemda/ perangkat daerah

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Pasar Jambi
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pengembangan, Inspektorat & Fungsi Penunjang Lainnya)

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	- Program Pemberdayaan Masyarakat - Nilai Anggaran : Rp. 1.816.724.000 - Realisasi : Rp.	1 Program	Kecamatan Pasar Jambi
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	- SOP Pengawasan Tertib Perizinan dan Pengelolaan Penertiban Pedagang Kaki Lima - SOP Kepegawaian - SOP Laporan Kependudukan, Pengelolaan Penerimaan PBB dan SUKET Waris - SOP Pembuatan Usulan Kenaikan Pangkat/Berkala/Pensiun dan Daftar Hadir	4 SOP	Kecamatan Pasar Jambi
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Keberadaan Peraturan(Perda/Perkada)yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada nya Peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan antara lain: - Perda Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2016 - Perda Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 - Perda Kota Jambi Nomor 05 Tahun 2017 -Perwal Nomor 13 Tahun 2017	Ada	Kecamatan Pasar Jambi
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 34 - Jabatan yang harus ada sebanyak 28	100%	Kecamatan Pasar Jambi
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak ada jabatan fungsional di Kecamatan Pasar Jambi	Tidak Ada	Kecamatan Pasar Jambi
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	Jumlah PNS di Perangkat Daerah pada Kecamtan Pasar Jambi 34 Orang Jumlah PNS Kota Jambi sebanyak 6.213 Orang Jumlah jabatan yang ada 28 Orang	0,54%	Kecamatan Pasar Jambi
			7	Pejabat yang telah memenuhi	Jumlah pejabat yang memenuhi	- Pejabat yang telah mengikuti	0.41%	Kecamatan Pasar Jambi

					persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Diklatpim IV sebanyak 12 Orang - Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim III seanyak 2 orang - Pejabat yang ada di Kecamatan Pasar sebanyak 34 orang		
				8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepengkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepengkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepengkatan sebanyak 28 orang	100%	Kecamatan Pasar Jambi
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Adanya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berjumlah 3 Dokumen antara lain: - RENSTRA - RENJA - RKA	3 dokumen		Kecamatan Pasar Jambi
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMDx100%	Ada nya Program RKPD yang diakomodir dalam Renja sebanyak 8 Program	8 program		Kecamatan Pasar Jambi
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja sebanyak 8 program	8 program		Kecamatan Pasar Jambi
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerahx100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat ada 8 program - Jumlah Program dalam DPA ada 8 Program	8 program		Kecamatan Pasar Jambi
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Kecamatan Pasar Jambi sebesar Rp. 8.934.163.647 Total Belanja APBD sebesar Rp. 1.846.258.216.875 8.934.163.647 : 1.846.258.216.875 x 100% = 0.48 %	0.48%		Kecamatan Pasar Jambi
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja Kecamatan Pasar sebesar Rp. 8.097.832.688 Total Realisasi Belanja APBD sebesar Rp. 1.661.386.787.461 8.097.832.688 : 1.846.258.216.875 x 100% = 0.48%	0.43%		Kecamatan Pasar Jambi
			15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	Total Belanja Langsung sebesar Rp. 5.214.138.600 Total Realisasi Belanja Langsung Rp. 4.917.286.467 5.214.138.600 : 4.917.286.467 x 100% = 94,30%	94.30%		Kecamatan Pasar Jambi
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat	- Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.	85.50%		Kecamatan Pasar Jambi

					Daerah x 100%	3.180.546.221,- - Total Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.720.026.047,- 3.180.546.221 : 3.720.026.047 x 100% = 85.50%		
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	- Laporan Keuangan Ada sebanyak 3 : Neraca, LRA, dan Calk	Ada	Kecamatan Pasar Jambi
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada nya inventarisasi barang/aset	Ada	Kecamatan Pasar Jambi
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Jumlah Aset yang tidak digunakan sebesar Rp. 350.543.000,- - Jumlah Aset yang dikuasai Sebesar Rp.8.290.446.790,- - Rp.350.543.000 : Rp. 8.290.446.790 x 100% = 40 %	40%	Kecamatan Pasar Jambi
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	5 Fasilitas / Prasarana Informasi antara lain: - Papan Pengumuman - Leaflet - Website Kecamatan - Mobil Trantib - Pos Pengaduan	Ada	Kecamatan Pasar Jambi
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	- Adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik berupa Quisioner yang diberikan kepada masyarakat	ada	Kecamatan Pasar Jambi

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Pelayangan
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pengembangan, Inspektorat & Fungsi Penunjang Lainnya)

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	- Program Pemberdayaan Masyarakat - Nilai Anggaran : Rp. 4.746.805.000,- - Realisasi Anggaran : Rp. 4.354.939.501,-	100%	Kecamatan Pelayangan Kota Jambi
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	- SOP Perizinan -SOP Non Perizinan	100%	Kecamatan Pelayangan Kota Jambi
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Keberadaan Peraturan(Perda/Perkada)yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	- Perda Kota Jambi No.09 thn. 2016 ttg Perubahan Perda Kota Jambi No. 46 thn, 2002 ttg pedoman pembentukan rukun tetangga (RT) dan lemabaga pemberdayaan masyaeakat (kota jambi tgn. 2016 no. 09) -perda kota jambi no. 14 thm 2016 pembentukan dan susunan perangkat daerah (lembaran daerah kota jambi thn 2016 no.14) -perwal jambi n0. 13 thn 2017 ttg pedoman dan tata cara pemilihan rukun tetangga (RT) dan lembaga pembedayaan masyarakat (berita daerah kota jambi thn. 2017 no. 13	100%	Kecamatan Pelayangan Kota Jambi
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jumlah PNS pada Kecamatan Pelayangan Kota Jambi 57 Orang - Jumlah jabatan yang ada sebanyak 39 orang	100%	Kecamatan Pelayangan Kota Jambi
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada Jabatan Fungsional umum arsiparis ahli pertama sebanyak 1 orang	100%	Kecamatan Pelayangan Kota Jambi
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	- Jumlah Pegawai di Kecamatan Pelayangan Kota Jambi sebanyak	100%	Kecamatan Pelayangan Kota Jambi

		yang relevan dengan urusan terkait				57 Orang - Jumlah PNS Kota Jambi sebanyak 6213 orang		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Jumlah Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim IV sebanyak 10 orang - Pejabat yang ada sebanyak 39 orang - 10 orang : 39 orang x 100% = 0,25%	100%	Kecamatan Pelayangan Kota Jambi
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan sebanyak 39 orang	100	Kecamatan Pelayangan Kota Jambi
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Kebudayaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Adanya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berjumlah 3 Dokumen antara lain : -RENSTRA -RENJA -RKA	100%	Kecamatan Pelayangan Kota Jambi
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMDx100%	Adanya Program RKPD yang diakomodir dalam Renja sebanyak 7 Program	100%	Kecamatan Pelayangan Kota Jambi
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja sebanyak 7 program	100%	Kecamatan Pelayangan Kota Jambi
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerahx100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat ada 7 program - Jumlah Program dalam DPA ada 7 Program	100%	Kecamatan Pelayangan Kota Jambi
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	-Total Anggaran Perangkat Daerah sebesar Rp.10.977.395.605 -Total Belanja APBD sebesar Rp.1.846.258.216.875	0.59%	Kecamatan Pelayangan
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja sebesar Rp. 10.176.456.196 Total Realisasi APBD sebesar Rp 1.661.386.787.461	0.61%	Kecamatan Pelayangan Kota Jambi
			15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Total Belanja Langsung sebesar Rp. 5.394.146.501 - Total Realisasi Perangkat Daerah Rp. 10.176.456.196	0.53%	Kecamatan Pelayangan Kota Jambi
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Realisasi Belanja tidak Langsung sebesar Rp. 4.782.309.695 Total	0.46%	Kecamatan Pelayangan Kota Jambi

						Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp. 10.176.456.196		
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	-Laporan Keuangan Ada sebanyak 3 : Neraca, LRA dan CALK	100%	Kecamatan Pelayangan Kota Jambi
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Adanya inventarisasi barang/aset	100%	Kecamatan Pelayangan Kota Jambi
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Jumlah Aset yang tidak digunakan sebesar Rp.262.153.100 Jumlah Aset yang dikuasai sebesar Rp.8.201.414.807.20 Aset y/ tdk digunakan : aset y/ dikuasai x100% =	0.31%	Kecamatan Pelayangan
8	PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	-Papan Pengumuman -Kotak Saran -Mobil Patroli -Media Sosial	100%	Kecamatan Pelayangan Kota Jambi
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	-	-	-

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Satuan Polisi Pamong Praja
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PEMERINTAHAN UMUM

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	I. PROGRAM Pelayanan Administrasi Perkantoran, II. PROGRAM Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran, III. PROGRAM Peningkatan Disiplin Aparatur, V. PROGRAM Penyelenggaraan Trantibum, Serta Penegakan Regulasi Daerah, VI. PROGRAM Pembinaan Dan Perlindungan Masyarakat	5 Program	RKA
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	SOP Sat Pol PP Kota Jambi	Ada	SOTK
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Keberadaan Peraturan(Perda/Perkada)yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Perwal	100 %	Standar Pelayanan Minimal Urusan Wajib Dasar
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) 21 Orang - Jumlah jabatan yang ada 21 Orang	100%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada 2 Jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada	-
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	-PNS Satpol PP 56 Orang - PNS Kota Jambi 6213 Orang	0,90%	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan 14 Orang - Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada 21 Orang	66%	

			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan 21 Orang - Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada 21 Orang	100%	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	-Dok Perencanaan Pol Pp	4 Dokumen	-RENSTRA, RENJA, RKA, DPA
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMDx100%	-Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah Sebanyak 4 - Jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD Sebanyak 4	100%	-
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah Sebanyak 4 Program - Jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah 4 Program	100%	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerahx100%	-Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah Sebanyak 4 Program -Jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah Sebanyak 4 Program	100%	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Alokasi anggaran Perangkat Daerah Rp. 13.841.116.957 - total APBD Rp. 1.846.258.216.875	0,74 %	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp. 12.867.298.857 - Total Realisasi Belanja APBD Rp. 1.661.380.787.461	0,77%	
			15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Total Belanja Langsung Rp. 7.458.029.695 - Total belanja Perangkat Daerah Rp. 12.867.298.857	57%	-
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Total Belanja Tidak Langsung Rp. 5.409.269.162 - Total belanja Perangkat Daerah Rp. 12.867.298.857	42%	-
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Dok LRA, Neraca	-	-
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	Manajemen asset Perangkat	18	Keberadaan inventarisasi barang	Ada atau tidak ada inventarisasi	-	-	-

	DAERAH	Daerah		atau asset Perangkat Daerah	barang atau asset Perangkat Daerah			
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah Rp. 479.429.875 - Total asset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp. 14.385.570.480	3%	-
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Memorial Aset Tetap	-	-
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Lembar IKK	-	-

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pengembangan, Inspektorat & Fungsi Penunjang Lainnya)

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program Peningkatan Kesiagaan Dini dan Manajemen Logistik Kebencanaan Anggaran = Rp. 6.010.645.000,- Realisasi = Rp. 4.492.624.850,-	1 Program	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	1. Protap Pelaksanaan Penyuluhan Kebencanaan 2. Protap Pemeriksaan Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung 3. Prosedur Tetap Pelaksanaan Pemungutan Retribusi PPP-APK 4. Pengadaan Sarana 5. Pengelolaan Investigasi Kebakaran dan Bencana Lainnya 6. Pengelolaan Proteksi Kebakaran Kota 7. Pengelolaan Dana Bantuan Kebakaran dan Bencana Alam di Kota Jambi 8. Penyelamatan Korban pada Masyarakat 9. Penyelamatan Kecelakaan Anggota 10. Pembuatan Laporan Kebakaran 11. Operasional Kebakaran	11 (sebelas) SOP	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Keberadaan Peraturan(Perda/Perkada)yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	1. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2003 Nomor 42) 2. Peraturan Walikota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan serta Pemberi Bantuan Korban Kebakaran dan Bencana Lainnya di Kota Jambi 3. Perda Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum;	Ada	Sumber Data di Bagian Hukum

3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jumlah Jabatan yang diisi : 15 - Jumlah Jabatan yang ada : 16	93%	DUK Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	- PNS Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan : 71 PNS - Seluruh PNS Kota Jambi : 6213 Orang	1,14%	DUK Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan & BKPSDMD
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM : 4 Pejabat - Pejabat yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan : 16 Pejabat	25%	DUK Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memunuhi syarat kepangkatan : 15 - Seluruh Pejabat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan : 16	93%	DUK Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada - RENSTRA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi Tahun 2018 - 2023 - RENJA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi Tahun 2019 - RKA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan KOTA Jambi TAHUN 2019	Ada	Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMDx100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah sebanyak 7 (tujuh) - Jumlah Program dalam RENJA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada RPJMD sebanyak 7 (tujuh)	100%	Dokumen RKA- dan DPA- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang diakomodir dalam RKA : 7 Program - Program dalam RKA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan : 7 Program	100%	Mengacu Dokumen Perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerahx100%	- Program RKA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang diakomodir dalam DPA : 7 Program - Program dalam DPA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan : 7 Program	100 %	Mengacu Dokumen Perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 : Rp. 15.909.756.628,- - Total Belanja APBD sebesar Rp. 1.846.258.216.875,-	- 0,86%	Dokumen Laporan Realisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 : Rp.13.381.801.250,- - Total Realisasi Belanja APBD sebesar Rp. 1.661.380.787.461,-	0,80%	-
			15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 : Rp. 6.877.304.456,- - Total Realisasi Belanja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi ; Rp. 13.381.801.250,-	51%	Dokumen LPP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2019 : 6.504.496.794 - total belanja Perangkat Daerah Rp. 13.381.801.250,-	48%	Dokumen LPP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan Keuangan Ada sebanyak 3 Laporan : 1. Neraca 2. Laporan Realisasi Anggaran 3. Catatan atas Laporan Keuangan	3 (tiga) Jenis	Dokumen Laporan Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada - KIB A - KIB B - KIB C - KIB D - KIB E - AsetLainnya	Ada	Data dari BPKAD
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Aset yang tidak digunakan sebesar Rp. 1.450.277.080 - Aset yang dikuasai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan : Rp. 26.357.358.577	6%	Dokumen dari BPKAD
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Fasilitas Prasarana Partisipasi : 1. Foto Spanduk 2. Foto Pos Pengaduan 3. Foto Leaflet	3 Fasilitas Prasarana Partisipasi	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2. Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Fasilitasi bagi Orkemas dan Parpol	2 Program : 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2. Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Fasilitasi bagi Orkemas dan Parpol	1. RKA. Badan Kesbangpol. 2. Renja Badan Kesbangpol. 3. DPA Badan Kesbangpol
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	1. SOP tentang Izin Pendirian Rumah Ibadah 2. SOP tentang Keberatan/Konflik Rumah Ibadah	2 jumlah : 1. SOP tentang Izin Pendirian Rumah Ibadah 2. SOP tentang Keberatan/Konflik Rumah Ibadah	Sumber data dari Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Ketahanan Kemasyarakatan dan Ekonomi Badan Kesbangpol
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Keberadaan Peraturan(Perda/Perkada)yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	1. Perda Kota Jambi No. 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Jambi No 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi 2. Perda Kota Jambi No 2 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalagunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.	Ada, 2 Perda : 1. Perda Kota Jambi No. 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Jambi No 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi 2. Perda Kota Jambi No 2 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalagunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.	Sumber Data dari Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Ketahanan Kemasyarakatan dan Ekonomi Badan Kesbangpol
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) di Badan Kesbangpol sebanyak 13 - Jabatan yang harus ada sebanyak 14	92%	Data DUK Bagian Kepegawaian Badan Kesbangpol Kota Jambi
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	- Jabatan fungsional tertentu Arsiparis Ahli Muda, - Jabatan fungsional umum	Ada ; - Jabatan fungsional tertentu Arsiparis Ahli Muda, - Jabatan fungsional umum	DUK. dan Peta Jabatan
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	- PNS Kesbangpol sebanyak 29 personel - Total PNS Kota sebanyak 6.213 personel	0,74%	Sumber Data Kasubag Kepegawaian Kesbangpol Kota Jambi : DUK, Simpeg online
			7	Pejabat yang telah memenuhi	Jumlah pejabat yang memenuhi	- Pejabat Badan Kesbangpol yang	64,28%	Sumber data dari Kasubag

					persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	telah mengikuti Diklatpim 9 orang - Pejabat yang ada sebanyak 14 orang		Kepegawaian Badan Kesbangpol Kota Jambi : DUK, Simpeg Online
				8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 13 orang - Pejabat yang ada sebanyak 14 orang	92%	DUK, Simpeg,
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	-Ada, sebanyak 3 jenis yang terdiri dari : 1. Renstra PD 2. Renja PD 3. RKA PD	-Ada, sebanyak 3 jenis yang terdiri dari : 1. Renstra PD 2. Renja PD 3. RKA PD		Sumber data dari Bagian Umum dan Bagian Keuangan Badan Kesbangpol Kota Jambi
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMDx100%	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah sebanyak 8 program - jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD 8 program	100%		Sumber data dari RKA.RKPD.
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Renja Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah sebanyak 8 Program - Program dalam RKA Perangkat Daerah sebanyak 8 Program	100%		Sumber data mengacu pada Dokumen RKA Badan Kesbangpol Tahun 2019 dan Renja Badan Kesbangpol tahun 2019
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerahx100%	- Jumlah Prgram RKA Badan Kesbangpol yang diakomodir di dalam DPA Badan Kesbanpol sebanyak 8 Program - Jumlah Program dalam DPA Badan Kesbangpol sebanyak 8 Program	100%		Sumber data mengacu pada dokumen RKA Badan Kesbangpol Tahun 2019 dan dokumen DPA Badan Kesbangpol Tahun 2019
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Jumlah Total Anggaran Badan Kesbangpol sebesar Rp. 5.316.755.457,- - Total Belanja APBD sebesar Rp. 1.846.258.216.875,-	0,29%		-Sumber data mengacu pada Laporan Keuangan Badan Kesbangpol Kota Jambi dan BPKAD Kota Jambi
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi belanja Badan Kesbangpol Kota Jambi sebesar Rp. 4.940.181.635,- - Total realisasi belanja APBD sebesar Rp. 1.661.380.787.461,-	0,29%		Data dari Kasubag Keuangan Badan Kesbangpol Kota Jambi dan BPKAD Kota Jambi
			15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi belanja langsung Badan Kesbangpol Kota Jambi sebesar Rp. 2.180.200.640,- - Total realisasi belanja Badan Kesbangpol Kota Jambi sebesar Rp. 4.940.181.635,-	44,13%		Sumber data dari Kasubag Keuangan Badan Kesbangpol Kota Jambi
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi belanja tidak langsung Badan Kesbangpol Kota Jambi sebesar Rp. 2.759.980.995,- -	55,87%		Data dari Kasubag Keuangan Badan Kesbangpol Kota Jambi

						Total realisasi belanja Badan Kesbangpol Kota Jambi sebesar Rp. 4.940.181.635,-		
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan Keuangan sebanyak 3 jenis : 1. LRA 2. Neraca 3. CaLk	Ada ; sebanyak 3 jenis : 1. LRA 2. Neraca 3. CaLk	Data dari Bagian Keuangan Badan Kesbangpol Kota Jambi
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	- Jenis dokumen asset Badan Kesbangpol Kota Jambi 1. Laporan Rekon Belanja Modal Semester II dan BA Rekon Belanja Modal Semester II 2. Laporan Aset B.I dan B.II 3. Laporan Mutasi Barang All, Intra Extra 4. Laporan KIB (A,B,C,D,E) All, Intra, Extra	Ada ; - Jenis dokumen asset Badan Kesbangpol Kota Jambi 1. Laporan Rekon Belanja Modal Semester II dan BA Rekon Belanja Modal Semester II 2. Laporan Aset B.I dan B.II 3. Laporan Mutasi Barang All, Intra Extra 4. Laporan KIB (A,B,C,D,E) All, Intra, Extra	Data dari Pengurus Barang Pengguna Badan Kesbangpol Kota Jambi
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Jumlah asset yang tidak digunakan sebesar Rp. 110.273.400,- - Asset yang dikuasai Badan Kesbangpol Kota Jambi sebesar Rp. 7.314.176.413,-	2%	Data dari Pengurus Barang Pengguna Badan Kesbangpol Kota Jambi
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana partisipasi ada 3 jenis : 1. Papan Pengumuman 2. Leaflet	2 jenis ; 1. Papan Pengumuman 2. Leaflet	Data dari Bagian Umum Badan Kesbangpol Kota Jambi
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Survey kepuasan tentang pelayanan Badan Kesbangpol Kota Jambi terhadap pelayanan Perizinan dalam Pengurusan Izin mendirikan Rumah Ibadah, dan Pengurusan Izin untuk mendapatkan Surat Tanda Terdaftar Ormas	Ada, Kotak saran	Data dari Bagian Umum Badan Kesbangpol Kota Jambi

IKK II.2 2 URUSAN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. Urusan PARIWISATA
2. Urusan KEBUDAYAAN

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) PARIWISATA	Urusan (2) KEBUDAYAAN	Urusan (1) PARIWISATA	Urusan (2) KEBUDAYAAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program Pembinaan, Peningkatan dan Perluasan Pengelolaan Budaya dan Pariwisata Anggaran Rp. 2.385.687.000,00 Realisasi Rp.2.326.229.120,00	Program Pembinaan, Peningkatan dan Perluasan Pengelolaan Budaya dan Pariwisata Anggaran Rp. 2.385.687.000,00 Realisasi Rp.2.326.229.120,00	1 Program	1 Program	Dinas Pariwisata & Kebudayaan
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, SOP Urusan Pariwisata, yaitu 1. SOP Survey Objek TDUP 2. SOP Koordinasi dan Hubungan Kerja 3. SOP Melaksanakan Kegiatan HAUL, Lomba Perahu dan Ketek Hias 4. SOP Memberikan Pertimbangan/verifikasi bahan dan analisa terhadap TDUP 5. SOP Penyusunan Dokumen Analisa Data Bahan Pengembangan Sistem Informasi Pemasaran Pariwisata 6. SOP Penyusunan Dokumen Analisa Data Bahan Pengembangan Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi Pariwisata 7. SOP Penyusunan Dokumen Analisa Data Base Profile Pariwisata 8. SOP Penyiapan Bahan Perumusan dan Pelaksanaan Teknis Bidang Promosi 9. SOP Membantu memberikan fasilitas dan prioritas dalam menyelenggarakan promosi atau melakukan kegiatan kepada usaha pariwisata dan seni budaya 10. SOP Mengikuti Pameran Pariwisata	Ada, SOP Urusan Kebudayaan, yaitu 1. SOP Pelaksanaan Festival Budaya	Ada 10 SOP	Ada 10 SOP	SOP DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA JAMBI
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	1) Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada dinas pariwisata dan kebudayaan kota jambi 2) Perda Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Nomor 14 Tahun 2016 3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 4) Undang	1) Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada dinas pariwisata dan kebudayaan kota jambi 2) Perda Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Nomor 14 Tahun 2016 3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 4) Undang	Ada	Ada	1) Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada dinas pariwisata dan kebudayaan kota jambi 2) Perda Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Nomor 14 Tahun 2016 3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan

						undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jumlah Jabatan Urusan Pariwisata & Kebudayaan = 21 orang - Jumlah Jabatan Urusan Pariwisata yang terisi = 21 orang	- Jumlah Jabatan Urusan Pariwisata & Kebudayaan = 21 orang - Jumlah Jabatan Urusan Pariwisata yang terisi = 21 orang	100%	100%	U.Jabatan PariwisataTerdapat pada, Renja, Renstra, Laporan Kinerja dan Struktur Organisasi, (21/21)*100% = 100%
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada Jabatan Fungsional	Tidak Ada Jabatan Fungsional	Tidak Ada	Tidak Ada	Terdapat pada, Renja, Renstra, Laporan Kinerja dan Struktur Organisasi dan DUK
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	- Jumlah PNS di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebanyak 31 Orang - Jumlah PNS di Kota Jambi 6213 orang	- Jumlah PNS di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebanyak 31 Orang - Jumlah PNS di Kota Jambi 6213 orang	0,50%	0,50%	Terdapat pada, Renja, RKA, Renstra, Laporan Kinerja, LPPD dan Struktur Organisasi, (31/6213)*100% = 0,50%
			7	Pejabat yang telah Mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah Mengikuti Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Jumlah pejabat Urusan pariwisata & Kebudayaan + Sekretariat yang memenuhi syarat DIKLATPIM sebanyak 11 orang - Jumlah pejabat Urusan pariwisata + Sekretariat yang ada sebanyak 21 orang	- Jumlah pejabat Urusan pariwisata & Kebudayaan + Sekretariat yang memenuhi syarat DIKLATPIM sebanyak 11 orang - Jumlah pejabat Urusan pariwisata + Sekretariat yang ada sebanyak 21 orang	52,38%	52,38%	Terdapat pada Daftar Urut Kepangkatan, dan Renstra, (11/21) * 100% = 52,38 %
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Jumlah pejabat Urusan pariwisata + Sekretariat yang memenuhi kepangkatan sebanyak 21 orang - Jumlah pejabat Urusan pariwisata + Sekretariat yang ada sebanyak 21 orang	- Jumlah pejabat Urusan pariwisata + Sekretariat yang memenuhi kepangkatan sebanyak 21 orang - Jumlah pejabat Urusan pariwisata + Sekretariat yang ada sebanyak 21 orang	100%	100%	Terdapat pada struktur organisasi, Anjab, Renstra, Laporan Kinerja dan LPPD, (21/21) *100 % = 100%
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	1) Renstra 2) Renja 3) RKA	1) Renstra 2) Renja 3) RKA	Ada 3 jenis	Ada 3 jenis	Memiliki dokumen Renstra, Renja dan RKA
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Urusan pariwisata + Sekretariat sebanyak 7 Program - Jumlah program dalam RENJA Urusan pariwisata + Sekretariat yang ditetapkan pada RPJMD sebanyak 7 Program	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Urusan kebudayaan sebanyak 1 Program - Jumlah program dalam RENJA Urusan kebudayaan yang ditetapkan pada RPJMD sebanyak 1 Program	100%	100%	Terdapat pada Renstra, RKA, Renja, Laporan Kinerja dan LPPD, (7/7) * 100% = 100%, (1/1) * 100% = 100%
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Urusan pariwisata + Sekretariat yang diakomodir dalam RKA sebanyak 6 Program - Jumlah program Urusan pariwisata + Sekretariat dalam RKA sebanyak 6 Program	- Jumlah Program RENJA Urusan kebudayaan yang diakomodir dalam RKA sebanyak 1 Program - Jumlah program Urusan kebudayaan dalam RKA sebanyak 1 Program	100%	100%	Terdapat pada Renstra, RKA, Renja, Laporan Kinerja dan LPPD, (6/6) * 100% = 100%, (1/1) * 100% = 100%
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA urusan pariwisata + Sekretariat yang diakomodir dalam DPA sebanyak 6 Program - Jumlah program Urusan pariwisata + Sekretariat dalam DPA sebanyak 6 Program	- Jumlah Program RKA urusan kebudayaan yang diakomodir dalam DPA sebanyak 1 Program - Jumlah program Urusan kebudayaan dalam DPA sebanyak 1 Program	100%	100%	Terdapat pada Renstra, RKA, Renja, Laporan Kinerja dan LPPD, (6/6) * 100% = 100%, (1/1) * 100% = 100%
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran belanja Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Total Alokasi anggaran belanja Perangkat Daerah dibagi total Anggaran APBD x 100%	- Total anggaran Urusan pariwisata & kebudayaan + Sekretariat Rp. 7.779.289.386,-	- Total anggaran Urusan pariwisata & kebudayaan + Sekretariat Rp. 7.779.289.386,-	0,42%	0,42%	Terdapat Pada DPA. RKA, Laporan Fungsional dan Neraca, (7.779.289.386/1.846.258.216.875)*100 = 0,42%

						- Total anggaran belanja APBD Rp.1.846.258.216.875,-	- Total anggaran belanja APBD Rp.1.846.258.216.875,-			
		Besaran belanja modal	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi belanja Urusan pariwisata & kebudayaan + Sekretariat Rp. 7.159.145.333,- - Total realisasi belanja APBD sebesar Rp. 1.661.380.787.461,83	- Realisasi belanja Urusan pariwisata & kebudayaan + Sekretariat Rp. 7.159.145.333,- - Total realisasi belanja APBD sebesar Rp. 1.661.380.787.461,83	0,43%	0,43%	Terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional), LRA, Neraca
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Belanja langsung Urusan pariwisata & kebudayaan + Sekretariat Rp. 3.903.328.926,- - Total belanja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp. 7.159.145.333,-	- Belanja langsung Urusan pariwisata & kebudayaan + Sekretariat Rp. 3.903.328.926,- - Total belanja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp. 7.159.145.333,-	54,52%	54,52%	Terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional), LRA, Neraca
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Belanja tidak langsung Dinas Pariwisata dan kebudayaan Rp. 3.255.816.407,- - Total belanja Dinas Pariwisata dan kebudayaan Rp. 7.159.145.333,-	- Belanja tidak langsung Dinas Pariwisata dan kebudayaan Rp. 3.255.816.407,- - Total belanja Dinas Pariwisata dan kebudayaan Rp. 7.159.145.333,-	45,47%	45,47%	Terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) - LRA - Neraca
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi sebanyak 3 jenis, yakni (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi sebanyak 3 jenis, yakni (Neraca, LRA, Calk)	Ada	Ada	Memiliki laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada Inventarisasi barang atau aset perangkat Daerah berupa KIB A dan Berita Acara Rekonsiliasi Aset	Ada Inventarisasi barang atau aset perangkat Daerah berupa KIB A dan Berita Acara Rekonsiliasi Aset	Ada	Ada	Memiliki KIB A, Berita Acara Rekonsiliasi Aset dan Kartu Inventaris Aset
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Jumlah asset yang tidak digunakan Dinas Pariwisata dan kebudayaan sebesar Rp. 35.792.375,- - Total asset yang dikuasai Dinas Pariwisata dan kebudayaan sebesar Rp. 4.027.653.821,49	- Jumlah asset yang tidak digunakan Dinas Pariwisata dan kebudayaan sebesar Rp. 35.792.375,- - Total asset yang dikuasai Dinas Pariwisata dan kebudayaan sebesar Rp. 4.027.653.821,49	0,88%	0,88%	Terdapat pada kartu inventaris Disparbud dengan keterangan RB Rusak Berat
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi : 1. Papan Pengumuman 2. Kotak Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi : 1. Papan Pengumuman 2. Kotak Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Mass Media	4 Jenis	4 Jenis	- 3 Papan Pengumuman - 3 Media Sosial (FB, IG dan Web) - 1 Pos Pengumuman - 1 Leaflet
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat tidak ada	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Survey

			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Jumlah pejabat Urusan perdagangan & perindustrian + Sekretariat yang memenuhi kepangkatan sebanyak 25 orang - Jumlah pejabat Urusan perindustrian + Sekretariat yang ada sebanyak 25 orang	- Jumlah pejabat Urusan perdagangan & perindustrian + Sekretariat yang memenuhi kepangkatan sebanyak 25 orang - Jumlah pejabat Urusan perindustrian + Sekretariat yang ada sebanyak 25 orang	100%	100%	Megacu pada Kondisi OPD Terakhir/Update Tahun 2019
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Dokumen perencanaan pembangunan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian berupa 1. Renstra SKPD 2. Renja SKPD 3. RKA SKPD	Dokumen perencanaan pembangunan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian berupa 1. Renstra SKPD 2. Renja SKPD 3. RKA SKPD	Ada 3 Jenis Dokumen	Ada 3 Jenis Dokumen	Dokumen Perencanaan Urusan Industri dan Perdagangan Jadi Satu Dokumen Perencanaan OPD
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Urusan perindustrian + Sekretariat sebanyak 1 Program - Jumlah program dalam RENJA Urusan perindustrian + Sekretariat yang ditetapkan pada RPJMD sebanyak 1 Program	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Urusan perdagangan + Sekretariat sebanyak 7 Program - Jumlah program dalam RENJA Urusan perdagangan + Sekretariat yang ditetapkan pada RPJMD sebanyak 7 Program	100%	100%	Mengacu pada dokumen RKPD Tahun 2019ndan Renja OPD yang Bersangkutan
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Urusan perindustrian + Sekretariat yang diakomodir dalam RKA sebanyak 1 Program - Jumlah program Urusan perindustrian + Sekretariat dalam RKA sebanyak 1 Program	- Jumlah Program RENJA Urusan perdagangan + Sekretariat yang diakomodir dalam RKA sebanyak 7 Program - Jumlah program Urusan perdagangan + Sekretariat dalam RKA sebanyak 7 Program	100%	100%	Mengacu pada Dokumen RKA OPD Tahun 2019 dan Renja OPD
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA urusan perindustrian + Sekretariat yang diakomodir dalam DPA sebanyak 1 Program - Jumlah program Urusan perindustrian + Sekretariat dalam DPA sebanyak 1 Program	- Jumlah Program RKA urusan perdagangan + Sekretariat yang diakomodir dalam DPA sebanyak 7 Program - Jumlah program Urusan perdagangan + Sekretariat dalam DPA sebanyak 7 Program	100%	100%	Mengacu pada Dokumen RKA-SKPD Tahun 2019 dan Renja OPD
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran belanja Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Total Alokasi anggaran belanja Perangkat Daerah dibagi total Anggaran APBD x 100%	- Total anggaran Urusan perdagangan & perindustrian + Sekretariat Rp. 21.734.535.405,- - Total anggaran belanja APBD Rp.1.846.258.216.875,-	- Total anggaran Urusan perdagangan & perindustrian + Sekretariat Rp. 21.734.535.405,- - Total anggaran belanja APBD Rp. 1.846.258.216.875,-	1,17%	1,17%	(21.734.535.405/1.846.258.216.875)*1,17%
		Besaran belanja modal	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi belanja Urusan perdagangan & perindustrian + Sekretariat Rp. 19.621.035.373,- - Total realisasi belanja APBD sebesar Rp. 1.661.380.787.461,83	- Realisasi belanja Urusan perdagangan & perindustrian + Sekretariat Rp. 19.621.035.373,- - Total realisasi belanja APBD sebesar Rp. 1.661.380.787.461,83	1,18%	1,18%	(19.621.035.373/1.661.380.787.461,83) = 1,18%
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Belanja langsung Urusan perdagangan dan perindustrian + Sekretariat Rp. 11.746.450.797,- - Total belanja Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp. 19.621.035.373,-	- Belanja langsung Urusan perdagangan dan perindustrian + Sekretariat Rp. 11.746.450.797,- - Total belanja Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp. 19.621.035.373,-	59,86%	59,86%	(11.746.450.797/19.621.035.373)*100 = 59,86%
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Belanja tidak langsung Dinas Perdagangan dan Perindustrian Rp. 7.874.584.576,- - Total belanja Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp. 19.621.035.373,-	- Belanja tidak langsung Dinas Perdagangan dan Perindustrian Rp. 7.874.584.576,- - Total belanja Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp. 19.621.035.373,-	40,13%	40,13%	(7.874.584.576/19.621.035.373)*100%

		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan Keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebanyak 3 jenis sbb : 1. Neraca 2. LRA 3. CaLK	Laporan Keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebanyak 3 jenis sbb : 1. Neraca 2. LRA 3. CaLK	Ada 3 Jenis	Ada 3 Jenis	Lengkap Urusan Industri dan Perdagangan Inculde Menjadi Urusan DPP
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah berupa KIB & BA Rekonsiliasi aset (Dalam proses)	Ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah berupa KIB & BA Rekonsiliasi aset (Dalam proses)	Ada	Ada	sumber data dari BPKAD
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Jumlah asset yang tidak digunakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp. 4.668.939.800,- - Total asset yang dikuasai Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp. 156.948.230.332,63	- Jumlah asset yang tidak digunakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp. 4.668.939.800,- - Total asset yang dikuasai Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp. 156.948.230.332,63	2,97%	2,97%	Tidak Ada Pemisahan Aset Karena Include Menjadi Urusan Sekretariat OPD
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi : 1. Papan Pengumuman 2. Kotak Pengaduan 3. Leaflet	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi : 1. Papan Pengumuman 2. Kotak Pengaduan 3. Leaflet	3 Jenis	3 Jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat tidak ada	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat ada	Tidak Ada	Ada	Survei Kepuasan Masyarakat/Pelanggan yang Dilakukan Oleh Dinas Perdagangan Ada, Perindustrian tidak ada

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. Urusan KEARSIPAN
2. Urusan PERPUSTAKAAN

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) KEARSIPAN	Urusan (2) PERPUSTAKAAN	Urusan (1) KEARSIPAN	Urusan (2) PERPUSTAKAAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) 1 Program, Nilai Anggaran Rp. 692.138.400,- Realisasi Anggaran Rp. 671.547.900,-	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) 1 Program, Nilai Anggaran Rp. 692.138.400,- Realisasi Anggaran Rp. 671.547.900,-	1 Program yaitu Program Pengolahan, Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah	1 Prog:ram yaitu peningkatan Mutu dan Pelayanan Pe	APBD Lampiran.I.3 Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan . LRA, Neraca, DPA
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	1. SOP Pengendalian Naskah Dinas Masuk 2. SOP Pengendalian Naskah Dinas Keluar 3. SOP Pemberkasan Arsip Aktif 4. SOP Penattaaan Arsip Inaktif Teratur 5. SOP Penataan Arsip Inaktif Tidak Teratur 6. SOP Pemindahan Arsip Aktif 7. SOP Pemusnahan Arsip di Atas 10 Tahun 8. SOP Pemusnaha Arsip Di Bawah 10 Tahun 9. SOP Pelayanan Peminjaman Arsip 10. SOP Alih Media Arsip 11. SOP Penyerahan Arsip Statis	1. Sop Penyusunan Kebijakan Pengembangan Koleksi 2. Sop Pengolahan Bahan Pustaka 3. Sop Perbaikan Buku Bermasalah (Terkait Pengolahan) 4. Sop Pengadaan Buku Berdasarkan desiderata 5. Sop Membuat Bibliografi 6. Sop Melakukan Transliterasi dan Transisi 7. Sop Menghimpun Naskah Kuno dan Koleksi Daerah (Local Content) 8. Sop Sosialisasi Serah Terima Karya Cetak/Karya Rekam (Deposit).	Ada 11 SOP	Ada 8 SOP	Sumber Data : SOP
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaran Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	1. Perda Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan 2. Perwal Jambi Nomor 22 Tahun 2017 tentang Jadwal Reterensi Arsip (JRA) Keuangan, Fasilitasi dan Substantif dilingkungan Pemerintah Kota Jambi. 3.Perwal Jambi Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip dilingkungan Pemerintah Kota Jambi. 4. Perwal Jambi Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital dilingkungan Pemerintah Kota Jambi. 5. Perwal Jambi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Akuisisi Arsip Statis dilingkungan Pemerintah Kota Jambi. 6.Perwal Jambi Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusutan Arsip dilingkungan Pemerintah Kota Jambi 7. Perwal Jambi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengeelolaan Arsip	Tidak Ada	Ada 1 Perda dan 6 Perwal	Tidak Ada	Sumber Data : Perda dan Perwal

		Besaran belanja modal	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Dearah sebesar 8.413.972.948 - Total Realisasi Belanja APBD sebesar Rp. 1.661.380.787.461,83	- Realisasi Belanja Perangkat Dearah sebesar 8.413.972.948 - Total Realisasi Belanja APBD sebesar Rp. 1.661.380.787.461.83	0,50%	0,50%	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dan Total Realisasi Belanja APBD, 8.413.972.948/1.661.380.787.461,83 x 100%= 0,50%
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Total Belanja Langsung Rp. 3.885.236.979,- - Total Belanja PD Rp. 8.413.972.948,-	- Total Belanja Langsung Rp. 3.885.236.979,- - Total Belanja PD Rp. 8.413.972.948,-	46,17%	46,17%	Sumber Data Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Belanja Tidak Langsung Rp. 4.528.735.969,- - Total Belanja OPd Rp. 8.413.972.948,-	- Belanja Tidak Langsung Rp. 4.528.735.969,- - Total Belanja OPd Rp. 8.413.972.948,-	53.82%	53.82%	Sumber Data: Belanja Tidak Langsung dan Total Belanja PD
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada 3 Laporan	Ada 3 Laporan	Sumber Data: LRA, Neraca, CALK
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah berupa KIB & BA Rekonsiliasi aset (Dalam proses)	Ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah berupa KIB & BA Rekonsiliasi aset (Dalam proses)	Ada	Ada	Sumber Data Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Aset yang tidak digunakan sebanyak Rp. 330.806.666,67,- - Aset yang dikuasai sebanyak Rp. 18.435.298.041,33	- Aset yang tidak digunakan sebanyak Rp. 330.806.666,67,- - Aset yang dikuasai sebanyak Rp. 18.435.298.041,33	1,79%	1,79%	Sumber Data Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi, Rp.330.806.666,67/Rp. 18.435.298.041,33*100% =0.18%
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Tidak Ada Fasilitas/prasarana informasi Pada Kearsipan	1. Mobil Perpustakaan Keliling 2. Germo	Tidak Ada	Ada 2 Jenis	Sumber Data Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat ada	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat ada	Ada	Ada	Sumber Data: Laporan survey kepuasan masyarakat pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. Urusan PERTANIAN

2. Urusan KETAHANAN PANGAN

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) PERTANIAN	Urusan (2) KETAHANAN PANGAN	Urusan (1) PERTANIAN	Urusan (2) KETAHANAN PANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program peningkatan produksi mutu produk dan diversifikasi sektor pertanian peternakan dan perikanan - Anggaran: Rp 6.610.142.000 - Realisasi: Rp 6.258.502.530	Program peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan pemberdayaan petani - Anggaran: Rp 1.123.319.000 - Realisasi: Rp 1.027.066.460	1 Program	1 Program	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	ada sebanyak 18 SOP 1. SOP pengembangan tanaman pangan dan hortikultura 2. SOP statistik tanaman pangan dan hortikultura 3. SOP penyaluran bibit tanaman pangan dan hortikultura 4. SOP pembinaan kelompok/pelaku usaha pengolahan hasil pertanian 5. SOP pasar tani/pameran produk pertanian 6. SOP penyaluran saprotan pembenihan dan perlindungan tanaman 7. SOP pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) 8. SOP pembinaan kelompok tani perbenihan 9. SOP pembibitan Surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) 10. SOP pelayanan vaksinasi hewan/ternak ditempat pemilik ternak 11. SOP pelayanan pengobatan hewan / ternak 12. SOP penerbitan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) 13. SOP penerbitan surat keterangan kesehatan pangan asal hewan (SKKPAH) 14. SOP pelayanan vaksinasi hewan/ternak di UPTD Puskesmas 15. SOP penyaluran dan pengawasan ternak pemerintah 16. SOP Inseminasi Buatan 17. SOP pengawasan bibit ternak 18. SOP pengawasan dan pengujian mutu pangan	ada 1 yaitu SOP penyaluran cadangan pangan pokok pemerintah kota jambi	Ada 18 SOP	Ada 1 SOP	Total Jumlah Pertanian dan Ketahanan Pangan 19 SOP
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada perda sebanyak 4 perda pada Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, yaitu: 1. Perda No 13 th 1993 tentang penggemukan ternak sapi	-	Ada 4 PERDA	-	

						potong 2. Perda No 4 th 2008 tentang pengendalian, pemeliharaan, peredaran dan produk unggas 3. Perda No 3 th 2012 tentang retribusi jasa usaha 4. Perda no 9 tahun 2015 tentang perubahan atas perda no 3 tahun 2012				
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jumlah jabatan Urusan pertanian & ketahanan pangan + Sekretariat yang terisi sebanyak 39 orang - Jumlah jabatan Urusan pertanian & ketahanan pangan + Sekretariat yang ada sebanyak 39 orang	- Jumlah jabatan Urusan pertanian & ketahanan pangan + Sekretariat yang terisi sebanyak 39 orang - Jumlah jabatan Urusan pertanian & ketahanan pangan + Sekretariat yang ada sebanyak 39 orang	100%	100%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Jabatan Fungsional yang ada pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebanyak 29 orang	Jabatan Fungsional yang ada pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebanyak 29 orang	Ada	Ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	- Jumlah PNS Urusan pertanian dan ketahanan pangan + Sekretariat sebanyak 123 orang - Jumlah PNS Kota Jambi yang terisi sebanyak 6.213 orang	- Jumlah PNS Urusan pertanian dan ketahanan pangan + Sekretariat sebanyak 123 orang - Jumlah PNS Kota Jambi yang terisi sebanyak 6.213 orang	1,98%	1,98%	
			7	Pejabat yang telah Mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah Mengikuti Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Jumlah pejabat Urusan pertanian & ketahanan pangan + Sekretariat yang memenuhi syarat DIKLATPIM sebanyak 19 orang - Jumlah pejabat Urusan pertanian & ketahanan pangan + Sekretariat yang ada sebanyak 39 orang	- Jumlah pejabat Urusan pertanian & ketahanan pangan + Sekretariat yang memenuhi syarat DIKLATPIM sebanyak 19 orang - Jumlah pejabat Urusan pertanian & ketahanan pangan + Sekretariat yang ada sebanyak 39 orang	48,17%	48,17%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Jumlah pejabat Urusan pertanian dan ketahanan pangan + Sekretariat yang memenuhi kepangkatan sebanyak 39 orang - Jumlah pejabat Urusan pertanian dan ketahanan pangan + Sekretariat yang ada sebanyak 39 orang	- Jumlah pejabat Urusan pertanian dan ketahanan pangan + Sekretariat yang memenuhi kepangkatan sebanyak 39 orang - Jumlah pejabat Urusan pertanian dan ketahanan pangan + Sekretariat yang ada sebanyak 39 orang	100%	100%	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Dokumen perencanaan pembagunan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berupa: 1. Rencana Strategis SKPD 2. Rencana Kerja SKPD 3. Rencana Kegiatan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan pembagunan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berupa: 1. Rencana Strategis SKPD 2. Rencana Kerja SKPD 3. Rencana Kegiatan Anggaran SKPD	3 JENIS DOKUMEN	3 JENIS DOKUMEN	
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- program RKPD yang diakomodir dalam dalam Renja urusan pertanian + sekretariat sebanyak 8 program - program dalam renja urusan pertanian + sekretariat yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 8 program	- program RKPD yang diakomodir dalam dalam Renja urusan ketahanan pangan sebayak 1 program - program dalam renja urusan ketahanan pangan yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 1 program	100%	100%	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- program Renja urusan pertanian + sekretariat yang diakomodir dalam RKA sebayak 8 program - program urusan pertanian + sekretariat dalam RKA sebanyak 8 program	- program Renja urusan ketahanan pangan yang diakomodir dalam RKA sebayak 1 program - program urusan ketahanan pangan	100%	100%	

							dalam RKA sebanyak 1 program			
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- program RKA urusan pertanian + sekretariat yang diakomodir dalam DPA sebanyak 8 program - program urusan pertanian + sekretariat dalam DPA sebanyak 8 program	- program RKA urusan ketahanan pangan yang diakomodir dalam DPA sebanyak 1 program - program urusan ketahanan pangan dalam DPA sebanyak 1 program	100%	100%	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran belanja Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Total Alokasi anggaran belanja Perangkat Daerah dibagi total Anggaran APBD x 100%	- Total anggaran urusan pertanian dan ketahanan pangan + sekretariat Rp. 25.810.690.152 - Total anggaran belanja APBD Rp 1.846.258.216.875	- Total anggaran urusan pertanian dan ketahanan pangan + sekretariat Rp. 25.810.690.152 - Total anggaran belanja APBD Rp 1.846.258.216.875	1,39%	1,39%	
		Besaran belanja modal	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Total realisasi anggaran urusan pertanian dan ketahanan pangan + sekretariat Rp 22.867.400.591 - Total realisasi anggaran belanja APBD Rp. 1.661.380.787.461,83	- Total realisasi anggaran urusan pertanian dan ketahanan pangan + sekretariat Rp 22.867.400.591 - Total realisasi anggaran belanja APBD Rp. 1.661.380.787.461,83	1,37%	1,37%	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Belanja Langsung urusan pertanian dan ketahanan pangan + sekretariat Rp 10.450.127.858 - Total Realisasi belanja DPKP sebesar Rp 22.867.400.591	- Belanja Langsung urusan pertanian dan ketahanan pangan + sekretariat Rp 10.450.127.858 - Total Realisasi belanja DPKP sebesar Rp 22.867.400.591	45,70%	45,70%	
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Belanja Tidak langsung DPKP Rp. 12.417.272.733 - Total Realisasi belanja DPKP sebesar Rp. 22.867.400.591	- Belanja Tidak langsung DPKP Rp. 12.417.272.733 - Total Realisasi belanja DPKP sebesar Rp. 22.867.400.591	54,30%	54,30%	
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan Keuangan DPKP sebanyak 3 jenis sbb : 1. Neraca 2. LRA 3. CaLK	Laporan Keuangan DPKP sebanyak 3 jenis sbb : 1. Neraca 2. LRA 3. CaLK	Ada	Ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah berupa KIB & BA Rekonsiliasi aset (Dalam proses)	Tidak ada	Ada 2 Dokumen	Tidak Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Jumlah aset yang tidak digunakan DPKP sebesar Rp. 66.059.500,- - Total aset yang dikuasai DPKP sebesar Rp. 96.722.087.402,70	- Jumlah aset yang tidak digunakan DPKP sebesar Rp. 66.059.500,- - Total aset yang dikuasai DPKP sebesar Rp. 96.722.087.402,70	0,06%	0,06%	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Leaflet 3. Mobil keliling	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Leaflet 3. Mobil keliling	3 Jenis Fasilitas	3 Jenis Fasilitas	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat tidak ada	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. Urusan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA

2. Urusan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	Urusan (2) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Urusan (1) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	Urusan (2) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kelembagaan masyarakat	1. Program Kesetaraan gender dan perempuan dan perlindungan anak	1 program	1 program	DPMPPA
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	1. SOP Sub Bidang Umum dan Perencanaan 2. SOP Sub Bidang Kepegawaian 3. SOP Sub Bidang Keuangan 4. SOP Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna 5. SOP Bidang Penguatan Kelembagaan dan Penguatan Partisipasi Masyarakat 6. SOP Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak 7. SOP Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	1. SOP Sub Bidang Umum dan Perencanaan 2. SOP Sub Bidang Kepegawaian 3. SOP Sub Bidang Keuangan 4. SOP Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna 5. SOP Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Penguatan Partisipasi Masyarakat 6. SOP Sub Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak 7. SOP Sub Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	100	100	SOP berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh kementerian
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Perda No. 5 Tahun 2017 ttg Penyelenggaraan Perlindungan Anak		ada		Sub Bidang PH & PA
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	1. Jabatan yang terisi sebanyak 23 jabatan 2. Jabatan yang ada sebanyak 23 jabatan	1. Jabatan yang terisi sebanyak 23 jabatan 2. Jabatan yang ada sebanyak 23 jabatan	100	100	Sub Bagian Kepegawaian DPMPPA
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak ada Jabatan Fungsional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan anak Kota Jambi	Tidak ada Jabatan Fungsional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan anak Kota Jambi	Tidak Ada	Tidak Ada	tidak ada jabatan fungsional pada dinas pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak kota jambi berdasarkan DUK yang diberikan oleh subbag kepegawaian
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	- Jumlah PNS di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Pelindungan anak Kota Jambi 34 Orang - Jumlah PNS Kota Jambi 6213 Orang	- Jumlah PNS di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Pelindungan anak Kota Jambi 34 Orang - Jumlah PNS Kota Jambi 6213 Orang	0,54%	0,54%	Berdasarkan jumlah PNS saat ini di DPMPPA, (34/6213)*100%= 0,54%
			7	Pejabat yang telah Mengikuti pendidikan pelatihan	Jumlah pejabat yang telah Mengikuti Pendidikan Pelatihan	1. Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sebanyak 15 orang 2.	1. Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sebanyak 15 orang 2.	65,21 %	65,21 %	Sub Bagian Kepegawaian DPMPPA

				kepemimpinan	Kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Jumlah total pejabat yang ada sebanyak 23 orang	Jumlah total pejabat yang ada sebanyak 23 orang			
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepengkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepengkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	1. Pejabat yang memenuhi kepengkatan sebanyak 23 orang, 2. Jabatan yang ada sebanyak 23 jabatan	1. Pejabat yang memenuhi kepengkatan sebanyak 23 orang, 2. Jabatan yang ada sebanyak 23 jabatan	100%	100%	Sub Bagian Kepegawaian DPMPPA
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	3 dokumen	3 dokumen	DPMPPA
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	1. Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam renja perangkat daerah sebanyak 1 program, 2. Renja perangkat daerah yang d tetapkan sebanyak 1 program	1. Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam renja perangkat daerah sebanyak 8 program, 2. Renja perangkat daerah yang d tetapkan sebanyak 8 program	100%	100%	Sub bag Umum / Perencanaan DPMPPA, (1/1)*100%=100%, (8/8)*100%=100%
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	1. Jumlah program RENJA perangkat daerah yang diakomodir dalam RKA perangkat daerah sebanyak 1 program, 2. Jumlah program dalam RKA perangkat daerah sebanyak 1 program	1. Jumlah program RENJA perangkat daerah yang diakomodir dalam RKA perangkat daerah sebanyak 8 program, 2. Jumlah program dalam RKA perangkat daerah sebanyak 8 program	100%	100%	Sub bag umum / perencanaan DPMPPA, (1/1)*100%=100%, (8/8)*100%=100%
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	1. Jumlah program RKA perangkat daerah yang diakomodir dalam DPA sebanyak 1 program 2. Jumlah program dalam DPA perangkat daerah sebanyak 1 program	1. Jumlah program RKA perangkat daerah yang diakomodir dalam DPA sebanyak 8 program 2. Jumlah program dalam DPA perangkat daerah sebanyak 8 program	100%	100%	Sub bag umum / perencanaan DPMPPA, 1/1)*100%=100%, (8/8)*100%=100%
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran belanja Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Total Alokasi anggaran belanja Perangkat Daerah dibagi total Anggaran APBD x 100%	1. Total anggaran belanja perangkat daerah Rp. 15.096.032.442, 2. Total belanja APBD sebesar Rp. 1.846.258.216.875	1. Total anggaran belanja perangkat daerah Rp. 15.096.032.442 , 2. Total belanja APBD sebesar Rp. 1.846.258.216.875	0,81%	0,81%	Anggaran terakhir 2019, (15.096.032.442/1.846.258.216.875)*0,81%
		Besaran belanja modal	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	1. Realisasi belanja perangkat daerah sebesar Rp. 13.861.860.285; 2. Total realisasi belanja APBD sebesarRp. 1.661.380.787.461,83	1. Realisasi belanja perangkat daerah sebesar Rp. 13.861.860.285; 2. Total realisasi belanja APBD sebesar Rp. 1.661.380.787.461,83	0,83%	0,83%	Sub bag keuangan DPMPPA, (13.861.860.285/1.661.380.787.461,83 = 0,83%
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	1. Realisasi belanja langsung perangkat daerah sebesar Rp. 10.407.895.581; 2. Total realisasi belanja perangkat daerah Rp. 13.861.860.285	1. Realisasi belanja langsung perangkat daerah sebesar Rp. 10.407.895.581; 2. Total realisasi belanja perangkat daerah Rp. 13.861.860.285	75,08%	75,08%	Sub bag keuangan DPMPPA, (10.407.895.581/13.861.860.285)*100 = 75,08%
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	1. Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah sebesar Rp. 3.453.964.704,- 2. Total realisasi belanja perangkat daerah sebesar Rp. 13.861.860.285,-	1. Realisasi belanja tidak langsung perangkat daerah sebesar Rp. 3.453.964.704,- 2. Total realisasi belanja perangkat daerah sebesar Rp. 13.861.860.285,-	24,91%	24,91%	Sub bag keuangan DPMPPA, (3.453.964.704/13.861.860.285)*100% = 24,91%
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Ada 3 Jenis, yaitu: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada 3 Jenis, yaitu: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada 3 jenis	Ada 3 jenis	Sub bag keuangan

7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	1. Rekap belanja modal asset 2. Daftar mutasi barang	1. Rekap belanja modal asset 2. Daftar mutasi barang	ada	ada	Asset DPMPPA
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	1. Asset yang tidak digunakan sebanyak Rp. 289.513.700,- 2. Asset yang dikuasai perangkat daerah sebanyak Rp. 10.093.549.586,99	1. Asset yang tidak digunakan sebanyak Rp. 289.513.700,- 2. Asset yang dikuasai perangkat daerah sebanyak Rp. 10.093.549.586,99	2,86%	2,86%	Asset DPMPPA, (289.513.700/10.093.549.586,99)*100 = 2,86%
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	1. Papan Data 2. Mobil perlindungan 3. Motor perlindungan	1. Papan Data 2. Mobil perlindungan 3. Motor perlindungan	Ada 3 jenis	Ada 3 jenis	DPMPPA
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak ada survey kepuasan	Tidak ada survey kepuasan	tidak ada	tidak ada	Bukan barang inventaris

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. Urusan PERUMAHAN RAKYAT

2. Urusan KAWASAN PERMUKIMAN

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) PERUMAHAN RAKYAT	Urusan (2) KAWASAN PERMUKIMAN	Urusan (1) PERUMAHAN RAKYAT	Urusan (2) KAWASAN PERMUKIMAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program urusan perumahan rakyat 1. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Berbasis Kawasan, Nilai Anggaran Rp 751.360.000,- Nilai Realisasi Anggaran Rp 734.944.605,-	Program Urusan Kawasan Permukiman 1. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Berbasis Kawasan, Nilai Anggaran Rp 3.499.141.000,- Nilai Realisasi Anggaran Rp 3.193.872.310,- 2. Program Pembangunan,Pemeliharaan Dan Perluasan Utilitas Perkotaan, Nilai Anggaran Rp 28.258.245.000,- Nilai Realisasi Anggaran Rp 27.893.672.017,-	1 Program	2 Program	Sumber data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada SOP urusan perumahan rakyat yaitu 1. SOP Pengesahan Site Plan Bangunan Perumahan dan Permukiman 2. SOP Pengesahan Revisi Site Plan Bangunan Perumahan dan Permukiman 3. SOP Serah Terima PSU Perumahan dan Permukiman 4. Serah Terima PSU Perumahan dan Permukiman Khusus yang ditelantarkan	Ada SOP urusan kawasan permukiman yaitu : 1. SOP Sistem/Pola Rekomendasi SITU 2. SOP Sistem/Pola Rekomendasi Kajian Teknis Surat IMB 3. SOP Sistem/Pola Rekomendasi Kajian Teknis Surat IMB Reklame 5. SOP Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah (Ambulance) 6. SOP Pelayanan Pemakaman Umum 7. SOP Pelayanan Pemasangan Lampu Hias/Kota 8. SOP Pelayanan Perbaikan Lampu Hias 9. SOP Pelayanan Perbaikan Lampu PJU 10. SOP Pelayanan Pemasangan Lampu PJU	4 SOP	5 SOP	Sumber data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Perda (Perkada) yang berkaitan dengan urusan perumahan rakyat yaitu : 1. Peraturan Walikota No.5 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 2. Peraturan daerah kota jambi no. 11 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kawasan perumahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh 3. Sk Walikota No. 66 tahun 2016 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan	Perda (Perkada) yang berkaitan dengan urusan permukiman yaitu : 1. Peraturan Walikota No.5 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 2. Peraturan daerah kota jambi no. 11 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kawasan perumahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh 3. Sk Walikota No. 66 tahun 2016 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan	Ada	Ada	Sumber data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi

						permukiman kumuh di kota jambi 4. Peraturan daerah kota jambi no. 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah	permukiman kumuh di kota jambi 4. Peraturan daerah kota jambi no. 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jumlah jabatan Urusan perumahan rakyat + Sekretariat yang terisi sebanyak 8 orang - Jumlah jabatan Urusan perumahan rakyat + Sekretariat yang ada sebanyak 8 orang	- Jumlah jabatan Urusan kawasan permukiman yang terisi sebanyak 8 orang - Jumlah jabatan Urusan kawasan permukiman yang ada sebanyak 8 orang	100%	100%	Sumber data DUK Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Jabatan fungsional urusan perumahan rakyat yaitu 1. Pengawas tata bangunan dan perumahan 2. Analis Perumahan 3. Pengelola Perumahan 4. Pengadministrasian IMB Gedung/Bangunan	Jabatan fungsional urusan kawasan permukiman yaitu : 1. Analisis Penataan Kawasan 2. Penyusun Rencana Pemanfaatan Kawasan 3. Pengawas Fisik Permukiman 4. Pengadministrasian Penataan, Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Hias 5. Pengawas Kelistrikan 6. Pemelihara Kendaraan Ambulance 7. Tenaga Kelistrikan	Ada	Ada	Sumber data DUK Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	- Jumlah PNS Urusan perumahan rakyat + Sekretariat sebanyak 24 orang - Jumlah PNS Kota Jambi yang terisi sebanyak 6.213 orang	- Jumlah PNS Urusan kawasan permukiman sebanyak 19 orang - Jumlah PNS Kota Jambi yang terisi sebanyak 6.213 orang	0,39%	0,31%	Sumber data DUK Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi
			7	Pejabat yang telah Mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah Mengikuti Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Jumlah pejabat Urusan perumahan rakyat + Sekretariat yang memenuhi syarat DIKLATPIM sebanyak 5 orang - Jumlah pejabat Urusan perumahan rakyat + Sekretariat yang ada sebanyak 8 orang	- Jumlah pejabat Urusan kawasan permukiman yang memenuhi syarat DIKLATPIM sebanyak 5 orang - Jumlah pejabat Urusan kawasan permukiman yang ada sebanyak 8 orang	62.50%	62.50%	Sumber data DUK Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Jumlah pejabat Urusan perumahan rakyat + Sekretariat yang memenuhi kepangkatan sebanyak 8 orang - Jumlah pejabat Urusan perumahan rakyat + Sekretariat yang ada sebanyak 8 orang	- Jumlah pejabat Urusan kawasan permukiman yang memenuhi kepangkatan sebanyak 8 orang - Jumlah pejabat Urusan kawasan permukimanyang ada sebanyak 8 orang	100%	100%	Sumber data DUK Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. RENSTRA PD 2. RENJA PD 3. RKA PD	Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. RENSTRA PD 2. RENJA PD 3. RKA PD	3 (tiga) jenis	3 (tiga) jenis	Sumber data mengacu pada data perencanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Urusan perumahan rakyat + Sekretariat sebanyak 1 Program - Jumlah program dalam RENJA Urusan perumahan rakyat + Sekretariat yang ditetapkan pada RPJMD sebanyak 1 Program	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Urusan kawasan permukiman sebanyak 8 Program - Jumlah program dalam RENJA Urusan kawasan permukiman yang ditetapkan pada RPJMD sebanyak 8 Program	100%	100%	Sumber data mengacu pada data perencanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Urusan perumahan rakyat + Sekretariat yang diakomodir dalam RKA sebanyak 1 Program - Jumlah program Urusan perumahan rakyat +	- Jumlah Program RENJA Urusan kawasan permukiman yang diakomodir dalam RKA sebanyak 8 Program - Jumlah program Urusan kawasan	100%	100%	Sumber data mengacu pada data perencanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi

						Sekretariat dalam RKA sebanyak 1 Program	permukiman dalam RKA sebanyak 8 Program			
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA urusan perumahan rakyat + Sekretariat yang diakomodir dalam DPA sebanyak 1 Program - Jumlah program Urusan perumahan rakyat + Sekretariat dalam DPA sebanyak 1 Program	- Jumlah Program RKA urusan kawasan permukiman yang diakomodir dalam DPA sebanyak 8 Program - Jumlah program Urusan kawasan permukiman dalam DPA sebanyak 8 Program	100%	100%	Sumber data mengacu pada data perencanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran belanja Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Total Alokasi anggaran belanja Perangkat Daerah dibagi total Anggaran APBD x 100%	- Total anggaran Urusan perumahan rakyat + Sekretariat Rp. 9.047.200.730,- - Total anggaran belanja APBD Rp 1.846.258.216.875,-	- Total anggaran Urusan kawasan permukiman Rp. 31.757.386.000,- - Total anggaran belanja APBD Rp 1.846.258.216.875,-	0,49%	1,72%	Sumber data dari APBD tahun 2019 terakhir
		Besaran belanja modal	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi belanja Urusan perumahan rakyat + Sekretariat Rp. 7.781.229.027,- - Total realisasi belanja APBD sebesar Rp. 1.661.380.787.461,83	- Realisasi belanja Urusan kawasan permukiman Rp. 31.087.544.327,- - Total realisasi belanja APBD sebesar Rp. 1.661.380.787.461,83	0,47%	1,87%	Sumber Data dari realisasi APBD tahun 2019
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Belanja langsung Urusan perumahan rakyat + Sekretariat Rp. 3.058.064.943,- - Total belanja DPRKP sebesar Rp. 38.868.773.354,-	- Belanja langsung Urusan kawasan permukiman Rp. 31.087.544.327,- - Total belanja DPRKP sebesar Rp. 38.868.773.354,-	7,87%	79,98%	Sumber Data dari realisasi APBD tahun 2019
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung DPRKP sebesar Rp 4.723.164.084,- - Total Realisasi Belanja DPRKP sebesar Rp 38.868.773.354,-	- Realisasi Belanja Tidak Langsung DPRKP sebesar Rp 4.723.164.084,- - Total Realisasi Belanja DPRKP sebesar Rp 38.868.773.354,-	12,15%	12,15%	Sumber Data dari realisasi APBD tahun 2019
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan Keuangan ada, sebanyak jenis, sbb: 1. Neraca 2. Laporan Realisasi Anggaran 3. CALK	Laporan Keuangan ada, sebanyak jenis, sbb: 1. Neraca 2. Laporan Realisasi Anggaran 3. CALK	3 (tiga) jenis	3 (tiga) jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah berupa KIB & BA Rekonsiliasi aset (Dalam proses)	Ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah berupa KIB & BA Rekonsiliasi aset (Dalam proses)	Ada	Ada	Sumber data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Jumlah asset yang tidak digunakan DPRKP sebesar Rp. 104.008.128,- - Total asset yang dikuasai DPRKP sebesar Rp.102.007.552.916,47	- Jumlah asset yang tidak digunakan DPRKP sebesar Rp. 104.008.128,- - Total asset yang dikuasai DPRKP sebesar Rp.102.007.552.916,47	0,10%	0,10%	Sumber data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi : 1. Papan Pengumuman 2. Kotak Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi : 1. Papan Pengumuman 2. Kotak Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Mass Media	Jumlah Sebanyak 3 Jenis	Jumlah Sebanyak 3 Jenis	Sumber data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat tidak ada	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat tidak ada	tidak ada	tidak ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. Urusan PEKERJAAN UMUM

2. Urusan PENATAAN RUANG

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) PEKERJAAN UMUM	Urusan (2) PENATAAN RUANG	Urusan (1) PEKERJAAN UMUM	Urusan (2) PENATAAN RUANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program	3 Program	2 Program	-
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	1. SOP BAGIAN KEUANGAN, 2. SOP BAGIAN UMUM, 3. SOP BINA PROGRAM, 4. SOP CIPTA KARYA SUB JALING, 5. SOP KEPEGAWAIAN, 6. SOP LELANG PAKET PEKERJAAN, 7. SOP PENCATATAN DISPOSISI, 8. SOP PENERBITAN SK KEGIATAN, 9. SOP PENCATATAN SK KEGIATAN, 10. SOP PENGAIRAN DRAINASE, 11. SOP PENGUMPULAN LAPORAN KINERJA, 12. SOP PENGUMPULAN RENJA, 13. SOP PENGUMPULAN RENTRSA, 14. SOP PENGUMPULAN RKA, 15. SOP PENYUSUNAN DAFTAR PELAKSANA DPA, 16. SOP PENYUSUNAN DPA, 17. PENYUSUNAN LAKIP, 18. SOP PENYUSUNAN RENJA, 19. SOP PENYUSUNAN RENTSRA, 20. SOP PENYUSUNAN RKA, 21. SOP PERSIAPAN PENYUSUNAN LAKIP, 22. SOP PERSIAPAN PENYUSUNAN PELAKSANAAN ANGGARAN, 23. SOP PERSIAPAN PENYUSUNAN RENJA, 24. SOP PERSIAPAN PENYUSUNAN RENSTRA, 25. SOP PERSIAPAN PENYUSUNAN RKA, 26. SOP PPHP FISIK, 27. SOP PPHP NON FISIK, 28. SOP SURAT MASUK, 29. SOP TINJA, 30. SOP USULAN KEGIATAN.	1. SOP BAGIAN KEUANGAN, 2. SOP BAGIAN UMUM, 3. SOP BINA PROGRAM, 4. SOP CIPTA KARYA SUB JALING, 5. SOP KEPEGAWAIAN, 6. SOP LELANG PAKET PEKERJAAN, 7. SOP PENCATATAN DISPOSISI, 8. SOP PENERBITAN SK KEGIATAN, 9. SOP PENCATATAN SK KEGIATAN, 10. SOP PENGAIRAN DRAINASE, 11. SOP PENGUMPULAN LAPORAN KINERJA, 12. SOP PENGUMPULAN RENJA, 13. SOP PENGUMPULAN RENTRSA, 14. SOP PENGUMPULAN RKA, 15. SOP PENYUSUNAN DAFTAR PELAKSANA DPA, 16. SOP PENYUSUNAN DPA, 17. PENYUSUNAN LAKIP, 18. SOP PENYUSUNAN RENJA, 19. SOP PENYUSUNAN RENTSRA, 20. SOP PENYUSUNAN RKA, 21. SOP PERSIAPAN PENYUSUNAN LAKIP, 22. SOP PERSIAPAN PENYUSUNAN PELAKSANAAN ANGGARAN, 23. SOP PERSIAPAN PENYUSUNAN RENJA, 24. SOP PERSIAPAN PENYUSUNAN RENSTRA, 25. SOP PERSIAPAN PENYUSUNAN RKA, 26. SOP PPHP FISIK, 27. SOP PPHP NON FISIK, 28. SOP SURAT MASUK, 29. SOP TINJA, 30. SOP USULAN KEGIATAN.	ada 30 SOP	ada 30 SOP	sudah ada sop teknis
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan	Ada atau tidak ada	PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG	PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG	ada	ada	

				dengan Penyelenggaraan Urusan		PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Dinas Daerah Kota Jambi mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;	PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Dinas Daerah Kota Jambi mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Ada 28 jabatan yang terisi 15 kepala seksi 5 kepala bidang 4 kasubag 2 kepala uptd 1 sekretaris 1 kepala dinas	Ada 28 jabatan yang terisi 15 kepala seksi 5 kepala bidang 4 kasubag 2 kepala uptd 1 sekretaris 1 kepala dinas	100%	100%	(28/28) *100% = 100%
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	tidak ada jabatan fungsional	tidak ada jabatan fungsional	Tidak Ada	Tidak Ada	di dalam struktur organisasi tidak ada nama yang tertulis pada bagian jabatan fungsional
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	- Jumlah PNS di DPUPR kota jambi adalah 104 - Jumlah PNS Kota Jambi yang terisi sebanyak 6.213 orang	- Jumlah PNS di DPUPR kota jambi adalah 104 - Jumlah PNS Kota Jambi yang terisi sebanyak 6.213 orang	1,67%	1,67%	(104/6213)*100% = 1,67%
			7	Pejabat yang telah Mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah Mengikuti Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	1. H. FATRI SUANDRI, ST, MM Pembina Tk. I - IV/b 157/ DIKLATPIM TK. III/ KDN/ 2011 Jakarta, 16 Mei 2011 55573/ ADUMLA/ DDNDAN OTDA/ 2000 Jakarta, 09 Desember 2000 2. Ir. GANDI SUBROTO Pembina - IV/a 4780/ DIKLATPIM TK. III/ DDN/ 2003 Jambi, 01 September 2003 3. M. YUNIUS, ST, MT Pembina - IV/a 7950/ DIKLATPIM TK. IV/ LAN/ 2007 Jambi, 12 September 2007 00218/ DIKLATPIM TK. III/ 02/ 1375/ Kemendagri/ 2018 Jakarta, 11 Agustus 2018 4. LUFTI SIREGAR, ST Penata Tk. I - III/d 6227/ DIKLAT PIM TK. IV/ 2003 Jambi, 15 Oktober 2003 5. MUTAHARUDIN SOFAR, S.ST Penata Tk. I - III/d 4433/ DIKLATPIM TK. IV/ V/ DDN/ 2007 Muara Bulian, 31 Desember 2007 6. MOMON SUKMANA FITRA, ST, MM Penata Tk. I - III/d 6.129/ DIKLATPIM TK. IV/ KDN/ 2011 Jambi, 27 Juni 2011 7. ADID, SE Penata Tk. I - III/d 4971/ DIKLATPIM TK. IV/ DDN/ 2009 Jambi, 13 Agustus 2009 8. AGUSTIAWAN HARMAIN, ST, M.Si Penata - III/c 0000942/ DIKLATPIM TK. IV/ 15/ 1571/ LAN/ 2013 Jambi, 10 Juni 2013 9. ZUBAINI Penata - III/c 00004388/DIKLATPIM TK. IV/5500/012/LAN-PEMPROV JAMBI/2018 Jambi, 23 Juli 2018. - Pejabat yang mengikuti diklat Pim sebanyak 5 orang	1. H. FATRI SUANDRI, ST, MM Pembina Tk. I - IV/b 157/ DIKLATPIM TK. III/ KDN/ 2011 Jakarta, 16 Mei 2011 55573/ ADUMLA/ DDNDAN OTDA/ 2000 Jakarta, 09 Desember 2000 2. Ir. GANDI SUBROTO Pembina - IV/a 4780/ DIKLATPIM TK. III/ DDN/ 2003 Jambi, 01 September 2003 3. M. YUNIUS, ST, MT Pembina - IV/a 7950/ DIKLATPIM TK. IV/ LAN/ 2007 Jambi, 12 September 2007 00218/ DIKLATPIM TK. III/ 02/ 1375/ Kemendagri/ 2018 Jakarta, 11 Agustus 2018 4. LUFTI SIREGAR, ST Penata Tk. I - III/d 6227/ DIKLAT PIM TK. IV/ 2003 Jambi, 15 Oktober 2003 5. MUTAHARUDIN SOFAR, S.ST Penata Tk. I - III/d 4433/ DIKLATPIM TK. IV/ V/ DDN/ 2007 Muara Bulian, 31 Desember 2007 6. MOMON SUKMANA FITRA, ST, MM Penata Tk. I - III/d 6.129/ DIKLATPIM TK. IV/ KDN/ 2011 Jambi, 27 Juni 2011 7. ADID, SE Penata Tk. I - III/d 4971/ DIKLATPIM TK. IV/ DDN/ 2009 Jambi, 13 Agustus 2009 8. AGUSTIAWAN HARMAIN, ST, M.Si Penata - III/c 0000942/ DIKLATPIM TK. IV/ 15/ 1571/ LAN/ 2013 Jambi, 10 Juni 2013 9. ZUBAINI Penata - III/c 00004388/DIKLATPIM TK. IV/5500/012/LAN-PEMPROV JAMBI/2018 Jambi, 23 Juli 2018 - Pejabat yang mengikuti diklat Pim sebanyak 5 orang	17,85%	17,58%	(5/28)*100% = 17,85 %
			8	Pejabat yang telah memenuhi	Jumlah pejabat yang memenuhi	- Jumlah pejabat yang	- Jumlah pejabat yang	32%	32%	

					persyaratan kepengkataan	persyaratan kepengkataan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	memenuhi persyaratan kepengkataan adalah 9 orang - Jumlah total pejabat di Dinas PUPR Kota Jambi adalah 28 orang	memenuhi persyaratan kepengkataan adalah 9 orang - Jumlah total pejabat di Dinas PUPR Kota Jambi adalah 28 orang			
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Dokumen perencanaan pembangunan di DPUPR berupa 1. Renstra SKPD 2. Renja SKPD 3. RKA SKPD	Dokumen perencanaan pembangunan di DPUPR berupa 1. Renstra SKPD 2. Renja SKPD 3. RKA SKPD	ada 3 jenis	ada 3 jenis		
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Urusan pekerjaan umum + Sekretariat sebanyak 10 Program. - Jumlah program dalam RENJA Urusan pekerjaan umum yang ditetapkan pada RPJMD sebanyak 10 Program. 1. Program Perencanaan SKPD 2. Program Pengembangan Data/Informasi 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5. Program peningkatan disiplin aparatur 6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7. Program Pembangunan, Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 8. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 9. Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Perluasan Utilitas Perkotaan 10. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Berbasis Kawasan 11. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 12. Program Perencanaan Tata Ruang	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Urusan penataan ruang sebanyak 2 Program. - Jumlah program dalam RENJA Urusan penataan ruang yang ditetapkan pada RPJMD sebanyak 2 Program. 1. Program Perencanaan SKPD 2. Program Pengembangan Data/Informasi 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5. Program peningkatan disiplin aparatur 6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7. Program Pembangunan, Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 8. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 9. Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Perluasan Utilitas Perkotaan 10. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Berbasis Kawasan 11. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 12. Program Perencanaan Tata Ruang	100%	100%	semua program yang ada di RKPD terakomodir dalam RENJA, Pekerjaan Umum= (10/10)*100% = 100%, Penataan Ruang = (2/2)*100% = 100%	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Urusan pekerjaan umum yang diakomodir dalam RKA sebanyak 10 Program. - Jumlah program Urusan pekerjaan umum dalam RKA sebanyak 10 Program. 1. Program Perencanaan SKPD 2. Program Pengembangan Data/Informasi 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5. Program peningkatan disiplin aparatur 6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7. Program Pembangunan, Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 8. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 9. Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Perluasan Utilitas Perkotaan 10. Program Peningkatan Kualitas	- Jumlah Program RENJA Urusan penataan ruang yang diakomodir dalam RKA sebanyak 2 Program. - Jumlah program Urusan penataan ruang dalam RKA sebanyak 2 Program 1. Program Perencanaan SKPD 2. Program Pengembangan Data/Informasi 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5. Program peningkatan disiplin aparatur 6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7. Program Pembangunan, Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 8. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 9. Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Perluasan Utilitas Perkotaan 10. Program	100%	100%	semua program yang ada di RENJA terakomodir dalam RKA, Pekerjaan Umum= (10/10)*100% = 100%, Penataan Ruang = (2/2)*100% = 100%	

7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah berupa KIB	Ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah berupa KIB	ada	ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Jumlah Aset yang tidak digunakan Rp. 893.637.306,31 - Jumlah Total Aset yang dikuasai Rp. 2.418.005.739.325,19	- Jumlah Aset yang tidak digunakan Rp. 893.637.306,31 - Jumlah Total Aset yang dikuasai Rp. 2.418.005.739.325,19	0,03%	0,03%	(893.637.306,31/2.418.005.739.325,19) = 0,03%
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sikesal (Sistem Informasi Keluhan Masyarakat Online)	Sikesal (Sistem Informasi Keluhan Masyarakat Online)	ada	ada	Pengumuman di Mass Media
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada			

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. Urusan TENAGA KERJA

2. Urusan KOPERASI DAN UMKM

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) TENAGA KERJA	Urusan (2) KOPERASI DAN UMKM	Urusan (1) TENAGA KERJA	Urusan (2) KOPERASI DAN UMKM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program Peningkatan Kualitas, Perlindungan dan Produktivitas Tenaga Kerja; - Anggaran Rp.796.731.500,- - Realisasi Rp.744.605.250,-.	1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM; - Anggaran Rp.859.445.250,- - Realisasi Rp.749.314.990,-. 2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; - Anggaran Rp.609.120.250,- - Realisasi Rp.561.240.150,-	1 (satu) Program	2 (dua) Program	Sumber data
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada banyak 4 (empat) yang terdiri dari: 1. SOP ttg Pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK1) 2. SOP ttg Penempatan Tenaga Kerja 3. SOP ttg Penyelesaian Perselisihan HI 4. SOP ttg Pencatatan Lembaga Kerjasama (LKS) BIPARTIT	Ada banyak 4 (empat) yang terdiri dari: 1. SOP ttg Pelaksanaan Penyuluhan Usaha Koperasi 2. SOP ttg Pemberian Bantuan kepada Koperasi/anggota koperasi 3. SOP ttg Pelatihan dan pemberian fasilitasi sertifikat halal 4. SOP ttg Pendidikan Pelatihan Keterampilan Bagi UMKM	4 (empat) SOP	4 (empat) SOP	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaran Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada 1 (satu) peraturan, yaitu : Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Ada 1 (satu) peraturan, yaitu : Peraturan Walikota Jambi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi	Ada	Ada	Sumber data di Bagian Hukum
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jumlah jabatan Urusan tenaga kerja + Sekretariat yang terisi sebanyak 12 jabatan/ - Jumlah jabatan Urusan tenaga kerja + Sekretariat yang ada sebanyak 13 jabatan	- Jumlah jabatan Urusan koperasi dan UMKM yang terisi sebanyak 8 orang / - Jumlah jabatan Urusan koperasi dan UMKM yang ada sebanyak 8 jabatan	92,31%	100%	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Fungsional Arsiparis: 1 orang	-	Ada	-	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019.
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	- Jumlah PNS Urusan tenaga kerja & UMKM + Sekretariat sebanyak 33 personil/ - Jumlah		0,53%		Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019, (33/6213)*100% = 0,53%

		yang relevan dengan urusan terkait				PNS Kota Jambi yang terisi sebanyak 6.213 personil				
			7	Pejabat yang telah Mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah Mengikuti Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Jumlah pejabat Urusan tenaga kerja & UMKM + Sekretariat yang memenuhi syarat DIKLATPIM sebanyak 12 orang - Jumlah pejabat Urusan tenaga kerja & UMKM + Sekretariat yang ada sebanyak 21 orang		57,14%		Mengacu kondisi terakhir tahun 2019, (12/21)*100% = 57,14%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Jumlah pejabat Urusan tenaga kerja & UMKM + Sekretariat yang memenuhi kepangkatan sebanyak 20 orang, - Jumlah pejabat Urusan tenaga kerja & UMKM + Sekretariat yang ada sebanyak 21 orang		0,95%		Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah, (20/21)*100% = 0,95%
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Dokumen perencanaan pembangunan di Dinas Tenaga Kerja Koperasi & UKM berupa 1. Renstra SKPD 2. Renja SKPD 3. RKA SKPD	Dokumen perencanaan pembangunan di Dinas Tenaga Kerja Koperasi & UKM berupa 1. Renstra SKPD 2. Renja SKPD 3. RKA SKPD	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Urusan tenaga kerja + Sekretariat sebanyak 8 program - Jumlah Program dalam RENJA Urusan tenaga kerja + Sekretariat yang ditetapkan pada RPJMD sebanyak 8 program	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Urusan koperasi dan UMKM sebanyak 1 program / - Jumlah program dalam RENJA Urusan koperasi dan UMKM yang ditetapkan pada RPJMD sebanyak 1 program	100%	100%	Mengacu dokumen RKPD Tahun 2018 dan Renja SKPD, (8/8)*100% = 100%, (1/1)*100%= 100%
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Urusan tenaga kerja + Sekretariat yang diakomodir dalam RKA sebanyak 8 program - Jumlah program Urusan tenaga kerja + Sekretariat dalam RKA sebanyak 8 program	- Jumlah Program RENJA Urusan koperasi dan UMKM yang diakomodir dalam RKA sebanyak 1 program - Jumlah program Urusan koperasi dan UMKM dalam RKA sebanyak 1 program	100 %	100%	Mengacu Dokumen RKA-SKPD Tahun 2019 dan Renja SKPD Tahun 2018, (8/8)*100% = 100%, (1/1)*100%= 100%
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA urusan tenaga kerja + Sekretariat yang diakomodir dalam DPA sebanyak 8 program - Jumlah program Urusan tenaga kerja + Sekretariat dalam DPA sebanyak 8 program	- Jumlah Program RENJA Urusan koperasi dan UMKM yang diakomodir dalam DPA sebanyak 1 program - Jumlah program Urusan koperasi dan UMKM dalam DPA sebanyak 1 program	100%	100%	Mengacu Dokumen RKA-SKPD Tahun 2019 dan dokumen DPA-SKPD tahun 2019, (8/8)*100% = 100%, (1/1)*100%= 100%
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran belanja Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Total Alokasi anggaran belanja Perangkat Daerah dibagi total Anggaran APBD x 100%	- Total anggaran Urusan tenaga kerja & UMKM + Sekretariat Rp. 8.515.208.900,- - Total anggaran belanja APBD Rp.1.846.258.216.875,-	- Total anggaran Urusan tenaga kerja & UMKM + Sekretariat Rp. 8.515.208.900,- - Total anggaran belanja APBD Rp.1.846.258.216.875,-	0,46%	0,46%	Mengacu APBD-P Tahun 2019. (8.515.208.900/1.846.258.216.875)*100 = 0,46%
		Besaran belanja modal	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi belanja Urusan tenaga kerja & UMKM + Sekretariat Rp. 7.651.547.469 - Total realisasi belanja APBD Kota Jambi sebesar Rp. 1.661.380.787.461,83	- Realisasi belanja Urusan tenaga kerja & UMKM + Sekretariat Rp. 7.651.547.469 - Total realisasi belanja APBD Kota Jambi sebesar Rp. 1.661.380.787.461,83	0,46%	0,46%	(7.651.547.469/1.661.380.787.461,83) = 0,46%
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Belanja langsung Urusan tenaga kerja & UMKM + Sekretariat Rp. 3.992.491.171,- - Total Realisasi belanja Dinas	- Belanja langsung Urusan tenaga kerja & UMKM + Sekretariat Rp. 3.992.491.171,- - Total Realisasi belanja Dinas	52,17%	52,17%	(3.992.491.171/7.651.547.469,)*100% = 52,17%

						Tenaga Kerja Koperasi & UKM sebesar Rp.7.651.547.469,-	Tenaga Kerja Koperasi & UKM sebesar Rp.7.651.547.469,-			
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Total belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.659.056.298,-/ - Total Realisasi belanja perangkat daerah Rp. 7.651.547.469,-	- Total belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.659.056.298,-/ - Total Realisasi belanja perangkat daerah Rp. 7.651.547.469,-	47,82%.	47,82%.	(3.659.056.298/7.651.547.469)*100% = 47,82%.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM sebanyak 3 jenis sbb : 1. Neraca 2. LRA 3. CaLK	Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM sebanyak 3 jenis sbb : 1. Neraca 2. LRA 3. CaLK	Ada 3 jenis	Ada 3 jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah berupa KIB & BA Rekonsiliasi aset (Dalam proses)	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah berupa KIB & BA Rekonsiliasi aset (Dalam proses)	Ada	Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Jumlah asset yang tidak digunakan Dinas Tenaga Kerja Koperasi & UKM sebesar Rp. Rp.73.123.000,- - Total asset yang dikuasai Dinas Tenaga Kerja Koperasi & UKM sebesar Rp. 10.128.278.462,29	- Jumlah asset yang tidak digunakan Dinas Tenaga Kerja Koperasi & UKM sebesar Rp. Rp.73.123.000,- - Total asset yang dikuasai Dinas Tenaga Kerja Koperasi & UKM sebesar Rp. 10.128.278.462,29	0,72 %	0,72 %	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dlm 5 tahun, (73.123.000/10.128.278.462,29)*100% = 0,72%
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi : 1. Papan Pengumuman 2. Kotak Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Mass Media (info bursa kerja)	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi : 1. Papan Pengumuman 2. Kotak Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Mass Media (info bursa kerja)	4 (empat) jenis	4 (empat) jenis	Ada
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik					

IKK II.3

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KOTA JAMBI

No	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Urusan Wajib						
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD ----- x 100 % Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kota yang bersangkutan	39.59	7757 ----- x 100 % 7757
		2	Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Jumlah Pendidik PAUD yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD ----- x 100 % Jumlah Pendidik PAUD	64.97	545 ----- x 100 % 545
		3	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi ----- x 100 % Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	34.25	124 ----- x 100 % 124
		4	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Jumlah Penduduk usia 15 thn keatas dapat baca tulis ----- x 100 % Jumlah penduduk usia 15th keatas	NaN	BPS ----- x 100 % BPS
		5	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar ----- x 100 % Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kota yang bersangkutan	98.77	57383 ----- x 100 % 57383
		6	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama ----- x 100 % Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kota yang bersangkutan	86.45	26587 ----- x 100 % 26587
		7	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI ----- x 100 % Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya	0.18	102 ----- x 100 % 102
		8	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs ----- x 100 % Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs	0.51	136 ----- x 100 % 136
		9	Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah Pendidik Jenjang Sekolah Dasar yang memiliki Ijazah (D IV) atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan Sekolah Dasar ----- x 100 % Jumlah Pendidik Jenjang Sekolah Dasar	92.62	2975 ----- x 100 % 2975
		10	Persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah Pendidik Jenjang Menengah Pertama yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan Menengah Pertama ----- x 100 % Jumlah Pendidik Jenjang Menengah Pertama	95.82	1491 ----- x 100 % 1491
		11	Persentase SD dan SMP Terakreditasi	Jumlah Satuan Pendidikan SD dan SMP yang terakreditasi	92.17	259 ----- x 100 %

				----- x 100 % Jumlah Satuan Pendidikan SD dan SMP		259
		12	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI ----- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya	100.00	11814 ----- x 100 % 11814
		13	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs ----- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya	100.00	11396 ----- x 100 % 11396
		14	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs ----- x 100 % Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya	118.70	14023 ----- x 100 % 14023
		15	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan ----- x 100 % Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan	NaN	1555 ----- x 100 % 1555
2	Kesehatan	16	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan ----- x 100 % Jumlah Penduduk di Kota	0.33	2.277 ----- x 100 % 2.277
		17	Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi minimal tingkat utama ----- x 100 % Jumlah RS di Kota	78.57	11 ----- x 100 % 11
		18	Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Kota	Jumlah Tenaga kesehatan ----- x 100 % Jumlah Penduduk Kota	1.14	7.226 ----- x 100 % 7.226
		19	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ----- x 100 % Jumlah ibu hamil di Kota	101.91	11792 ----- x 100 % 11792
		20	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan ----- x 100 % Jumlah ibu bersalin di Kota	98.09	10833 ----- x 100 % 10833
		21	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah bayi baru lahir di Kota	98.09	10833 ----- x 100 % 10833
		22	Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah balita di Kota	96.06	45229 ----- x 100 % 45229
		23	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kota	92.37	10360 ----- x 100 % 10360
		24	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah orang usia 15-59 tahun di kota	62.48	135167 ----- x 100 % 135167
		25	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	umlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di Kota	120.33	148.272 ----- x 100 % 148.272
		26	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita hipertensi di Kota	17.50	21.178 ----- x 100 % 21.178

		27	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita DM di Kota	56.31	7582 ----- x 100 % 7582
		28	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita ODGJ di Kota	112.42	5151 ----- x 100 % 5151
		29	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita TBC di Kota	46.16	6401 ----- x 100 % 6401
		30	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar ----- x 100 % Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kota	86.36	9162 ----- x 100 % 9162
		31	Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah Kelurahan UCI ----- x 100 % Jumlah Seluruh Kelurahan	100.00	62 ----- x 100 % 62
		32	Presentase Balita Gizi Buruk/Stunting yg mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan	Jumlah balita gizi buruk dan stunting mendapat perawatan disarana Pelay. Kes. Disatuwil Kerja pd kurun wkt tertentu ----- x 100 % Jumlah seluruh balita giz iburuk dan stunting yang ditemukan Disatu wilayah kerja dalam waktu yang sama	100.00	4 ----- x 100 % 4
		33	Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn ----- x 100 % Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama	100.00	687 ----- x 100 % 687
		34	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan ----- x 100 % Jumlah Ibu Melahirkan	0.05	5 ----- x 100 % 5
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	35	Panjang jalan Kota dalam kondisi baik	Panjang jalan Kota dalam kondisi mantap (baik dan sedang) ----- x 100 % Panjang seluruh jalan Kota di daerah tersebut	87.06	444km ----- x 100 % 444km
		36	Presentase Panjang Jalan Kota yang di rehabilitasi/direkonstruksi	Panjang jalan Kota yang direhabilitasi/direkonstruksi ----- x 100 % Panjang Jalan Kota yang seharusnya direhabilitasi/direkonstruksi	97.58	444km ----- x 100 % 444km
		37	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota (ha) ----- x 100 % Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kota (ha)	-	0 ----- x 100 % 0
		38	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota (m) ----- x 100 % Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kota (m)	-	0 ----- x 100 % 0
		39	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kota. ----- x 100 % Jumlah total rumah tangga di seluruh Kota tersebut	105.13	82.024 ----- x 100 % 82.024
		40	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan	-	0

			pengolahan air limbah domestik	berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD ----- x 100 % Jumlah rumah di Kota		----- x 100 % 0
		41	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis ----- x 100 % Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah Kota	90.00	18 ----- x 100 % 18
		42	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi ----- x 100 % Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	100.00	384 ----- x 100 % 384
		43	Rumah Tangga Bersanitasi	Jumlah rumah tangga ber sanitasi ----- x 100 % Jumlah seluruh rumah tangga	39.88	453 ----- x 100 % 453
		44	Rumah tangga pengguna air bersih	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih ----- x 100 % Jumlah seluruh rumah tangga	95.12	78.488 ----- x 100 % 78.488
		45	Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh ----- x 100 % Luas Wilayah	4.80	986,5 ----- x 100 % 986,5
		46	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	Luas ruang terbuka hijau ----- x 100 % Luas wilayah	26.20	5381.79 ----- x 100 % 5381.79
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	47	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n ----- x 100 % Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	tidak ada	tidak ada ----- x 100 % tidak ada
		48	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni ----- x 100 % Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	tidak ada	tidak ada ----- x 100 % tidak ada
		49	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) ----- x 100 % Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	6.80	67,12 ----- x 100 % 67,12
		50	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah kumuh ----- x 100 % Jumlah total unit rumah Kota	3.36	5181 ----- x 100 % 5181
		51	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ----- x 100 % Jumlah unit rumah kota	-	0 ----- x 100 % 0
		52	Rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni ----- x 100 % Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs.	-	0 ----- x 100 % 0
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	53	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani ----- x 100 % Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	100.00	50 ----- x 100 % 50
		54	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan ----- x 100 %	100	22 ----- x 100 % 22

				Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi		
		55	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	3027 Warga Negara dan 20 Kelurahan (pemasangan spanduk dan pembagian Leaflet)	
		56	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	60 Warga Negara	
		57	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	208 (Dua Ratus Delapan) warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	
		58	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di ----- x 100 % Jumlah kejadian kebakaran di Kota	95.38	$\frac{124}{124} \times 100 \%$
		59	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	19 Menit	
		60	Persentase Personil Satpol PP berkualitas PPNS	Jumlah Personil Satpol PP Berkualitas PPNS ----- x 100 % Jumlah Personil Satpol PP	12.72	$\frac{7}{7} \times 100 \%$
6	Sosial	61	Persentase penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ----- x 100 % Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	1.79	$\frac{147}{147} \times 100 \%$
		62	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ----- x 100 % Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kota	97.40	$\frac{1948}{1948} \times 100 \%$
		63	Rasio rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar dengan Jumlah Penyandang Diabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar dan gepeng	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar ----- x 100 % Jumlah Penyandang Diabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng	0.00	$\frac{0}{0} \times 100 \%$
		64	Persentase penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga ----- x 100 % Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng seharusnya dapat di reunifikasi dengan keluarga	0.00	$\frac{0}{0} \times 100 \%$
		65	Rasio pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	Jumlah pekerja sosial profesional dan atau Tenaga Kerja Sosial dan atau relawan sosial yang ada ----- x 100 % Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dibina	5.12	$\frac{114}{114} \times 100 \%$
7	Tenaga Kerja	66	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan	6.25	2

			mengacu ke rencana tenaga kerja	yang mengacu ke RTKD ----- x 100 % Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kota		----- x 100 % 2
		67	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi ----- x 100 % Jumlah tenaga kerja keseluruhan	3.62	165 ----- x 100 % 165
		68	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) ----- x 100 % Jumlah tenaga kerja	Rp 62.999,90 / orang	Rp1.869.951.101 ----- x 100 % Rp1.869.951.101
		69	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB LKS Bipartit Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ----- x 100 % Jumlah Perusahaan	28.81	437 ----- x 100 % 437
		70	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan ----- x 100 % Jumlah pencaker yang terdaftar	40.71	1854 ----- x 100 % 1854
		71	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial ----- x 100 % Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial	60.53	46 ----- x 100 % 46
		72	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah Instruktur Bersertifikat Kompetensi ----- x 100 % Jumlah Instruktur	49.00	49 ----- x 100 % 49
		73	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan ----- x 100 % Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja	100.00	23 ----- x 100 % 23
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	74	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD ----- x 100 % Jumlah seluruh belanja langsung APBD	33.33	5.578.530.000 ----- x 100 % 5.578.530.000
		75	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kota yang didampingi ----- x 100 % Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	15.84	32 ----- x 100 % 32
		76	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan ----- x 100 % Jumlah penduduk perempuan	12.12	36 ----- x 100 % 36
		77	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang terlayani ----- x 100 % Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan	100	36 ----- x 100 % 36
		78	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan ----- x 100 % Jumlah angkatan kerja perempuan	1084.74	2061 ----- x 100 % 2061
9	Pangan	79	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan ----- x 100 % Jumlah kebutuhan pangan	193.15	112,358 ----- x 100 % 112,358
		80	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak	tidak	
10	Pertanahan	81	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi ----- x 100 % seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi	100.00	27949 ----- x 100 % 27949
		82	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum ----- x 100 % Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100.00	13 ----- x 100 % 13
		83	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai	100.00	27949

			penanaman modal	dengan peruntukannya di atas izin lokasi ----- x 100 % Luas izin lokasi yang diterbitkan		----- x 100 % 27949
		84	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah luas Tanah Obyek Landreform (TOL) ----- x 100 % Jumlah penerima tanah obyek landreform	-	0 ----- x 100 % 0
		85	Luas lahan bersertifikat	Luas lahan bersertifikat di suatu daerah ----- x 100 % Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah	72.06	2162329 ----- x 100 % 2162329
		86	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah ----- x 100 % Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan	-	0 ----- x 100 % 0
		87	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani ----- x 100 % jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	100.00	2 ----- x 100 % 2
11	Lingkungan Hidup	88	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota	1. Indeks Kualitas / Pencemaran Air (30%) 2. Indeks Kualitas / Pencemaran Udara (30%) 3. Indeks Tutupan Hutan/Lahan (40%)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup = 49,61 ; Indeks Kualitas Air = 38,27 ; Indeks Kualitas Udara = 74,66 ; Indeks Kualitas Tutupan Lahan 39,33	
		89	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kota	Total Vol sampah yang dapat ditangani ----- x 100 % Total vol timbunan sampah kota	78.78	121755.21 ----- x 100 % 121755.21
		90	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kota ----- x 100 % usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	23,96	23 ----- x 100 % 23
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	91	Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran	Jumlah penduduk usia 0 – 18 Tahun tahun yang memiliki akte kelahiran ----- x 100 % Jumlah penduduk usia 0 – 18 tahun	88.72	179633 ----- x 100 % 179633
		92	Persentase Penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang mempunyai KTP Elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP ----- x 100 % Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	97.96	437196 ----- x 100 % 437196
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	93	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kota ----- x 100 % usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	23,96	23 ----- x 100 % 23
		94	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100 % Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)	-	0 ----- x 100 % 0
		95	PKK aktif	Jumlah PKK aktif ----- x 100 % Jumlah PKK	100.00	73 ----- x 100 % 73
		96	Posyandu	Jumlah Posyandu Aktif ----- x 100 % Total Posyandu	100.00	460 ----- x 100 % 460
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	97	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jumlah anak yang dilahirkan oleh Perempuan usia subur (15-49 tahun) ----- x 100 % Jumlah Perempuan Usia Subur (15 -49 tahun)	2,35	0 ----- x 100 % 0
		98	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Jumlah anak yang dilahirkan oleh Perempuan usia subur (15-19 tahun)	23.107	----- x 100 %

				----- x 100 % Jumlah Perempuan Usia Subur (15 -19 tahun)		
		99	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern ----- x 100 % Jumlah Pasangan Usia Subur	73.26	72736 ----- x 100 % 72736
		100	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani ----- x 100 % Jumlah Pasangan Usia Subur	10%	9929 ----- x 100 % 9929
15	Perhubungan	101	Rasio konektivitas Kota	Rasio konektivitas Kabupaten atau Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) o IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut) o IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut) Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP - Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) - Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil - Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan : Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas : a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5	(0,79 x 70) + (0,4 x 30) = 55,3 + 12 = 67,3 Ratio Konektivitas Kab/Kota	
		102	Kinerja lalulintas Kota	V/C Ratio di Jalan Kota	67,3	
16	Komunikasi dan Informatika	103	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo ----- x 100 % Jumlah OPD	87.50	35 ----- x 100 % 35
		104	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi ----- x 100 % Jumlah Layanan Publik	10.00	4 ----- x 100 % 4
		105	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran	80.00	480000

			penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota	penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota ----- x 100 % Jumlah penduduk		----- x 100 % 480000
		106	Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	- 4 Perda, - 15 Perwal	
		107	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN Pengelola TIK yang tersertifikasi Kompetensi ----- x 100 % Jumlah ASN Pengelola TIK yang seharusnya tersertifikasi Kompetensi	30.77	8 ----- x 100 % 8
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	108	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset ----- x 100 % Jumlah seluruh koperasi	8.98	36 ----- x 100 % 36
		109	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirasausaha ----- x 100 % Jumlah usaha mikro keseluruhan	8.08	870 ----- x 100 % 870
		110	Persentase jumlah usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha ----- x 100 % Jumlah usaha kecil keseluruhan	5,08	547 ----- x 100 % 547
		111	Koperasi aktif	Jumlah Koperasi aktif ----- x 100 % Jumlah seluruh koperasi	54.36	218 ----- x 100 % 218
18	Penanaman Modal	112	Persentase peningkatan investasi di Kota	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kota ----- x 100 % Jumlah investasi tahun n-1 di kota	0.33	1055269443 ----- x 100 % 1055269443
19	Kepemudaan dan Olahraga	113	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirasusaha di kota ----- x 100 % Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kota	0.28	406 ----- x 100 % 406
		114	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan di kota ----- x 100 % jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kota	0.19	280 ----- x 100 % 280
		115	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	38 Medali	
		116	Presentase Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Jumlah Pelatih Olah Raga yang Memiliki Kompetensi di satuan Pendidikan ----- x 100 % jumlah Pelatih Olah Raga yang seharusnya Memiliki Kompetensi	20.00	72 ----- x 100 % 72
20	Statistik	117	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ----- x 100 % jumlah OPD	100.00	42 ----- x 100 % 42
		118	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah ----- x 100 % Jumlah OPD	100.00	100 ----- x 100 % 100
21	Persandian	119	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi ----- x 100 % Jumlah area penilaian	80.00	28 ----- x 100 % 28
22	Kebudayaan	120	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan ----- x 100 % Jumlah cagar budaya yang terdata	0.00	0 ----- x 100 % 0
		121	Penyelenggaraan festival seni & budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	5	
23	Perpustakaan	122	Nilai Budaya Baca	Nilai budaya baca	Berdasarkan surat dari BPS Nilai Budaya tidak	

					tersedia di BPS Kota Jambi.(surat terlampir)	
		123	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	x = a+b/a+b × 100% x = persentase naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan a' = naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan (eks) b' = koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan (eks) a = koleksi naskah kuno yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (eks) b = koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (eks)	0	
		124	Koleksi buku yg tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah koleksijudulbukuygtersediadiperustakaandaerah ----- x 100 % Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah	44.22	24479 ----- x 100 % 24479
24	Kearsipan	125	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	1. T = (a + i + s + j)/4 T= tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkandaftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkandaftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN	8.5% dengan perhitungan 50 = (11+21+1+1)/4 x 100% 50=34/6*100=8,5	
		126	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	T = (m + b + g + a + c + i)/6 T= tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK I = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	6.7% dengan perhitungan 50 = (0+0+7+11+21+1) /6 x100% 50=40/6x100% = 6.7%	
URUSAN PILIHAN						
25	Kelautan dan Perikanan	127	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kota di (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kota (sumber data: one data KKP)	-	
		128	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional ----- x 100 % Jumlah Tempat Pelelangan Ikan	-	0 ----- x 100 % 0
26	Pariwisata	129	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) ----- x 100 % Jumlah wisatawan tahun n-1	29.58	145535 ----- x 100 % 145535
		130	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) ----- x 100 % Jumlah wisatawan tahun n-1	29.58	145535 ----- x 100 % 145535
		131	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual ----- x 100 % Jumlah kamar yang tersedia	91.09	318799 ----- x 100 % 318799
		132	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata ----- x 100 % Jumlah total PDRB	81378830319	81378830319 ----- x 100 % 81378830319
		133	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD ----- x 100 % Jumlah total PAD	21.32	81378830319 ----- x 100 % 81378830319
27	Pertanian	134	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun	513,11	3.920,13 ----- x 100 % 3.920,13

				----- x 100 % Luas Panen		
		135	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2019	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian ----- x 100 % Jumlah total PDRB	-	0 ----- x 100 % 0
		136	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) ----- x 100 % Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	12.21	21 ----- x 100 % 21
28	Energi Sumber Daya Mineral	137	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin ----- x 100 % Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	-	0 ----- x 100 % 0
29	Perdagangan	138	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2019	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan ----- x 100 % Jumlah total PDRB	27.38	5120193,44 ----- x 100 % 5120193,44
		139	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUPToko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan ----- x 100 % Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota	-	- ----- x 100 % -
		140	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi ----- x 100 % RDKK	No Data	No Data ----- x 100 % No Data
		141	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan ----- x 100 % jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kota	-	0 ----- x 100 % 0
30	Perindustrian	142	Pertambahan jumlah industri besar di kota	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n– Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) ----- x 100 % Jumlah industri besar tahun n-1	Nodata	No data ----- x 100 % No data
		143	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional)yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kota)	Jumlah Jenis Industri Prioritas Kota ----- x 100 % Jumlah Jenis Industri Prioritas Nasional	No Data	No Data ----- x 100 % No Data
		144	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100 % Jumlah izin yang dikeluarkan	No Data	No Data ----- x 100 % No Data
		145	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100 % Jumlah izin yang dikeluarkan	No Data	No Data ----- x 100 % No Data
		146	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100 % Jumlah izin yang dikeluarkan	No Data	No Data ----- x 100 % No Data
31	Transmigrasi	147	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya	-	
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
		1	Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Kota	Menunjukkan jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Kota	14 Aplikasi	
		2	Penjabaran program RPJMD dalam RKPD	Penjabaran program RPJMD dalam RKPD ----- x 100 % Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan	100.00	59 ----- x 100 % 59
		3	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan ----- x 100 % Jumlah APBD	-	0 ----- x 100 % 0
		4	Rasio PAD	Jumlah PAD	1,28	393.429.595.383,99

				----- x 100 % Jumlah PDRB non migas		----- x 100 % 393.429.595.383,99
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transferexpenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures ----- x 100 % Jumlah belanja APBD	-	0 ----- x 100 % 0
		6	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	
		7	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah(APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	
		8	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartalpertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n ----- x 100 % jumlah kontrak keseluruhan tahun n	0.00	0 ----- x 100 % 0
		9	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif ----- x 100 % Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	26.56	218217133614 ----- x 100 % 218217133614
		10	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan ----- x 100 % Total belanja langsung	21.55	218217133614 ----- x 100 % 218217133614
		11	Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) ----- x 100 % Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	59.83	1619 ----- x 100 % 1619
		12	Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi ----- x 100 % Seluruh jumlah pegawai non Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	7.58	205 ----- x 100 % 205
		13	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi ----- x 100 % Total belanja APBD dikurangi satu	89.86 %	1.661.380.787.461,83 ----- x 100 % 1.661.380.787.461,83
		14	Assets management	1. Apakah ada daftar asset tetap?(Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar assettetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan?(Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	Ya	
		15	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai Realisasi SiLPA ----- x 100 % Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya	13,37%	211.085.867.201 ----- x 100 % 211.085.867.201
		16	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda ----- x 100 % Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	Tidak ada	0 ----- x 100 % 0
		17	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda ----- x 100 % total jumlah dokumen yang telah dirinci	-	0 ----- x 100 % 0
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
		1	Kegiatan pembinaan politik di daerah	Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan politik	2 kegiatan, 1. Kegiatan Koordinasi dan pemantauan situasi dan pendidikan politik 2. Pembinaan	

					pertanggungjawaban bantuan keuangan bagi parpol	
		2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP	Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP	1 kegiatan ; 1. Kegiatan Pembinaan, pemantauan Ormas	